



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 54 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 47 TAHUN 2013
TENTANG BAGAN AKUN STANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengatur belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pendapatan Kapitasi dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mengakomodasi Penambahan Rekening di APBD serta memindahkan kode rekening yang telah ada ke dalam rekening yang lebih sesuai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 54 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 47 TAHUN 2013
TENTANG BAGAN AKUN STANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengatur belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pendapatan Kapitasi dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mengakomodasi Penambahan Rekening di APBD serta memindahkan kode rekening yang telah ada ke dalam rekening yang lebih sesuai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Bagan Akun Standar;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara

Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);

15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 382)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 382) pada huruf B di ubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 31 Desember 2014





BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Peradilan	
BAGIAN HUKUM	

BAGAN AKUN STANDAR

B. KLASIFIKASI ANGGARAN DAN PELAPORAN

1. Klasifikasi Anggaran dan Pelaporan Berdasarkan Organisasi
Klasifikasi anggaran dan pelaporan berdasarkan organisasi di tingkat Pemerintah Daerah disusun berdasarkan struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Klasifikasi ini juga tidak bersifat permanen dan akan disesuaikan dengan perubahan susunan SKPD.
2. Klasifikasi Anggaran dan Pelaporan Berdasarkan Fungsi dan Urusan
Pembagian ini didasarkan pada urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Klasifikasi Anggaran dan Pelaporan berdasarkan ekonomi (jenis belanja)
Klasifikasi berdasarkan ekonomi menekankan kepada jenis belanja/beban. Jenis belanja menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Lain-lain, dan Transfer. Sementara berdasarkan paragraf 35 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga.
Dengan demikian klasifikasi belanja dalam Bagan Akun Standar merupakan struktur akun yang digunakan oleh entitas untuk melakukan perencanaan/penganggaran, perekaman transaksi, dan pelaporan keuangan.

Berdasarkan klasifikasi Bagan Akun Standar tersebut diatas dan memenuhi amanat Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka disusun Bagan Akun Standar (BAS) dalam kode rekening sebagai berikut:

- 0. **PERUBAHAN SAL**
- 0. 1. **PERUBAHAN SAL**
- 0. 1. 1. **Perubahan SAL**
- 0. 1. 1. 01. **Perubahan SAL**
- 0. 1. 1. 01. 001. **Perubahan SAL**

- 0. 2. **TRANSAKSI LAIN-LAIN**
- 0. 2. 1. **PENGEMBALIAN BELANJA**
- 0. 2. 1. 01. **Pengembalian Uang Persediaan**
- 0. 2. 1. 01. 001 **Pengembalian Uang Persediaan**
- 0. 2. 1. 02. **Pengembalian Tambahan Uang Persediaan**
- 0. 2. 1. 02. 001 **Pengembalian Tambahan Uang Persediaan**

- 0. 3. **Transitoris PFK**
- 0. 3. 1. **Penerimaan PFK**
- 0. 3. 1. 01. **Penerimaan PFK Gaji**
- 0. 3. 1. 01. 001 **Taspen**
- 0. 3. 1. 01. 002 **Askes**
- 0. 3. 1. 01. 003 **Taperum**
- 0. 3. 1. 01. 004 **PPh Pusat**
- 0. 3. 1. 02. **Penerimaan PFK Non Gaji**
- 0. 3. 1. 02. 001 **PPh Pusat**
- 0. 3. 1. 02. 002 **PPN Pusat**
- 0. 3. 1. 03. **PFK Lainnya**
- 0. 3. 1. 03. 001 **PFK Lainnya**

- 0. 3. 2. **Pengeluaran PFK**
- 0. 3. 2. 01. **Pengeluaran PFK Gaji**
- 0. 3. 2. 01. 001 **Taspen**
- 0. 3. 2. 01. 002 **Askes**
- 0. 3. 2. 01. 003 **Taperum**
- 0. 3. 2. 01. 004 **PPh Pusat**
- 0. 3. 2. 02. **Pengeluaran PFK Non Gaji**
- 0. 3. 2. 02. 001 **PPh Pusat**
- 0. 3. 2. 02. 002 **PPN Pusat**
- 0. 3. 2. 03. **PFK Lainnya**
- 0. 3. 2. 03. 001 **PFK Lainnya**

- 0. 4. **MUTASI**
- 0. 4. 1. **Mutasi Masuk**
- 0. 4. 1. 01. **Pencairan Deposito**
- 0. 4. 1. 01. 001 **Pencairan Deposito**
- 0. 4. 1. 02. **Mutasi antar Rekening**
- 0. 4. 1. 02. 001 **Mutasi antar Rekening**
- 0. 4. 2. **Mutasi Keluar**
- 0. 4. 2. 01. **Pencairan Deposito**
- 0. 4. 2. 01. 001 **Pencairan Deposito**
- 0. 4. 2. 02. **Mutasi antar Rekening**
- 0. 4. 2. 02. 001 **Mutasi antar Rekening**

- 1. **ASET**
- 1. 1. **ASET LANCAR**
- 1. 1. 1. **Kas dan Setara Kas**
- 1. 1. 1. 01. **Kas di Kas Daerah**
- 1. 1. 1. 01. 001 **Kas di Kas Daerah**
- 1. 1. 1. 02. **Kas di Bendahara Pengeluaran**
- 1. 1. 1. 02. 001 **Kas di Bendahara Pengeluaran**



- 1. 1. 1. 03. **Kas di Bendahara Penerimaan**
- 1. 1. 1. 03. 001 Kas di Bendahara Penerimaan
- 1. 1. 1. 04. **Kas di BLUD**
- 1. 1. 1. 04. 001 Kas di BLUD RSUD RA Kartini
- 1. 1. 1. 05. **Deposito kurang dari 3 Bulan**
- 1. 1. 1. 05. 001 Deposito kurang dari 3 Bulan

- 1. 1. 2. **Investasi Jangka Pendek**
- 1. 1. 2. 01. **Investasi Jangka Pendek**
- 1. 1. 2. 01. 001 Investasi Deposito Jangka Pendek
- 1. 1. 2. 01. 002 Investasi Surat Perbendaharaan Negara
- 1. 1. 2. 02. **Investasi Jangka Pendek-BLU**
- 1. 1. 2. 02. 001 Investasi Deposito
- 1. 1. 2. 02. 002 Investasi Lainnya

- 1. 1. 3. **Piutang Pendapatan**
- 1. 1. 3. 01. **Piutang Pajak**
- 1. 1. 3. 01. 001 Piutang Pajak Hotel
- 1. 1. 3. 01. 002 Piutang Pajak Restoran
- 1. 1. 3. 01. 003 Piutang Pajak Hiburan
- 1. 1. 3. 01. 004 Piutang Pajak Reklame
- 1. 1. 3. 01. 005 Piutang Pajak Penerangan Jalan
- 1. 1. 3. 01. 006 Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 1. 1. 3. 01. 007 Piutang Pajak Parkir
- 1. 1. 3. 01. 008 Piutang Pajak Air Tanah
- 1. 1. 3. 01. 009 Piutang Pajak Sarang Burung Walet
- 1. 1. 3. 01. 010 Piutang Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan
- 1. 1. 3. 01. 011 Piutang Pajak BPHTB
- 1. 1. 3. 01. 012 Piutang Pajak Lainnya
- 1. 1. 3. 02. **Piutang Retribusi**
- 1. 1. 3. 02. 001 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 1. 1. 3. 02. 002 Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
- 1. 1. 3. 02. 003 Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
- 1. 1. 3. 02. 004 Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 1. 1. 3. 02. 005 Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 1. 1. 3. 02. 006 Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
- 1. 1. 3. 02. 007 Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 1. 1. 3. 02. 008 Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 1. 1. 3. 02. 009 Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 1. 1. 3. 02. 010 Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan
- 1. 1. 3. 02. 011 Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- 1. 1. 3. 02. 012 Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 1. 1. 3. 02. 013 Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- 1. 1. 3. 02. 014 Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- 1. 1. 3. 02. 015 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 1. 1. 3. 02. 016 Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- 1. 1. 3. 02. 017 Piutang Retribusi Tempat Pelelangan
- 1. 1. 3. 02. 018 Piutang Retribusi Terminal
- 1. 1. 3. 02. 019 Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 1. 1. 3. 02. 020 Piutang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
- 1. 1. 3. 02. 021 Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- 1. 1. 3. 02. 022 Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan
- 1. 1. 3. 02. 023 Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- 1. 1. 3. 02. 024 Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 1. 1. 3. 02. 025 Piutang Retribusi Penyeberangan di Air
- 1. 1. 3. 02. 026 Piutang Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
- 1. 1. 3. 02. 027 Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- 1. 1. 3. 02. 028 Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

- 1. 1. 3. 02. 030 Piutang Retribusi Ijin Gangguan
- 1. 1. 3. 02. 031 Piutang Retribusi Ijin Trayek
- 1. 1. 3. 02. 032 Piutang Retribusi Ijin Usaha Perikanan
- 1. 1. 3. 02. 033 Piutang Retribusi Perpanjangan IMTA (Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing)
- 1. 1. 3. 03. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**
- 1. 1. 3. 03. 001 Piutang Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT Bank Jateng
- 1. 1. 3. 03. 002 Piutang Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha
- 1. 1. 3. 03. 003 Piutang Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD BPR BKK Jepara
- 1. 1. 3. 03. 004 Piutang Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD BPR Jepara Artha
- 1. 1. 3. 03. 005 Piutang Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Jepara
- 1. 1. 3. 03. 006 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/ BUMN
- 1. 1. 3. 03. 007 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta
- 1. 1. 3. 03. 008 Piutang Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman
- 1. 1. 3. 04. Piutang Lain-lain PAD yang Sah**
- 1. 1. 3. 04. 001 Piutang Pelepasan Hak Atas Tanah
- 1. 1. 3. 04. 002 Piutang Penjualan Perlatan/ Perlengkapan Kantor tidak Terpakai
- 1. 1. 3. 04. 003 Piutang Penjualan Mesin/ Alat-alat Berat tidak Terpakai
- 1. 1. 3. 04. 004 Piutang Penjualan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas
- 1. 1. 3. 04. 005 Piutang Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
- 1. 1. 3. 04. 006 Piutang Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
- 1. 1. 3. 04. 007 Piutang Penjualan Drum Bekas
- 1. 1. 3. 04. 008 Piutang Penjualan Hasil Penebangan Pohon
- 1. 1. 3. 04. 009 Piutang Penjualan Lampu Hias Bekas
- 1. 1. 3. 04. 010 Piutang Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan
- 1. 1. 3. 04. 011 Piutang Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas
- 1. 1. 3. 04. 012 Piutang Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi
- 1. 1. 3. 04. 013 Piutang Penjualan Hasil Pertanian
- 1. 1. 3. 04. 014 Piutang Penjualan Hasil Kehutanan
- 1. 1. 3. 04. 015 Piutang Penjualan Hasil Perkebunan
- 1. 1. 3. 04. 016 Piutang Penjualan Hasil Peternakan
- 1. 1. 3. 04. 017 Piutang Penjualan Hasil Perikanan
- 1. 1. 3. 04. 018 Piutang Penjualan Hasil Sitaan
- 1. 1. 3. 04. 019 Piutang Jasa Giro Kas Daerah
- 1. 1. 3. 04. 020 Piutang Jasa Giro Pemegang Kas
- 1. 1. 3. 04. 021 Piutang Jasa Giro Dana Cadangan
- 1. 1. 3. 04. 022 Piutang Bunga Deposito
- 1. 1. 3. 04. 023 Piutang dari Kerugian Uang Daerah
- 1. 1. 3. 04. 024 Piutang dari Kerugian Barang Daerah
- 1. 1. 3. 04. 025 Piutang Komisi dari Penempatan Kas Daerah
- 1. 1. 3. 04. 026 Piutang Potongan
- 1. 1. 3. 04. 027 Piutang Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rumiah
- 1. 1. 3. 04. 028 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan
- 1. 1. 3. 04. 029 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan
- 1. 1. 3. 04. 030 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
- 1. 1. 3. 04. 031 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat
- 1. 1. 3. 04. 032 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang
- 1. 1. 3. 04. 033 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan
- 1. 1. 3. 04. 034 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan
- 1. 1. 3. 04. 035 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup
- 1. 1. 3. 04. 036 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan
- 1. 1. 3. 04. 037 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pariwisata
- 1. 1. 3. 04. 038 Piutang Denda Pajak Hotel
- 1. 1. 3. 04. 039 Piutang Denda Pajak Restoran
- 1. 1. 3. 04. 040 Piutang Denda Pajak Hiburan
- 1. 1. 3. 04. 041 Piutang Denda Pajak Reklame
- 1. 1. 3. 04. 042 Piutang Denda Pajak Penerangan Jalan
- 1. 1. 3. 04. 043 Piutang Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

- 1. 1. 3. 04. 045 Piutang Denda Pajak Air Bawah Tanah
- 1. 1. 3. 04. 046 Piutang Denda Pajak Sarang Burung Walet
- 1. 1. 3. 04. 047 Piutang Denda Pajak Lingkungan
- 1. 1. 3. 04. 048 Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 1. 1. 3. 04. 049 Piutang Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 1. 1. 3. 04. 050 Piutang Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- 1. 1. 3. 04. 051 Piutang Denda Retribusi Jasa Umum
- 1. 1. 3. 04. 052 Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha
- 1. 1. 3. 04. 053 Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu
- 1. 1. 3. 04. 054 Piutang Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
- 1. 1. 3. 04. 055 Piutang Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame
- 1. 1. 3. 04. 056 Piutang Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman
- 1. 1. 3. 04. 057 Piutang dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
- 1. 1. 3. 04. 058 Piutang dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan
- 1. 1. 3. 04. 059 Piutang dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- 1. 1. 3. 04. 060 Piutang dari Pengembalian kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
- 1. 1. 3. 04. 061 Piutang dari Pengembalian dari Uang Muka
- 1. 1. 3. 04. 062 Piutang dari Pengembalian Lainnya
- 1. 1. 3. 04. 063 Piutang dari Fasilitas Sosial
- 1. 1. 3. 04. 064 Piutang dari Fasilitas Umum
- 1. 1. 3. 04. 065 Piutang dari Uang Pendaftaran/ Ujian Masuk
- 1. 1. 3. 04. 066 Piutang dari Uang Sekolah/ Pendidikan dan Pelatihan
- 1. 1. 3. 04. 067 Piutang dari Uang Ujian Kenaikan Tingkat/ Kelas
- 1. 1. 3. 04. 068 Piutang dari Angsuran/ Cicilan Penjualan Rumah
- 1. 1. 3. 04. 069 Piutang dari Angsuran/ Cicilan Penjualan Kendaraan
- 1. 1. 3. 04. 070 Piutang dari Angsuran/ Cicilan Kompensasi Kios, Kios Dalam Los dan Los / Meja
- 1. 1. 3. 04. 071 Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat
- 1. 1. 3. 04. 072 Piutang dari Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan
- 1. 1. 3. 04. 073 Piutang dari Pemanfaatan Kekayaan / Milik Daerah berupa Bangun Guna Serah
- 1. 1. 3. 04. 074 Piutang BLUD RSU RA Kartini
- 1. 1. 3. 04. 075 Piutang dari Kompensasi
- 1. 1. 3. 05. Piutang Transfer Pemerintah Pusat**
- 1. 1. 3. 05. 001 Piutang Bagi Hasil Pajak
- 1. 1. 3. 05. 002 Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
- 1. 1. 3. 05. 003 Piutang Dana Bagi Hasil Cukai
- 1. 1. 3. 05. 004 Piutang Dana Alokasi Umum
- 1. 1. 3. 05. 005 Piutang Dana Alokasi Khusus
- 1. 1. 3. 06. Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**
- 1. 1. 3. 06. 001 Piutang Dana BOS
- 1. 1. 3. 06. 002 Piutang Dana Penyesuaian Infrastruktur
- 1. 1. 3. 06. 003 Piutang Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan
- 1. 1. 3. 06. 004 Piutang Dana Penyesuaian Tambahan DAU untuk Guru PNSD
- 1. 1. 3. 06. 005 Piutang Dana Otonomi Khusus
- 1. 1. 3. 07. Piutang Transfer Pemerintah Daerah**
- 1. 1. 3. 07. 001 Piutang Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
- 1. 1. 3. 07. 002 Piutang Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air
- 1. 1. 3. 07. 003 Piutang Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 1. 1. 3. 07. 004 Piutang Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air
- 1. 1. 3. 07. 005 Piutang Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 1. 1. 3. 07. 006 Piutang Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
- 1. 1. 3. 07. 007 Piutang Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
- 1. 1. 3. 07. 008 Piutang Bagi Hasil dari Pajak Rokok
- 1. 1. 3. 07. 009 Piutang Bagi Hasil dari Pemberian Ijin Dispensasi Kelebihan Muatan
- 1. 1. 3. 07. 010 Piutang Bagi Hasil dari Tera dan Tera Ulang
- 1. 1. 3. 07. 011 Piutang Bagi Hasil dari Sumbangan Pihak III (Kayu)
- 1. 1. 3. 07. 012 Piutang Bagi Hasil dari Ijin Usaha Perikanan
- 1. 1. 3. 07. 013 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten

- 1. 1. 3. 08. Piutang Bantuan Keuangan**
 - 1. 1. 3. 08. 001 Piutang Bantuan Keuangan dari Provinsi
- 1. 1. 3. 09. Piutang Hibah**
 - 1. 1. 3. 09. 001 Piutang Bantuan Dana Kontinjensi / Penyeimbang dari Pemerintah
 - 1. 1. 3. 09. 002 Piutang Bantuan Pemberdayaan Masyarakat
 - 1. 1. 3. 09. 003 Piutang Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1. 1. 3. 09. 004 Piutang Sumbangan Pihak Ketiga
 - 1. 1. 3. 09. 005 Piutang Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
 - 1. 1. 3. 09. 006 Piutang Hibah Dari Bilateral
 - 1. 1. 3. 09. 007 Piutang Hibah Dari Multilateral
 - 1. 1. 3. 09. 008 Piutang Hibah Dari Donor Lainnya
 - 1. 1. 3. 09. 009 Piutang Penanggulangan Korban/ Kerusakan Akibat Bencana Alam
- 1. 1. 3. 010. Piutang Pendapatan Lainnya**
 - 1. 1. 3. 010 001 Piutang Pendapatan Lainnya
- 1. 1. 4. Piutang Lainnya**
 - 1. 1. 4. 01. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang**
 - 1. 1. 4. 01. 001 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
 - 1. 1. 4. 01. 002 Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan
 - 1. 1. 4. 01. 003 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
 - 1. 1. 4. 02. Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lain**
 - 1. 1. 4. 02. 001 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara
 - 1. 1. 4. 02. 002 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
 - 1. 1. 4. 02. 003 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
 - 1. 1. 4. 02. 004 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1. 1. 4. 02. 005 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
 - 1. 1. 4. 02. 006 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
 - 1. 1. 4. 02. 007 Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
 - 1. 1. 4. 02. 008 Piutang BLU Pelayanan Pengelolaan Dana Investasi
 - 1. 1. 4. 02. 009 Piutang BLU Pengelolaan Dana Bergulir
 - 1. 1. 4. 02. 010 Piutang BLU Pengelolaan Dana Lainnya
 - 1. 1. 4. 02. 011 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU
 - 1. 1. 4. 02. 012 Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
- 1. 1. 5. Penyisihan Piutang**
 - 1. 1. 5. 01. Penyisihan Piutang Pendapatan**
 - 1. 1. 5. 01. 001 Penyisihan Piutang Pajak
 - 1. 1. 5. 01. 002 Penyisihan Piutang Retribusi
 - 1. 1. 5. 01. 003 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1. 1. 5. 01. 004 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
 - 1. 1. 5. 01. 005 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
 - 1. 1. 5. 01. 006 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
 - 1. 1. 5. 01. 007 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah
 - 1. 1. 5. 01. 008 Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan
 - 1. 1. 5. 01. 009 Penyisihan Piutang Hibah
 - 1. 1. 5. 01. 010 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
 - 1. 1. 5. 02. Penyisihan Piutang Lainnya**
 - 1. 1. 5. 02. 001 Penyisihan Piutang Lainnya
- 1. 1. 6. Beban Dibayar Dimuka**
 - 1. 1. 6. 01. Beban Pegawai Dibayar Dimuka**
 - 1. 1. 6. 01 001 Beban Pegawai Dibayar Dimuka
 - 1. 1. 6. 02. Beban Barang Jasa Dibayar Dimuka**
 - 1. 1. 6. 02. 001 Beban Barang Jasa Dibayar Dimuka
 - 1. 1. 6. 03. Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka**
 - 1. 1. 6. 03. 001 Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka

- 1. 1. 7. 01. Persediaan Pemerintah Daerah**
1. 1. 7. 01. 001 Persediaan Alat Tulis Kantor
1. 1. 7. 01. 002 Persediaan Alat Listrik
1. 1. 7. 01. 003 Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya
1. 1. 7. 01. 004 Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1. 1. 7. 01. 005 Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas
1. 1. 7. 01. 006 Persediaan tanaman / Ternak / Ikan
1. 1. 7. 01. 007 Persediaan bahan kimia, obat-obatan dan perlengkapan medis
1. 1. 7. 01. 008 Persediaan bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek
1. 1. 7. 01. 009 Persediaan Bahan Pokok/Makanan dan Keperluan Dapur
1. 1. 7. 01. 010 Persediaan Lainnya
1. 1. 7. 02. Persediaan Untuk Diserahkan ke Masyarakat dan/atau Pihak Ketiga
1. 1. 7. 02. 001 Persediaan Untuk Diserahkan ke Masyarakat dan/atau Pihak Ketiga

- 1. 9. 9. Aset untuk Dikonsolidasikan**
1. 9. 9. 01. R / K SKPD
1. 9. 9. 01. 001 R / K SKPD (Rincian sesuai dengan SKPD)
1. 9. 9. 01. 002 Dst

- 1. 2. INVESTASI JANGKA PANJANG**
1. 2. 1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen
1. 2. 1. 01. Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
1. 2. 1. 01. 001 Pinjaman Kepada Perusahaan Negara
1. 2. 1. 01. 002 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah
1. 2. 1. 01. 003 Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1. 2. 1. 02. Investasi dalam Obligasi
1. 2. 1. 02. 001 Investasi dalam Obligasi
1. 2. 1. 03. Investasi dalam Proyek Pembangunan
1. 2. 1. 03. 001 Investasi dalam Proyek Pembangunan
1. 2. 1. 04. Dana Bergulir
1. 2. 1. 04. 001 Dana Bergulir
1. 2. 1. 05. Investasi Non Permanen Lainnya
1. 2. 1. 05. 001 Investasi Non Permanen Lainnya

- 1. 2. 2. Investasi Jangka Panjang Permanen**
1. 2. 2. 01. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
1. 2. 2. 01. 001 Penyertaan Modal pada Bank Jateng
1. 2. 2. 01. 002 Penyertaan Modal pada BPR BKK
1. 2. 2. 01. 003 Penyertaan Modal pada Bank Jepara Artha
1. 2. 2. 01. 004 Penyertaan Modal pada PDAM
1. 2. 2. 01. 005 Penyertaan Modal pada PT PRPP
1. 2. 2. 01. 006 Penyertaan Modal pada Perusda Aneka Usaha
1. 2. 2. 01. 007 Penyertaan Modal pada KMC Kartini
1. 2. 2. 02. Investasi Permanen Lainnya
1. 2. 2. 02. 001 Investasi Permanen Lainnya

- 1. 3. ASET TETAP**
1. 3. 1. Tanah
1. 3. 1. 01. Tanah Kantor
1. 3. 1. 01. 001 Tanah Kantor
1. 3. 1. 02. Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit
1. 3. 1. 02. 001 Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit
1. 3. 1. 03. Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas
1. 3. 1. 03. 001 Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas
1. 3. 1. 04. Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik
1. 3. 1. 04. 001 Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik
1. 3. 1. 05. Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak
1. 3. 1. 05. 001 Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak

- 1. 3. 1. 06. 001 Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar
- 1. 3. 1. 07. Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan**
- 1. 3. 1. 07. 001 Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan
- 1. 3. 1. 08. Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan**
- 1. 3. 1. 08. 001 Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan
- 1. 3. 1. 09. Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus**
- 1. 3. 1. 09. 001 Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus
- 1. 3. 1. 10. Tanah Sarana Pelatihan dan kursus**
- 1. 3. 1. 10. 001 Tanah Sarana Pelatihan dan kursus
- 1. 3. 1. 11. Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan**
- 1. 3. 1. 11. 001 Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan
- 1. 3. 1. 12. Tanah Sarana Sosial Panti Jompo**
- 1. 3. 1. 12. 001 Tanah Sarana Sosial Panti Jompo
- 1. 3. 1. 13. Tanah Sarana Umum Terminal**
- 1. 3. 1. 13. 001 Tanah Sarana Umum Terminal
- 1. 3. 1. 14. Tanah Sarana Umum Dermaga**
- 1. 3. 1. 14. 001 Tanah Sarana Umum Dermaga
- 1. 3. 1. 15. Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis**
- 1. 3. 1. 15. 001 Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis
- 1. 3. 1. 16. Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan**
- 1. 3. 1. 16. 001 Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan
- 1. 3. 1. 17. Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan**
- 1. 3. 1. 17. 001 Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan
- 1. 3. 1. 18. Tanah Sarana Umum Pasar**
- 1. 3. 1. 18. 001 Tanah Sarana Umum Pasar
- 1. 3. 1. 19. Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Sampah Akhir**
- 1. 3. 1. 19. 001 Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Sampah Akhir
- 1. 3. 1. 20. Tanah Sarana Umum Taman**
- 1. 3. 1. 20. 001 Tanah Sarana Umum Taman
- 1. 3. 1. 21. Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat**
- 1. 3. 1. 21. 001 Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat
- 1. 3. 1. 22. Tanah Sarana Umum Ibadah**
- 1. 3. 1. 22. 001 Tanah Sarana Umum Ibadah
- 1. 3. 1. 23. Tanah Sarana Stadion Olahraga**
- 1. 3. 1. 23. 001 Tanah Sarana Stadion Olahraga
- 1. 3. 1. 24. Tanah Perumahan**
- 1. 3. 1. 24. 001 Tanah Perumahan
- 1. 3. 1. 25. Tanah Pertanian**
- 1. 3. 1. 25. 001 Tanah Pertanian
- 1. 3. 1. 26. Tanah Perkebunan**
- 1. 3. 1. 26. 001 Tanah Perkebunan
- 1. 3. 1. 27. Tanah Perikanan**
- 1. 3. 1. 27. 001 Tanah Perikanan
- 1. 3. 1. 28. Tanah Peternakan**
- 1. 3. 1. 28. 001 Tanah Peternakan
- 1. 3. 1. 29. Tanah Perkampungan**
- 1. 3. 1. 29. 001 Tanah Perkampungan
- 1. 3. 1. 30. Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku**
- 1. 3. 1. 30. 001 Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku

1. 3. 2. Peralatan dan Mesin

1. 3. 2. 01. Alat-alat Berat

1. 3. 2. 01. 001 Alat-alat Berat

1. 3. 2. 02. Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

1. 3. 2. 02. 001 Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

1. 3. 2. 03. Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor

1. 3. 2. 03. 001 Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor

1. 3. 2. 04. Alat-alat Angkutan di Air Bermotor



- 1. 3. 2. 05. **Alat-alat Angkutan Air tidak Bermotor**
- 1. 3. 2. 05. 001 Alat-alat Angkutan Air tidak Bermotor
- 1. 3. 2. 06. **Alat-alat Angkutan Udara**
- 1. 3. 2. 06. 001 Alat-alat Angkutan Udara
- 1. 3. 2. 07. **Alat-alat Bengkel**
- 1. 3. 2. 07. 001 Alat-alat Bengkel
- 1. 3. 2. 08. **Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan**
- 1. 3. 2. 08. 001 Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
- 1. 3. 2. 09. **Peralatan Kantor**
- 1. 3. 2. 09. 001 Peralatan Kantor
- 1. 3. 2. 10. **Perlengkapan Kantor**
- 1. 3. 2. 10. 001 Perlengkapan Kantor
- 1. 3. 2. 11. **Komputer**
- 1. 3. 2. 11. 001 Komputer
- 1. 3. 2. 12. **Mebelair**
- 1. 3. 2. 12. 001 Mebelair
- 1. 3. 2. 13. **Peralatan Dapur**
- 1. 3. 2. 13. 001 Peralatan Dapur
- 1. 3. 2. 14. **Penghias Ruangan Rumah Tangga**
- 1. 3. 2. 14. 001 Penghias Ruangan Rumah Tangga
- 1. 3. 2. 15. **Alat-alat Studio**
- 1. 3. 2. 15. 001 Alat-alat Studio
- 1. 3. 2. 16. **Alat-alat Komunikasi**
- 1. 3. 2. 16. 001 Alat-alat Komunikasi
- 1. 3. 2. 17. **Alat-alat Ukur**
- 1. 3. 2. 17. 001 Alat-alat Ukur
- 1. 3. 2. 18. **Alat-alat Kedokteran**
- 1. 3. 2. 18. 001 Alat-alat Kedokteran
- 1. 3. 2. 19. **Alat-alat Laboratorium**
- 1. 3. 2. 19. 001 Alat-alat Laboratorium
- 1. 3. 2. 20. **Alat-alat Persenjataan/Keamanan**
- 1. 3. 2. 20. 001 Alat-alat Persenjataan/Keamanan

- 1. 3. 3. **Gedung dan Bangunan**
- 1. 3. 3. 01. **Gedung Kantor**
- 1. 3. 3. 01. 001 Gedung Kantor
- 1. 3. 3. 02. **Gedung Rumah Jabatan**
- 1. 3. 3. 02. 001 Gedung Rumah Jabatan
- 1. 3. 3. 03. **Gedung Rumah Dinas**
- 1. 3. 3. 03. 001 Gedung Rumah Dinas
- 1. 3. 3. 04. **Gedung Gudang**
- 1. 3. 3. 04. 001 Gedung Gudang
- 1. 3. 3. 05. **Bangunan Monumen**
- 1. 3. 3. 05. 001 Bangunan Monumen
- 1. 3. 3. 06. **Tugu Peringatan**
- 1. 3. 3. 06. 001 Tugu Peringatan

- 1. 3. 4. **Jalan, Irigasi, dan Jaringan**
- 1. 3. 4. 01. **Jalan**
- 1. 3. 4. 01. 001 Jalan
- 1. 3. 4. 02. **Jembatan**
- 1. 3. 4. 02. 001 Jembatan
- 1. 3. 4. 03. **Jaringan Air**
- 1. 3. 4. 03. 001 Jaringan Air
- 1. 3. 4. 04. **Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota**
- 1. 3. 4. 04. 001 Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
- 1. 3. 4. 05. **Instalasi Listrik dan Telepon**
- 1. 3. 4. 05. 001 Instalasi Listrik



- 1. 3. 5. Aset Tetap Lainnya**
- 1. 3. 5. 01. Buku dan Kepustakaan**
- 1. 3. 5. 01. 001 Buku
- 1. 3. 5. 01. 002 Terbitan Berkala
- 1. 3. 5. 01. 003 Barang Perpustakaan
- 1. 3. 5. 02. Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan**
- 1. 3. 5. 02. 001 Barang Bercorak Kebudayaan
- 1. 3. 5. 02. 002 Alat Olahraga Lainnya
- 1. 3. 5. 03. Hewan/Ternak dan Tanaman**
- 1. 3. 5. 03. 001 Hewan
- 1. 3. 5. 03. 002 Tanaman

- 1. 3. 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan**
- 1. 3. 6. 01. Konstruksi Dalam Pengerjaan**
- 1. 3. 6. 01. 001 Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1. 3. 7. Akumulasi Penyusutan**
- 1. 3. 7. 01. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin**
- 1. 3. 7. 01. 001 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Berat
- 1. 3. 7. 01. 002 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
- 1. 3. 7. 01. 003 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
- 1. 3. 7. 01. 004 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor
- 1. 3. 7. 01. 005 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Angkutan Air tidak Bermotor
- 1. 3. 7. 01. 006 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Angkutan Udara
- 1. 3. 7. 01. 007 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bengkel
- 1. 3. 7. 01. 008 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
- 1. 3. 7. 01. 009 Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor
- 1. 3. 7. 01. 010 Akumulasi Penyusutan Perlengkapan Kantor
- 1. 3. 7. 01. 011 Akumulasi Penyusutan Komputer
- 1. 3. 7. 01. 012 Akumulasi Penyusutan Mebelair
- 1. 3. 7. 01. 013 Akumulasi Penyusutan Peralatan Dapur
- 1. 3. 7. 01. 014 Akumulasi Penyusutan Penghias Ruang Rumah Tangga
- 1. 3. 7. 01. 015 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Studio
- 1. 3. 7. 01. 016 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Komunikasi
- 1. 3. 7. 01. 017 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Ukur
- 1. 3. 7. 01. 018 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Kedokteran
- 1. 3. 7. 01. 019 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Laboratorium
- 1. 3. 7. 01. 020 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Peralatan/Keamanan
- 1. 3. 7. 02. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan**
- 1. 3. 7. 02. 001 Akumulasi Penyusutan Gedung Kantor
- 1. 3. 7. 02. 002 Akumulasi Penyusutan Gedung Rumah Jabatan
- 1. 3. 7. 02. 003 Akumulasi Penyusutan Gedung Rumah Dinas
- 1. 3. 7. 02. 004 Akumulasi Penyusutan Gedung Gudang
- 1. 3. 7. 02. 005 Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen
- 1. 3. 7. 02. 006 Akumulasi Penyusutan Tugu Peringatan
- 1. 3. 7. 03. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan**
- 1. 3. 7. 03. 001 Akumulasi Penyusutan Jalan
- 1. 3. 7. 03. 002 Akumulasi Penyusutan Jembatan
- 1. 3. 7. 03. 003 Akumulasi Penyusutan Jaringan Air
- 1. 3. 7. 03. 004 Akumulasi Penyusutan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
- 1. 3. 7. 03. 005 Akumulasi Penyusutan Instalasi Listrik
- 1. 3. 7. 03. 006 Akumulasi Penyusutan Instalasi Telepon
- 1. 3. 7. 04. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya**
- 1. 3. 7. 04. 001 Akumulasi Penyusutan Buku dan Kepustakaan
- 1. 3. 7. 04. 002 Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan
- 1. 3. 7. 04. 003 Akumulasi Penyusutan Hewan/Ternak dan Tanaman
- 1. 3. 7. 05. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya**

- 1. 3. 7. 05. 002 Akumulasi Amortisasi Tuntutan Ganti Rugi
- 1. 3. 7. 05. 003 Akumulasi Amortisasi Kemitraan Pihak Ketiga
- 1. 3. 7. 05. 004 Akumulasi Amortisasi Bangun Kelola dan Serah
- 1. 3. 7. 05. 005 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya
- 1. 3. 7. 05. 006 Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain

1. 4. DANA CADANGAN

1. 4. 1. Dana Cadangan

1. 4. 1. 01. Dana Cadangan

- 1. 4. 1. 01. 001 Dana Cadangan

1. 5. ASET LAINNYA

1. 5. 1. Tagihan Jangka Panjang

1. 5. 1. 01. Tagihan Penjualan Angsuran

- 1. 5. 1. 01. 001 Tagihan Angsuran Rumah
- 1. 5. 1. 01. 002 Tagihan Angsuran Kendaraan
- 1. 5. 1. 01. 003 Tagihan Angsuran Lainnya
- 1. 5. 1. 02. Tuntutan Ganti Rugi**
- 1. 5. 1. 02. 001 Tuntutan Ganti Rugi kepada PNS non Bendahara
- 1. 5. 1. 02. 002 Tuntutan Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga

1. 5. 2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1. 5. 2. 01. Bangun Guna Serah

- 1. 5. 2. 01. 001 Bangun Guna Serah

1. 5. 2. 02. Bangun Serah Guna

- 1. 5. 2. 02. 001 Bangun Serah Guna

1. 5. 2. 03. Kerjasama Operasi

- 1. 5. 2. 03. 001 Kerjasama Operasi

1. 5. 2. 04. Kemitraan Lainnya

- 1. 5. 2. 04. 001 Kemitraan Lainnya

1. 5. 3. Aset Tidak Berwujud

1. 5. 3. 01. Aset Tidak Berwujud

- 1. 5. 3. 01. 001 Goodwill
- 1. 5. 3. 01. 002 Lisensi dan franchise
- 1. 5. 3. 01. 003 Hak Cipta
- 1. 5. 3. 01. 004 Paten
- 1. 5. 3. 01. 005 Aset Tidak Berwujud Lainnya

1. 5. 4. Aset Lain-lain

1. 5. 4. 01. Aset Lain-lain

- 1. 5. 4. 01. 001 Perangkat Lunak/Software

2. KEWAJIBAN

2. 1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2. 1. 1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

2. 1. 1. 01. Utang Taspen

- 2. 1. 1. 01. 001 Utang Taspen

2. 1. 1. 02. Utang Askes

- 2. 1. 1. 02. 001 Utang Askes

2. 1. 1. 03. Utang PPh Pusat

- 2. 1. 1. 03. 001 Utang PPh 21

- 2. 1. 1. 03. 002 Utang PPh 22

- 2. 1. 1. 03. 003 Utang PPh 23

- 2. 1. 1. 03. 004 Utang PPh 25

2. 1. 1. 04. Utang PPN Pusat

- 2. 1. 1. 04. 001 Utang PPN Pusat

2. 1. 1. 05. Utang Taperum

2. 1. 1. 06. Utang PFK Lainnya

2. 1. 2. Utang Bunga

2. 1. 2. 01. Utang Bunga

- 2. 1. 2. 01. 001 Utang Bunga kepada Pemerintah
- 2. 1. 2. 01. 002 Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- 2. 1. 2. 01. 003 Utang Bunga kepada BUMN/BUMD
- 2. 1. 2. 01. 004 Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank
- 2. 1. 2. 01. 005 Utang Bunga Obligasi
- 2. 1. 2. 01. 006 Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya
- 2. 1. 2. 01. 007 Utang Bunga Luar Negeri

2. 1. 3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

2. 1. 3. 01. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- 2. 1. 3. 01. 001 Bagian Lancar Utang dari Sektor Perbankan
- 2. 1. 3. 01. 002 Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
- 2. 1. 3. 01. 003 Bagian Lancar Utang Obligasi
- 2. 1. 3. 01. 004 Bagian Lancar Utang dari Pemerintah Pusat
- 2. 1. 3. 01. 005 Bagian Lancar Utang dari Pemerintah Daerah Lainnya
- 2. 1. 3. 01. 006 Premium (Diskonto) Obligasi

2. 1. 4. Pendapatan Diterima Dimuka

2. 1. 4. 01. Kelebihan Pembayaran kepada Pihak III

- 2. 1. 4. 01. 001 Kelebihan Pembayaran kepada Pihak III

2. 1. 4. 02. Uang Muka Penjualan

- 2. 1. 4. 02. 001 Uang Muka Penjualan

2. 1. 4. 03. Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah

- 2. 1. 4. 03. 001 Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah

2. 1. 4. 04. Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya

- 2. 1. 4. 04. 001 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya

2. 1. 5. Utang Beban

2. 1. 5. 01 Utang Beban Pegawai

- 2. 1. 5. 01 001 Utang Beban Gaji dan Tunjangan
- 2. 1. 5. 01 002 Utang Beban Tambahan Penghasilan
- 2. 1. 5. 01 003 Utang Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH
- 2. 1. 5. 01 004 Utang Beban Biaya Pemungutan Pajak Daerah
- 2. 1. 5. 01 005 Utang Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah
- 2. 1. 5. 01 006 Utang Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
- 2. 1. 5. 01 007 Utang Beban Honorarium PNS
- 2. 1. 5. 01 008 Utang Beban Honorarium Non PNS
- 2. 1. 5. 01 009 Utang Beban Uang Lembur
- 2. 1. 5. 01 010 Utang Beban Pegawai Dana BOS
- 2. 1. 5. 01 011 Utang Beban Pegawai BLUD (dari APBD)

2. 1. 5. 02 Utang Beban Barang dan Jasa

- 2. 1. 5. 02. 001 Utang Beban Persediaan
- 2. 1. 5. 02. 002 Utang Beban Jasa
- 2. 1. 5. 02. 003 Utang Beban Pemeliharaan
- 2. 1. 5. 02. 004 Utang Beban Perjalanan Dinas
- 2. 1. 5. 02. 005 Utang Beban Beasiswa Pendidikan PNS
- 2. 1. 5. 02. 006 Utang Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
- 2. 1. 5. 02. 007 Utang Beban Jamkesda

2. 1. 5. 03. Utang Beban Bunga

- 2. 1. 5. 03. 001 Utang Beban Bunga

2. 1. 5. 04. Utang Beban Subsidi

- 2. 1. 5. 04. 001 Utang Beban Subsidi

- 2. 1. 5. 05. 001 Utang Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat
- 2. 1. 5. 05. 002 Utang Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
- 2. 1. 5. 05. 003 Utang Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN
- 2. 1. 5. 05. 004 Utang Beban Hibah kepada Pemerintahan Desa
- 2. 1. 5. 05. 005 Utang Beban Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
- 2. 1. 5. 05. 006 Utang Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
- 2. 1. 5. 05. 007 Utang Beban Hibah Untuk Satuan Pendidikan Dasar
- 2. 1. 5. 06. Utang Beban Lain-lain**
- 2. 1. 5. 06. 001 Utang Beban Lain-lain
- 2. 1. 5. 07. Utang Beban Transfer**
- 2. 1. 5. 07. 001 Transfer Bagi Hasil Pendapatan
- 2. 1. 5. 07. 002 Transfer Bantuan Keuangan

- 2. 1. 6. Utang Jangka Pendek Lainnya**
- 2. 1. 6. 01. Utang Jangka Pendek Lainnya**
- 2. 1. 6. 01. 001 Utang Jangka Pendek Lainnya

2. 2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

- 2. 2. 1. Utang Dalam Negeri**
- 2. 2. 1. 01. Utang dari Sektor Perbankan**
- 2. 2. 1. 01. 001 Utang dari Sektor Perbankan
- 2. 2. 1. 02. Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank**
- 2. 2. 1. 02. 001 Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
- 2. 2. 1. 03. Utang Obligasi**
- 2. 2. 1. 03. 001 Utang Obligasi
- 2. 2. 1. 04. Utang dari Pemerintah Pusat**
- 2. 2. 1. 04. 001 Utang dari Pemerintah Pusat
- 2. 2. 1. 05. Utang dari Pemerintah Daerah lainnya**
- 2. 2. 1. 05. 001 Utang dari Pemerintah Daerah lainnya
- 2. 2. 1. 06. Premium (Diskonto) Obligasi**
- 2. 2. 1. 06. 001 Premium (Diskonto) Obligasi
- 2. 2. 3. Utang Luar Negeri**
- 2. 2. 3. 01 Utang Luar Negeri
- 2. 2. 3. 01 001 Utang Luar Negeri
- 2. 2. 4. Utang Jangka Panjang Lainnya**
- 2. 2. 4. 01 Utang Jangka Panjang Lainnya
- 2. 2. 4. 01 001 Utang Jangka Panjang Lainnya

3. EKUITAS

3. 1. EKUITAS

3. 1. 1. Ekuitas

3. 1. 1. 01. Ekuitas

- 3. 1. 1. 01. 001 Ekuitas

3. 1. 2. Ekuitas SAL

3. 1. 2. 01. Estimasi Pendapatan

- 3. 1. 2. 01. 001 Estimasi Pendapatan

3. 1. 2. 02. Estimasi Penerimaan Pembiayaan

- 3. 1. 2. 02. 001 Estimasi Penerimaan Pembiayaan

3. 1. 2. 03. Apropriasi Belanja

- 3. 1. 2. 03. 001 Apropriasi Belanja

3. 1. 2. 04. Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan

- 3. 1. 2. 04. 001 Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan

3. 1. 3. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan



4. PENDAPATAN-LRA**4. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA****4. 1. 1. Pendapatan Pajak Daerah-LRA****4. 1. 1. 1. Pendapatan Pajak Hotel - LRA**

4. 1. 1. 1. 001 Pendapatan Pajak Hotel Bintang Lima Berlian - LRA

4. 1. 1. 1. 002 Pendapatan Pajak Hotel Bintang Lima - LRA

4. 1. 1. 1. 003 Pendapatan Pajak Hotel Bintang Empat - LRA

4. 1. 1. 1. 004 Pendapatan Pajak Hotel Bintang Tiga - LRA

4. 1. 1. 1. 005 Pendapatan Pajak Hotel Bintang Dua - LRA

4. 1. 1. 1. 006 Pendapatan Pajak Hotel Bintang Satu - LRA

4. 1. 1. 1. 007 Pendapatan Pajak Hotel Melati Tiga - LRA

4. 1. 1. 1. 008 Pendapatan Pajak Hotel Melati Dua - LRA

4. 1. 1. 1. 009 Pendapatan Pajak Hotel Melati Satu - LRA

4. 1. 1. 1. 010 Pendapatan Pajak Motel - LRA

4. 1. 1. 1. 011 Pendapatan Pajak Cottage - LRA

4. 1. 1. 1. 012 Pendapatan Pajak Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/ Hostel/ Rumah Kos - LRA

4. 1. 1. 1. 013 Pendapatan Pajak Wisma Pariwisata - LRA

4. 1. 1. 1. 014 Pendapatan Pajak Pondok Pariwisata - LRA

4. 1. 1. 1. 015 Pendapatan Pajak Gubug Pariwisata - LRA

4. 1. 1. 2. Pendapatan Pajak Restoran - LRA

4. 1. 1. 2. 001 Pendapatan Pajak Restoran - LRA

4. 1. 1. 2. 002 Pendapatan Pajak Rumah Makan - LRA

4. 1. 1. 2. 003 Pendapatan Pajak Café - LRA

4. 1. 1. 2. 004 Pendapatan Pajak Kantin - LRA

4. 1. 1. 2. 005 Pendapatan Pajak Katering - LRA

4. 1. 1. 2. 006 Pendapatan Pajak Warung - LRA

4. 1. 1. 2. 007 Pendapatan Pajak Bar - LRA

4. 1. 1. 2. 008 Pendapatan Pajak Jasa Boga - LRA

4. 1. 1. 3. Pendapatan Pajak Hiburan - LRA

4. 1. 1. 3. 001 Pendapatan Pajak Tontonan Film - LRA

4. 1. 1. 3. 002 Pendapatan Pajak Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana - LRA

4. 1. 1. 3. 003 Pendapatan Pajak Kontes Kecantikan, Bina Raga dan sejenisnya - LRA

4. 1. 1. 3. 004 Pendapatan Pajak Pameran - LRA

4. 1. 1. 3. 005 Pendapatan Pajak Diskotik, Karaoke, Klap Malam dan sejenisnya - LRA

4. 1. 1. 3. 006 Pendapatan Pajak Sirkus, Akrobat dan Sulap - LRA

4. 1. 1. 3. 007 Pendapatan Pajak Permainan Bilyar, Golf dan Bowling - LRA

4. 1. 1. 3. 008 Pendapatan Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan - LRA

4. 1. 1. 3. 009 Pendapatan Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness center) - LRA

4. 1. 1. 3. 010 Pendapatan Pajak Pertandingan Olahraga - LRA

4. 1. 1. 4. Pendapatan Pajak Reklame - LRA

4. 1. 1. 4. 001 Pendapatan Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron dan sejenisnya - LRA

4. 1. 1. 4. 002 Pendapatan Pajak Reklame Kain - LRA

4. 1. 1. 4. 003 Pendapatan Pajak Reklame Melekat/ Stiker - LRA

4. 1. 1. 4. 004 Pendapatan Pajak Reklame Selebaran - LRA

4. 1. 1. 4. 005 Pendapatan Pajak Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan - LRA

4. 1. 1. 4. 006 Pendapatan Pajak Reklame Udara - LRA

4. 1. 1. 4. 007 Pendapatan Pajak Reklame Apung - LRA

4. 1. 1. 4. 008 Pendapatan Pajak Reklame Suara - LRA

4. 1. 1. 4. 009 Pendapatan Pajak Reklame Film/ Slide - LRA

4. 1. 1. 4. 010 Pendapatan Pajak Reklame Peragaan - LRA

4. 1. 1. 5. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan - LRA

4. 1. 1. 5. 001 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Jepara - LRA

4. 1. 1. 5. 002 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Bangsri - LRA

- 4. 1. 1. 6. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA**
- 4. 1. 1. 6. 001 Pendapatan Pajak Asbes - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 002 Pendapatan Pajak Batu Tulis - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 003 Pendapatan Pajak Batu Setengah Permata - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 004 Pendapatan Pajak Batu Kapur - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 005 Pendapatan Pajak Batu Apung - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 006 Pendapatan Pajak Batu Permata - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 007 Pendapatan Pajak Bentonit - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 008 Pendapatan Pajak Dolomit - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 009 Pendapatan Pajak Feldspar - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 010 Pendapatan Pajak Garam Batu (halite) - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 011 Pendapatan Pajak Grafit - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 012 Pendapatan Pajak Granit/Andesit - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 013 Pendapatan Pajak Gips - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 014 Pendapatan Pajak Kalsit - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 015 Pendapatan Pajak Kaolin - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 016 Pendapatan Pajak Leusit - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 017 Pendapatan Pajak Magnesit - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 018 Pendapatan Pajak Mika - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 019 Pendapatan Pajak Marmer - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 020 Pendapatan Pajak Nitrat - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 021 Pendapatan Pajak OpSIDien - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 022 Pendapatan Pajak Oker - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 023 Pendapatan Pajak Pasir dan Kerikil - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 024 Pendapatan Pajak Pasir Kuarsa - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 025 Pendapatan Pajak Perlit - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 026 Pendapatan Pajak Phospat - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 027 Pendapatan Pajak Talk - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 028 Pendapatan Pajak Tanah Serap (fullers earth) - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 029 Pendapatan Pajak Tanah Diatome - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 030 Pendapatan Pajak Tanah Liat - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 031 Pendapatan Pajak Tawas (alum) - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 032 Pendapatan Pajak Tras - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 033 Pendapatan Pajak Yarosif - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 034 Pendapatan Pajak Zeolit - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 035 Pendapatan Pajak Basal - LRA
 - 4. 1. 1. 6. 036 Pendapatan Pajak Trakkit - LRA
- 4. 1. 1. 7. Pendapatan Pajak Parkir - LRA**
- 4. 1. 1. 7. 001 Pendapatan Pajak Penyelenggaraan Tempat Parkir Di Luar Badan Jalan dan Penitipan Kendaraan Bermotor - LRA
- 4. 1. 1. 8. Pendapatan Pajak Air Tanah - LRA**
- 4. 1. 1. 8. 001 Pendapatan Pajak Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah - LRA
- 4. 1. 1. 9. Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet - LRA**
- 4. 1. 1. 9. 001 Pendapatan Pajak Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet - LRA
- 4. 1. 1. 10. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LRA**
- 4. 1. 1. 10. 001 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LRA
- 4. 1. 1. 11. Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA**
- 4. 1. 1. 11. 001 Pendapatan Pajak Bea Perolehan Pemindahan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA
 - 4. 1. 1. 11. 002 Pendapatan Pajak Bea Perolehan Pemindahan Hak Baru Atas Tanah dan Bangunan - LRA
- 4. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA**
- 4. 1. 2. 1. Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LRA**
- 4. 1. 2. 1. 001 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
 - 4. 1. 2. 1. 002 Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA
 - 4. 1. 2. 1. 003 Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil - LRA
 - 4. 1. 2. 1. 004 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA
 - 4. 1. 2. 1. 005 Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
 - 4. 1. 2. 1. 006 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - LRA

- 4. 1. 2. 1. 008 Pendapatan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
- 4. 1. 2. 1. 009 Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
- 4. 1. 2. 1. 010 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA
- 4. 1. 2. 1. 011 Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
- 4. 1. 2. 1. 012 Pendapatan Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA
- 4. 1. 2. 1. 013 Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA
- 4. 1. 2. 1. 014 Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
- 4. 1. 2. 2. **Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LRA**
- 4. 1. 2. 2. 001 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
- 4. 1. 2. 2. 002 Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LRA
- 4. 1. 2. 2. 003 Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan - LRA
- 4. 1. 2. 2. 004 Pendapatan Retribusi Terminal - LRA
- 4. 1. 2. 2. 005 Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA
- 4. 1. 2. 2. 006 Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA
- 4. 1. 2. 2. 007 Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
- 4. 1. 2. 2. 008 Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA
- 4. 1. 2. 2. 009 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA
- 4. 1. 2. 2. 010 Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LRA
- 4. 1. 2. 2. 011 Pendapatan Retribusi Penyeberangan di Air - LRA
- 4. 1. 2. 2. 012 Pendapatan Retribusi Pengelolaan Limbah Cair - LRA
- 4. 1. 2. 2. 013 Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
- 4. 1. 2. 3. **Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu - LRA**
- 4. 1. 2. 3. 001 Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan - LRA
- 4. 1. 2. 3. 002 Pendapatan Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
- 4. 1. 2. 3. 003 Pendapatan Retribusi Ijin Gangguan - LRA
- 4. 1. 2. 3. 004 Pendapatan Retribusi Ijin Trayek - LRA
- 4. 1. 2. 3. 005 Pendapatan Retribusi Ijin Usaha Perikanan - LRA
- 4. 1. 2. 3. 006 Pendapatan Retribusi Perpanjangan IMTA
(Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) - LRA
- 4. 1. 3. **Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA**
- 4. 1. 3. 1. **Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/
BUMD - LRA**
- 4. 1. 3. 1. 001 Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT Bank Jateng - LRA
- 4. 1. 3. 1. 002 Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah
Aneka Usaha - LRA
- 4. 1. 3. 1. 003 Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD BPR BKK Jepara - LRA
- 4. 1. 3. 1. 004 Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD BPR Jepara Artha - LRA
- 4. 1. 3. 1. 005 Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum
Jepara - LRA
- 4. 1. 3. 2. **Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/
BUMN - LRA**
- 4. 1. 3. 2. 001 Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/
BUMN - LRA
- 4. 1. 3. 3. **Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik
Swasta - LRA**
- 4. 1. 3. 3. 001 Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/
Milik Swasta - LRA
- 4. 1. 3. 4. **Pendapatan Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman - LRA**
- 4. 1. 3. 4. 001 Pendapatan Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman - LRA
- 4. 1. 4. **Lain-lain PAD yang Sah-LRA**
- 4. 1. 4. 1. **Pendapatan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan - LRA**
- 4. 1. 4. 1. 001 Pendapatan Pelepasan Hak Atas - LRA
- 4. 1. 4. 1. 002 Pendapatan Penjualan Perlatan/ Perlengkapan Kantor tidak Terpakai - LRA
- 4. 1. 4. 1. 003 Pendapatan Penjualan Mesin/ Alat-alat Berat tidak Terpakai - LRA
- 4. 1. 4. 1. 004 Pendapatan Penjualan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas - LRA
- 4. 1. 4. 1. 005 Pendapatan Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua - LRA

- 4. 1. 4. 1. 007 Pendapatan Penjualan Drum Bekas - LRA
- 4. 1. 4. 1. 008 Pendapatan Penjualan Hasil Penebangan Pohon - LRA
- 4. 1. 4. 1. 009 Pendapatan Penjualan Lampu Hias Bekas - LRA
- 4. 1. 4. 1. 010 Pendapatan Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan - LRA
- 4. 1. 4. 1. 011 Pendapatan Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas - LRA
- 4. 1. 4. 1. 012 Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi - LRA
- 4. 1. 4. 1. 013 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian - LRA
- 4. 1. 4. 1. 014 Pendapatan Penjualan Hasil Kehutanan - LRA
- 4. 1. 4. 1. 015 Pendapatan Penjualan Hasil Perkebunan - LRA
- 4. 1. 4. 1. 016 Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan - LRA
- 4. 1. 4. 1. 017 Pendapatan Penjualan Hasil Perikanan - LRA
- 4. 1. 4. 1. 018 Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan - LRA
- 4. 1. 4. 2. Pendapatan Jasa Giro - LRA**
- 4. 1. 4. 2. 001 Pendapatan Jasa Giro Kas Daerah - LRA
- 4. 1. 4. 2. 002 Pendapatan Jasa Giro Bendahara - LRA
- 4. 1. 4. 2. 003 Pendapatan Jasa Giro Dana Cadangan - LRA
- 4. 1. 4. 3. Pendapatan Bunga Deposito - LRA**
- 4. 1. 4. 3. 001 Pendapatan Bunga Deposito - LRA
- 4. 1. 4. 4. Pendapatan Dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA**
- 4. 1. 4. 4. 001 Pendapatan dari Kerugian Uang Daerah - LRA
- 4. 1. 4. 4. 002 Pendapatan dari Kerugian Barang Daerah - LRA
- 4. 1. 4. 5. Pendapatan Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA**
- 4. 1. 4. 5. 001 Pendapatan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LRA
- 4. 1. 4. 5. 002 Pendapatan Potongan - LRA
- 4. 1. 4. 5. 003 Pendapatan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA
- 4. 1. 4. 6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA**
- 4. 1. 4. 6. 001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LRA
- 4. 1. 4. 6. 002 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LRA
- 4. 1. 4. 6. 003 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LRA
- 4. 1. 4. 6. 004 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LRA
- 4. 1. 4. 6. 005 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang - LRA
- 4. 1. 4. 6. 006 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan - LRA
- 4. 1. 4. 6. 007 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan - LRA
- 4. 1. 4. 6. 008 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup - LRA
- 4. 1. 4. 6. 009 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan - LRA
- 4. 1. 4. 6. 010 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pariwisata - LRA
- 4. 1. 4. 7. Pendapatan Denda Pajak - LRA**
- 4. 1. 4. 7. 001 Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA
- 4. 1. 4. 7. 002 Pendapatan Denda Pajak Restoran - LRA
- 4. 1. 4. 7. 003 Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LRA
- 4. 1. 4. 7. 004 Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA
- 4. 1. 4. 7. 005 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LRA
- 4. 1. 4. 7. 006 Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C - LRA
- 4. 1. 4. 7. 007 Pendapatan Denda Pajak Parkir - LRA
- 4. 1. 4. 7. 008 Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah - LRA
- 4. 1. 4. 7. 009 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LRA
- 4. 1. 4. 7. 010 Pendapatan Denda Pajak Lingkungan - LRA
- 4. 1. 4. 7. 011 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
- 4. 1. 4. 7. 012 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LRA
- 4. 1. 4. 7. 013 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA
- 4. 1. 4. 8. Pendapatan Denda Retribusi - LRA**
- 4. 1. 4. 8. 001 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum - LRA

- 4. 1. 4. 8. 003 Pendapatan Denda Retribusi Administrasi Tertentu - LRA
- 4. 1. 4. 9. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA**
- 4. 1. 4. 9. 001 Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan - LRA
- 4. 1. 4. 9. 002 Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LRA
- 4. 1. 4. 9. 003 Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman - LRA
- 4. 1. 4. 10. Pendapatan dari Pengembalian - LRA**
- 4. 1. 4. 10. 001 Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LRA
- 4. 1. 4. 10. 002 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LRA
- 4. 1. 4. 10. 003 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LRA
- 4. 1. 4. 10. 004 Pendapatan dari Pengembalian kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LRA
- 4. 1. 4. 10. 005 Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka - LRA
- 4. 1. 4. 10. 006 Pendapatan dari Pengembalian Lainnya - LRA
- 4. 1. 4. 11. Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA**
- 4. 1. 4. 11. 001 Pendapatan dari Fasilitas Sosial - LRA
- 4. 1. 4. 11. 002 Pendapatan dari Fasilitas Umum - LRA
- 4. 1. 4. 12. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LRA**
- 4. 1. 4. 12. 001 Pendapatan dari Uang Pendaftaran/ Ujian Masuk - LRA
- 4. 1. 4. 12. 002 Pendapatan dari Uang Sekolah/ Pendidikan dan Pelatihan - LRA
- 4. 1. 4. 12. 003 - LRA Pendapatan dari Uang Ujian Kenaikan Tingkat/ Kelas
- 4. 1. 4. 13. Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan - LRA**
- 4. 1. 4. 13. 001 Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan Rumah - LRA
- 4. 1. 4. 13. 002 Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan Kendaraan - LRA
- 4. 1. 4. 13. 003 Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Kompensasi Kios, Kios Dalam Los dan Los / Meja - LRA
- 4. 1. 4. 14. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat - LRA**
- 4. 1. 4. 14. 001 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat - LRA
- 4. 1. 4. 15. Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan - LRA**
- 4. 1. 4. 15. 001 Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan - LRA
- 4. 1. 4. 15. 002 Pendapatan dari Pemanfaatan Kekayaan / Milik Daerah berupa Bangun Guna Serah - LRA
- 4. 1. 4. 16. Pendapatan BLUD - LRA**
- 4. 1. 4. 16. 001 Pendapatan BLUD RSUD RA Kartini - LRA
- 4. 1. 4. 17. Pendapatan dari Kompensasi - LRA**
- 4. 1. 4. 17. 001 Pendapatan dari Kompensasi - LRA
- 4. 1. 4. 18. Pendapatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional**
- 4. 1. 4. 18. 001 Pendapatan Jaminan Pelayanan Nasional Kapitasi -LRA
- 4. 1. 4. 19. 002 Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional Klaim-LRA

4. 2. PENDAPATAN TRANSFER-LRA

4. 2. 1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

4. 2. 1. 01. Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA

- 4. 2. 1. 01. 001 Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LRA
- 4. 2. 1. 01. 002 Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA
- 4. 2. 1. 01. 003 Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA
- 4. 2. 1. 01. 004 Pendapatan Bagi Hasil dari Cukai - LRA

4. 2. 1. 02. Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA

- 4. 2. 1. 02. 001 Pendapatan Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LRA
- 4. 2. 1. 02. 002 Pendapatan Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA
- 4. 2. 1. 02. 003 Pendapatan Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LRA
- 4. 2. 1. 02. 004 Pendapatan Bagi Hasil dari Iuran tetap (Land-rent) - LRA
- 4. 2. 1. 02. 005 Pendapatan Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA
- 4. 2. 1. 02. 006 Pendapatan Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LRA
- 4. 2. 1. 02. 007 Pendapatan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA
- 4. 2. 1. 02. 008 Pendapatan Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA
- 4. 2. 1. 02. 009 Pendapatan Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA
- 4. 2. 1. 02. 010 Pendapatan Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA
- 4. 2. 1. 02. 011 Pendapatan Bagi Hasil dari Hasil Hutan - LRA

- 4. 2. 1. 03. **Pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai - LRA**
- 4. 2. 1. 03. 001 Pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA
- 4. 2. 1. 04. **Pendapatan Dana Alokasi Umum - LRA**
- 4. 2. 2. 04. 001 Pendapatan Dana Alokasi Umum - LRA
- 4. 2. 1. 05. **Pendapatan Dana Alokasi Khusus - LRA**
- 4. 2. 1. 05. 001 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan - LRA
- 4. 2. 1. 05. 002 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan - LRA
- 4. 2. 1. 05. 003 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan - LRA
- 4. 2. 1. 05. 004 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA
- 4. 2. 1. 05. 005 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA
- 4. 2. 1. 05. 006 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi - LRA
- 4. 2. 1. 05. 007 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Prasarana Pemerintah Daerah - LRA
- 4. 2. 1. 05. 008 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA
- 4. 2. 1. 05. 009 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian - LRA
- 4. 2. 1. 05. 010 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup - LRA
- 4. 2. 1. 05. 011 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana - LRA
- 4. 2. 1. 05. 012 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan - LRA
- 4. 2. 1. 05. 013 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Prasarana Perdesaan - LRA
- 4. 2. 1. 05. 014 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan - LRA
- 4. 2. 1. 05. 015 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LRA
- 4. 2. 1. 05. 016 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan - LRA
- 4. 2. 1. 05. 017 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman - LRA
- 4. 2. 1. 05. 018 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Prasarana Perbatasan - LRA
- 4. 2. 1. 05. 019 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan - LRA

- 4. 2. 2. **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA**
- 4. 2. 2. 01. **Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA**
- 4. 2. 2. 01. 001 Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA
- 4. 2. 2. 02. **Pendapatan Dana Penyesuaian - LRA**
- 4. 2. 2. 02. 001 Pendapatan Dana BOS - LRA
- 4. 2. 2. 02. 002 Pendapatan Dana Penyesuaian Infrastruktur - LRA
- 4. 2. 2. 02. 003 Pendapatan Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan - LRA
- 4. 2. 2. 02. 004 Pendapatan Dana Penyesuaian Tambahan DAU untuk Guru PNSD - LRA
- 4. 2. 2. 03. **Pendapatan Dana Darurat - LRA**
- 4. 2. 2. 03. 001 Pendapatan Penanggulangan Korban/ Kerusakan Akibat Bencana Alam - LRA

- 4. 2. 3. **Pendapatan Transfer dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - LRA**
- 4. 2. 3. 01. **Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LRA**
- 4. 2. 3. 01. 001 Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA
- 4. 2. 3. 01. 002 Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air - LRA
- 4. 2. 3. 01. 003 Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA
- 4. 2. 3. 01. 004 Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air - LRA
- 4. 2. 3. 01. 005 Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
- 4. 2. 3. 01. 006 Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah - LRA
- 4. 2. 3. 01. 007 Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LRA
- 4. 2. 3. 01. 008 Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LRA
- 4. 2. 3. 01. 009 Pendapatan Bagi Hasil dari Pemberian Ijin Dispensasi Kelebihan Muatan - LRA
- 4. 2. 3. 01. 010 Pendapatan Bagi Hasil dari Tera dan Tera Ulang - LRA
- 4. 2. 3. 01. 011 Pendapatan Bagi Hasil dari Sumbangan Pihak III (Kayu) - LRA
- 4. 2. 3. 01. 012 Pendapatan Bagi Hasil dari Ijin Usaha Perikanan - LRA
- 4. 2. 3. 02. **Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten - LRA**
- 4. 2. 3. 02. 001 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten - LRA
- 4. 2. 3. 03. **Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota - LRA**
- 4. 2. 3. 03. 001 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota - LRA
- 4. 2. 3. 04. **Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA**
- 4. 2. 3. 04. 001 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA

- 4. 2. 4. **Pendapatan Bantuan Keuangan - LRA**

- 4. 2. 4. 01. 001 Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi - LRA
- 4. 2. 4. 02. **Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kabupaten - LRA**
- 4. 2. 4. 02. 001 Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kabupaten - LRA
- 4. 2. 4. 03. **Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kota - LRA**
- 4. 2. 4. 03. 001 Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kota - LRA

- 4. 3. **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA**
- 4. 3. 1. **Pendapatan Hibah - LRA**
- 4. 3. 1. 01. **Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LRA**
- 4. 3. 1. 01. 001 Pendapatan Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah - LRA
- 4. 3. 1. 01. 002 Pendapatan Bantuan Pemberdayaan Masyarakat - LRA
- 4. 3. 1. 02. **Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA**
- 4. 3. 1. 02. 001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
- 4. 3. 1. 03. **Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA**
- 4. 3. 1. 03. 001 Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LRA
- 4. 3. 1. 04. **Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LRA**
- 4. 3. 1. 04. 001 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LRA
- 4. 3. 1. 05. **Pendapatan Hibah dari Luar Negeri - LRA**
- 4. 3. 1. 05. 001 Pendapatan Hibah dari Bilateral - LRA
- 4. 3. 1. 05. 002 Pendapatan Hibah dari Multilateral - LRA
- 4. 3. 1. 05. 003 Pendapatan Hibah dari Donor Lainnya - LRA

- 4. 3. 2. **Pendapatan Lainnya - LRA**
- 4. 3. 2. 01. **Pendapatan Lainnya - LRA**
- 4. 3. 2. 01. 001 Pendapatan Lainnya - LRA

5. **BELANJA**

5. 1. **BELANJA OPERASI**

5. 1. 1. **Belanja Pegawai**

5. 1. 1. 01. **Belanja Gaji dan Tunjangan**

- 5. 1. 1. 01. 001 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
- 5. 1. 1. 01. 002 Belanja Tunjangan Keluarga
- 5. 1. 1. 01. 003 Belanja Tunjangan Jabatan
- 5. 1. 1. 01. 004 Belanja Tunjangan Fungsional
- 5. 1. 1. 01. 005 Belanja Tunjangan Fungsional Umum
- 5. 1. 1. 01. 006 Belanja Tunjangan Beras
- 5. 1. 1. 01. 007 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- 5. 1. 1. 01. 008 Belanja Pembulatan Gaji
- 5. 1. 1. 01. 009 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan
- 5. 1. 1. 01. 010 Belanja Uang Paket
- 5. 1. 1. 01. 011 Belanja Tunjangan Badan Musyawarah
- 5. 1. 1. 01. 012 Belanja Tunjangan Komisi
- 5. 1. 1. 01. 013 Belanja Tunjangan Badan Anggaran
- 5. 1. 1. 01. 014 Belanja Tunjangan Badan Kehormatan
- 5. 1. 1. 01. 015 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
- 5. 1. 1. 01. 016 Belanja Tunjangan Perumahan
- 5. 1. 1. 01. 017 Belanja Uang Duka Wafat/Tewas
- 5. 1. 1. 01. 018 Belanja Uang Jasa Pengabdian
- 5. 1. 1. 01. 019 Tunjangan Kesehatan DPRD

5. 1. 1. 02. **Belanja Tambahan Penghasilan PNS**

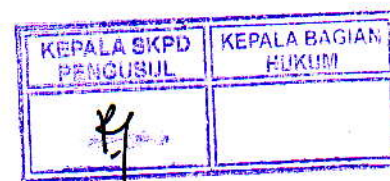
- 5. 1. 1. 02. 001 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
- 5. 1. 1. 02. 002 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
- 5. 1. 1. 02. 003 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
- 5. 1. 1. 02. 004 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
- 5. 1. 1. 02. 005 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
- 5. 1. 1. 02. 006 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
- 5. 1. 1. 03. **Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH**

- 5. 1. 1. 03. 002 Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH
- 5. 1. 1. 03. 003 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
- 5. 1. 1. 04. **Biaya Pemungutan Pajak Daerah**
- 5. 1. 1. 04. 001 Biaya Pemungutan PBB
- 5. 1. 1. 05. **Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah**
- 5. 1. 1. 05. 001 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah
- 5. 1. 1. 06. **Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**
- 5. 1. 1. 06. 001 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
- 5. 1. 1. 07. **Belanja Penghasilan Lainnya**
- 5. 1. 1. 07. 001 Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD
- 5. 1. 1. 07. 002 Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD
- 5. 1. 1. 07. 003 Belanja Tunjangan Pengamanan Persandian
- 5. 1. 1. 08. **Honorarium PNS**
- 5. 1. 1. 08. 001 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan
- 5. 1. 1. 08. 002 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan
- 5. 1. 1. 08. 003 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa
- 5. 1. 1. 08. 004 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur
- 5. 1. 1. 08. 005 Belanja Honorarium Tenaga Medis/ Paramedis
- 5. 1. 1. 09. **Honorarium Non PNS**
- 5. 1. 1. 09. 001 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS
- 5. 1. 1. 09. 002 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS
- 5. 1. 1. 09. 003 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS
- 5. 1. 1. 10. **Uang Lembur**
- 5. 1. 1. 10. 001 Belanja Uang Lembur PNS
- 5. 1. 1. 10. 002 Belanja Uang Lembur Non PNS
- 5. 1. 1. 11. **Belanja Pegawai Dana BOS**
- 5. 1. 1. 11. 001 Belanja Pegawai Dana BOS SD
- 5. 1. 1. 11. 002 Belanja Pegawai Dana BOS SMP
- 5. 1. 1. 12. **Belanja Pegawai BLUD (dari APBD)**
- 5. 1. 1. 12. 001 Belanja Pegawai BLUD RSUD RA. Kartini

- 5. 1. 2. **Belanja Barang dan Jasa**
- 5. 1. 2. 1. **Belanja Bahan Pakai Habis**
- 5. 1. 2. 1. 001 Belanja alat tulis kantor
- 5. 1. 2. 1. 002 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
- 5. 1. 2. 1. 003 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
- 5. 1. 2. 1. 004 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
- 5. 1. 2. 1. 005 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas
- 5. 1. 2. 1. 006 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
- 5. 1. 2. 1. 007 Belanja Habis pakai Komputer
- 5. 1. 2. 2. **Belanja Bahan / Material**
- 5. 1. 2. 2. 001 Belanja tanaman / Ternak / Ikan
- 5. 1. 2. 2. 002 Belanja bahan kimia, obat-obatan dan perlengkapan medis
- 5. 1. 2. 2. 003 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek
- 5. 1. 2. 2. 004 Belanja Bahan Pokok/Makanan dan Keperluan Dapur
- 5. 1. 2. 2. 005 Belanja Peralatan/Perlengkapan/Inventaris Kantor
- 5. 1. 2. 2. 006 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software
- 5. 1. 2. 3. **Belanja Jasa Kantor**
- 5. 1. 2. 3. 001 Belanja telepon
- 5. 1. 2. 3. 002 Belanja air
- 5. 1. 2. 3. 003 Belanja listrik
- 5. 1. 2. 3. 004 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
- 5. 1. 2. 3. 005 Belanja surat kabar/majalah
- 5. 1. 2. 3. 006 Belanja jasa internet (sewa hosting dan broadband)
- 5. 1. 2. 3. 007 Belanja paket/pengiriman
- 5. 1. 2. 3. 008 Belanja Jasa Transaksi Keuangan
- 5. 1. 2. 3. 009 Belanja Jasa Penerangan Jalan Umum
- 5. 1. 2. 3. 010 Belanja Dokumentasi dan Publikasi

- 5. 1. 2. 3. 012 Belanja Jasa KIR, STNK dan SIM
- 5. 1. 2. 4. **Belanja Premi Asuransi**
- 5. 1. 2. 4. 001 Belanja Premi Asuransi Kesehatan
- 5. 1. 2. 4. 002 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
- 5. 1. 2. 5. **Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**
- 5. 1. 2. 5. 001 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
- 5. 1. 2. 6. **Belanja Cetak dan Penggandaan**
- 5. 1. 2. 6. 001 Belanja cetak
- 5. 1. 2. 6. 002 Belanja Penggandaan/fotokopi
- 5. 1. 2. 7. **Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**
- 5. 1. 2. 7. 001 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
- 5. 1. 2. 8. **Belanja Sarana Mobilitas**
- 5. 1. 2. 8. 001 Belanja Sarana Mobilitas
- 5. 1. 2. 9. **Belanja Sewa Alat Berat**
- 5. 1. 2. 9. 001 Belanja Sewa Alat Berat
- 5. 1. 2. 10. **Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**
- 5. 1. 2. 10. 001 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
- 5. 1. 2. 11. **Belanja Makanan dan Minuman**
- 5. 1. 2. 11. 001 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
- 5. 1. 2. 11. 002 Belanja makanan dan minuman rapat
- 5. 1. 2. 11. 003 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi
- 5. 1. 2. 11. 004 Belanja Makanan dan minuman pasien
- 5. 1. 2. 12. **Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**
- 5. 1. 2. 12. 001 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
- 5. 1. 2. 13. **Belanja Pakaian Kerja**
- 5. 1. 2. 13. 001 Belanja Pakaian Kerja
- 5. 1. 2. 14. **Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu**
- 5. 1. 2. 14. 001 Belanja Pakaian Olah Raga
- 5. 1. 2. 14. 002 Belanja Pakaian Upacara
- 5. 1. 2. 14. 003 Belanja Pakaian Tradisional/Adat
- 5. 1. 2. 15. **Belanja Perjalanan Dinas**
- 5. 1. 2. 15. 001 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 5. 1. 2. 15. 002 Belanja perjalanan dinas luar daerah
- 5. 1. 2. 15. 003 Belanja perjalanan dinas luar negeri
- 5. 1. 2. 16. **Belanja Perjalanan Pindah Tugas**
- 5. 1. 2. 16. 001 Belanja Perjalanan Pindah Tugas
- 5. 1. 2. 16. 002 Belanja Pemulangan Pegawai
- 5. 1. 2. 17. **Belanja Pemeliharaan**
- 5. 1. 2. 17. 001 Belanja Pemeliharaan Tanah
- 5. 1. 2. 17. 002 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Besar (al: Buldoser, Traktor, Excavator)
- 5. 1. 2. 17. 003 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan
- 5. 1. 2. 17. 004 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur
- 5. 1. 2. 17. 005 Belanja Pemeliharaan Alat-alat pertanian
- 5. 1. 2. 17. 006 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga
- 5. 1. 2. 17. 007 Belanja Pemeliharaan Alat-alat studio dan komunikasi
- 5. 1. 2. 17. 008 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kedokteran
- 5. 1. 2. 17. 009 Belanja Pemeliharaan Alat-alat laboratorium
- 5. 1. 2. 17. 010 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Persenjataan/keamanan
- 5. 1. 2. 17. 011 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
- 5. 1. 2. 17. 012 Belanja Pemeliharaan Bangunan Monumen
- 5. 1. 2. 17. 013 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 5. 1. 2. 17. 014 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi
- 5. 1. 2. 17. 015 Belanja Pemeliharaan instalasi pengolahan (a.l. instalasi PLTD)
- 5. 1. 2. 17. 016 Belanja Pemeliharaan Jaringan (a.l. jaringan air minum, listrik/telpon/gas, limbah/air kotor dan multimedia)
- 5. 1. 2. 17. 017 Belanja Pemeliharaan buku, perpustakaan dan arsip
- 5. 1. 2. 17. 018 Belanja Pemeliharaan barang bercorak kebudayaan (a.l. Alat kesenian, maket dan foto dokumen, benda-benda bersejarah)

5. 1. 2. 17. 020 Belanja Pemeliharaan Perangkat Lunak / Software
- 5. 1. 2. 18. Belanja Jasa Konsultasi**
5. 1. 2. 18. 001 Belanja Jasa Konsultansi
- 5. 1. 2. 19. Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga**
5. 1. 2. 19. 001 Belanja Barang Modal Tanah Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
5. 1. 2. 19. 002 Belanja Barang Modal Peralatan dan Mesin Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
5. 1. 2. 19. 003 Belanja Barang Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
5. 1. 2. 19. 004 Belanja Barang Modal Gedung dan Bangunan Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
5. 1. 2. 19. 005 Belanja Barang Modal Aset Tetap Lainnya Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
5. 1. 2. 19. 006 Belanja Barang Modal Aset Lainnya Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
5. 1. 2. 19. 007 Belanja Barang Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
- 5. 1. 2. 20. Belanja Barang dan Jasa BLUD**
5. 1. 2. 20. 001 Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD RA. Kartini
- 5. 1. 2. 21. Belanja Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)**
5. 1. 2. 21. 001 Belanja Jamkesda RSUD Kartini
5. 1. 2. 21. 002 Belanja Jamkesda RSI
5. 1. 2. 21. 003 Belanja Jamkesda Puskesmas Keling I
5. 1. 2. 21. 004 Belanja Jamkesda Puskesmas Keling II
5. 1. 2. 21. 005 Belanja Jamkesda Puskesmas Bangsri I
5. 1. 2. 21. 006 Belanja Jamkesda Puskesmas Bangsri II
5. 1. 2. 21. 007 Belanja Jamkesda Puskesmas Kembang
5. 1. 2. 21. 008 Belanja Jamkesda Puskesmas Mlonggo
5. 1. 2. 21. 009 Belanja Jamkesda Puskesmas Pakis Aji
5. 1. 2. 21. 010 Belanja Jamkesda Puskesmas Jepara
5. 1. 2. 21. 011 Belanja Jamkesda Puskesmas Tahunan
5. 1. 2. 21. 012 Belanja Jamkesda Puskesmas Batealit
5. 1. 2. 21. 013 Belanja Jamkesda Puskesmas Kedung I
5. 1. 2. 21. 014 Belanja Jamkesda Puskesmas Kedung II
5. 1. 2. 21. 015 Belanja Jamkesda Puskesmas Pecangaan
5. 1. 2. 21. 016 Belanja Jamkesda Puskesmas Kalinyamatan
5. 1. 2. 21. 017 Belanja Jamkesda Puskesmas Welahan I
5. 1. 2. 21. 018 Belanja Jamkesda Puskesmas Welahan II
5. 1. 2. 21. 019 Belanja Jamkesda Puskesmas Mayong I
5. 1. 2. 21. 020 Belanja Jamkesda Puskesmas Mayong II
5. 1. 2. 21. 021 Belanja Jamkesda Puskesmas Nalumsari
5. 1. 2. 21. 022 Belanja Jamkesda Puskesmas Karimunjawa
5. 1. 2. 21. 023 Belanja Jamkesda Puskesmas Donorojo
5. 1. 2. 21. 024 Belanja Jamkesda RS Kariadi
5. 1. 2. 21. 025 Belanja Jamkesda RS Graha Husada
5. 1. 2. 21. 026 Belanja Jamkesda RS Kumala Siwi
5. 1. 2. 21. 027 Belanja Jamkesda PKU Muhammadiyah Mayong
5. 1. 2. 21. 028 Belanja Jamkesda RSJD dr. Amino Gondo Huto
5. 1. 2. 21. 029 Belanja Jamkesda RSOP Prof. Dr. Soeharso Surakarta
5. 1. 2. 21. dst
- 5. 1. 2. 22. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS**
5. 1. 2. 22. 001 Belanja Tugas Belajar D3
5. 1. 2. 22. 002 Belanja Tugas Belajar S1
5. 1. 2. 22. 003 Belanja Tugas Belajar S2
5. 1. 2. 22. 004 Belanja Tugas Belajar S3
- 5. 1. 2. 23. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**
5. 1. 2. 23. 001 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS



kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi

- 5. 1. 2. 24. 001 Belanja Pembayaran Honorarium kepada Non Pegawai
- 5. 1. 2. 24. 002 Belanja Pemberian Hadiah
- 5. 1. 2. 25. Belanja Tamu Pemerintah Daerah**
- 5. 1. 2. 25. 001 Belanja Penginapan Tamu Pemerintah Daerah
- 5. 1. 2. 25. 002 Belanja Makan dan Minum Tamu Pemerintah Daerah
- 5. 1. 2. 26. Belanja Jasa Layanan Kesehatan**
- 5. 1. 2. 26. 001 Belanja Jasa Layanan Kesehatan Kapitasi
- 5. 1. 2. 26. 002 Belanja Jasa Layanan Kesehatan Klaim

- 5. 1. 3. Belanja Bunga**
- 5. 1. 3. 01. Belanja Bunga Utang Pinjaman**
- 5. 1. 3. 01. 001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
- 5. 1. 3. 01. 002 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- 5. 1. 3. 01. 003 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
- 5. 1. 3. 01. 004 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
- 5. 1. 3. 02. Belanja Bunga Utang Obligasi**
- 5. 1. 3. 02. 005 Belanja Bunga Utang Obligasi

- 5. 1. 4. Belanja Subsidi**
- 5. 1. 4. 01. Belanja Subsidi Energi**
- 5. 1. 4. 01. 001 Belanja Subsidi Energi
- 5. 1. 4. 02. Belanja Subsidi Non BBM**
- 5. 1. 4. 02. 001 Belanja Subsidi Listrik
- 5. 1. 4. 02. 002 Belanja Subsidi Pangan
- 5. 1. 4. 02. 003 Belanja Subsidi Pupuk
- 5. 1. 4. 02. 004 Belanja Subsidi Benih
- 5. 1. 4. 02. 005 Belanja Subsidi Kredit Program
- 5. 1. 4. 02. 006 Belanja Subsidi / Bantuan Dalam Rangka Penugasan (Public Services Obligation)
- 5. 1. 4. 03. Belanja Subsidi Tarif**
- 5. 1. 4. 03. 001 Belanja Subsidi Tarif

- 5. 1. 5. Belanja Hibah**
- 5. 1. 5. 01. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**
- 5. 1. 5. 01. 001 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
- 5. 1. 5. 01. 002 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat di Daerah (Instansi Vertikal)
- 5. 1. 5. 02. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya**
- 5. 1. 5. 02. 001 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah
- 5. 1. 5. 03. Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN**
- 5. 1. 5. 03. 001 Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/ BUMD/ BUMN
- 5. 1. 5. 04. Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa**
- 5. 1. 5. 04. 001 Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa
- 5. 1. 5. 05. Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat**
- 5. 1. 5. 05. 001 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
- 5. 1. 5. 06. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi**
- 5. 1. 5. 06. 001 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
- 5. 1. 5. 07. Belanja Hibah Untuk Satuan Pendidikan Dasar**
- 5. 1. 5. 07. 001 Belanja Hibah Untuk Satuan Pendidikan Dasar

- 5. 1. 6. Belanja Bantuan Sosial**
- 5. 1. 6. 01. Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan**
- 5. 1. 6. 01. 001 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
- 5. 1. 6. 02. Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat**
- 5. 1. 6. 02. 001 Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat

- 5. 2. BELANJA MODAL**
- 5. 2. 1. Belanja Modal Tanah**
- 5. 2. 1. 01. BM Tanah Kantor**



- 5. 2. 1. 02. **BM Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit**
- 5. 2. 1. 02. 001 BM Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit
- 5. 2. 1. 03. **BM Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas**
- 5. 2. 1. 03. 001 BM Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas
- 5. 2. 1. 04. **BM Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik**
- 5. 2. 1. 04. 001 BM Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik
- 5. 2. 1. 05. **BM Tanah Sarana Kesehatan Taman Kanak-Kanak**
- 5. 2. 1. 05. 001 BM Tanah Sarana Kesehatan Taman Kanak-Kanak
- 5. 2. 1. 06. **BM Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar**
- 5. 2. 1. 06. 001 BM Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar
- 5. 2. 1. 07. **BM Tanah Sarana Pendidikan Umum dan Kejuruan**
- 5. 2. 1. 07. 001 BM Tanah Sarana Pendidikan Umum dan Kejuruan
- 5. 2. 1. 08. **BM Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan**
- 5. 2. 1. 08. 001 BM Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan
- 5. 2. 1. 09. **BM Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus**
- 5. 2. 1. 09. 001 BM Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus
- 5. 2. 1. 10. **BM Tanah Sarana Pelatihan dan Kursus**
- 5. 2. 1. 10. 001 BM Tanah Sarana Pelatihan dan Kursus
- 5. 2. 1. 11. **BM Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan**
- 5. 2. 1. 11. 001 BM Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan
- 5. 2. 1. 12. **BM Tanah Sarana Sosial Panti Jompo**
- 5. 2. 1. 12. 001 BM Tanah Sarana Sosial Panti Jompo
- 5. 2. 1. 13. **BM Tanah Sarana Umum Terminal**
- 5. 2. 1. 13. 001 BM Tanah Sarana Umum Terminal
- 5. 2. 1. 14. **BM Tanah Sarana Umum Dermaga**
- 5. 2. 1. 14. 001 BM Tanah Sarana Umum Dermaga
- 5. 2. 1. 15. **BM Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis**
- 5. 2. 1. 15. 001 BM Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis
- 5. 2. 1. 16. **BM Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan**
- 5. 2. 1. 16. 001 BM Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan
- 5. 2. 1. 17. **BM Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan**
- 5. 2. 1. 17. 001 BM Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan
- 5. 2. 1. 18. **BM Tanah Sarana Umum Pasar**
- 5. 2. 1. 18. 001 BM Tanah Sarana Umum Pasar
- 5. 2. 1. 19. **BM Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah**
- 5. 2. 1. 19. 001 BM Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah
- 5. 2. 1. 20. **BM Tanah Sarana Umum Taman**
- 5. 2. 1. 20. 001 BM Tanah Sarana Umum Taman
- 5. 2. 1. 21. **BM Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat**
- 5. 2. 1. 21. 001 BM Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat
- 5. 2. 1. 22. **BM Tanah Sarana Umum Ibadah**
- 5. 2. 1. 22. 001 BM Tanah Sarana Umum Ibadah
- 5. 2. 1. 23. **BM Tanah Sarana Stadion Olahraga**
- 5. 2. 1. 23. 001 BM Tanah Sarana Stadion Olahraga
- 5. 2. 1. 24. **BM Tanah Perumahan**
- 5. 2. 1. 24. 001 BM Tanah Perumahan
- 5. 2. 1. 25. **BM Tanah Pertanian**
- 5. 2. 1. 25. 001 BM Tanah Pertanian
- 5. 2. 1. 26. **BM Tanah Perikanan**
- 5. 2. 1. 26. 001 BM Tanah Perikanan
- 5. 2. 1. 27. **BM Tanah Peternakan**
- 5. 2. 1. 27. 001 BM Tanah Peternakan
- 5. 2. 1. 28. **BM Tanah Perkampungan**
- 5. 2. 1. 28. 001 BM Tanah Perkampungan
- 5. 2. 1. 29. **BM Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku**
- 5. 2. 1. 29. 001 BM Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku
- 5. 2. 1. 30. **BM Tanah BLUD**
- 5. 2. 1. 30. 001 BM Tanah BLUD



- 5. 2. 2. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**
- 5. 2. 2. 01. **Belanja Modal Alat Berat**
- 5. 2. 2. 01. 001 Belanja Modal Alat Berat
- 5. 2. 2. 02. **Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor**
- 5. 2. 2. 02. 001 Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
- 5. 2. 2. 03. **Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat tidak Bermotor**
- 5. 2. 2. 03. 001 Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat tidak Bermotor
- 5. 2. 2. 04. **Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air Bermotor**
- 5. 2. 2. 04. 001 Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air Bermotor
- 5. 2. 2. 05. **Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air tidak Bermotor**
- 5. 2. 2. 05. 001 Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air tidak Bermotor
- 5. 2. 2. 06. **Belanja Modal Alat-alat Angkutan Udara**
- 5. 2. 2. 06. 001 Belanja Modal Alat-alat Angkutan Udara
- 5. 2. 2. 07. **Belanja Modal Alat-alat Bengkel**
- 5. 2. 2. 07. 001 Belanja Modal Alat-alat Bengkel
- 5. 2. 2. 08. **Belanja Modal Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan**
- 5. 2. 2. 08. 001 Belanja Modal Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
- 5. 2. 2. 09. **Belanja Modal Peralatan Kantor**
- 5. 2. 2. 09. 001 Belanja Modal Peralatan Kantor
- 5. 2. 2. 10. **Belanja Modal Perlengkapan Kantor**
- 5. 2. 2. 10. 001 Belanja Modal Perlengkapan Kantor
- 5. 2. 2. 11. **Belanja Modal Komputer**
- 5. 2. 2. 11. 001 Belanja Modal Komputer
- 5. 2. 2. 12. **Belanja Modal Meubelair**
- 5. 2. 2. 12. 001 Belanja Modal Meubelair
- 5. 2. 2. 13. **Belanja Modal Peralatan Dapur**
- 5. 2. 2. 13. 001 Belanja Modal Peralatan Dapur
- 5. 2. 2. 14. **Belanja Modal Penghias Ruangan Rumah Tangga**
- 5. 2. 2. 14. 001 Belanja Modal Penghias Ruangan Rumah Tangga
- 5. 2. 2. 15. **Belanja Modal Alat-alat Studio**
- 5. 2. 2. 15. 001 Belanja Modal Alat-alat Studio
- 5. 2. 2. 16. **Belanja Modal Alat-alat Komunikasi**
- 5. 2. 2. 16. 001 Belanja Modal Alat-alat Komunikasi
- 5. 2. 2. 17. **Belanja Modal Alat-alat Kedokteran**
- 5. 2. 2. 17. 001 Belanja Modal Alat-alat Kedokteran
- 5. 2. 2. 18. **Belanja Modal Alat-alat Laboratorium**
- 5. 2. 2. 18. 001 Belanja Modal Alat-alat Laboratorium
- 5. 2. 2. 19. **Belanja Modal Alat-alat Persenjataan/Keamanan**
- 5. 2. 2. 19. 001 Belanja Modal Alat-alat Persenjataan/Keamanan
- 5. 2. 2. 20. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**
- 5. 2. 2. 20. 001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

5. 2. 3. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

- 5. 2. 3. 01. **Gedung Kantor**
- 5. 2. 3. 01. 001 Gedung Kantor
- 5. 2. 3. 02. **Gedung Rumah Jabatan**
- 5. 2. 3. 02. 001 Gedung Rumah Jabatan
- 5. 2. 3. 03. **Gedung Rumah Dinas**
- 5. 2. 3. 03. 001 Gedung Rumah Dinas
- 5. 2. 3. 04. **Gedung Gudang**
- 5. 2. 3. 04. 001 Gedung Gudang
- 5. 2. 3. 05. **Bangunan Monumen**
- 5. 2. 3. 05. 001 Bangunan Monumen
- 5. 2. 3. 06. **Tugu Peringatan**
- 5. 2. 3. 06. 001 Tugu Peringatan
- 5. 2. 3. 07. **Gedung dan Bangunan BLUD**
- 5. 2. 3. 07. 001 Gedung dan Bangunan BLUD



- 5. 2. 4. 01 001 **Belanja Modal Jalan**
- 5. 2. 4. 02 **Belanja Modal Jembatan**
- 5. 2. 4. 02 001 Belanja Modal Jembatan
- 5. 2. 4. 03 **Belanja Modal Jaringan Air**
- 5. 2. 4. 03 001 Belanja Modal Jaringan Air
- 5. 2. 4. 04 **Belanja Modal Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota**
- 5. 2. 4. 04 001 Belanja Modal Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
- 5. 2. 4. 05 **Belanja Modal Instalasi Listrik dan Telepon**
- 5. 2. 4. 05 001 Belanja Modal Instalasi Listrik dan Telepon
- 5. 2. 4. 06 **Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLUD**
- 5. 2. 4. 06 001 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLUD

- 5. 2. 5. **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**
- 5. 2. 5. 01 **Buku dan Kepustakaan**
- 5. 2. 5. 01 001 Buku dan Kepustakaan
- 5. 2. 5. 02 **Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan**
- 5. 2. 5. 02 001 Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan
- 5. 2. 5. 03 **Hewan/Ternak dan Tanaman**
- 5. 2. 5. 03 001 Hewan/Ternak dan Tanaman
- 5. 2. 5. 04 **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**
- 5. 2. 5. 04 001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD

- 5. 2. 6. **Belanja Modal Aset Lainnya**
- 5. 2. 6. 01 **Belanja Modal Aset Lain-lain**
- 5. 2. 6. 01 001 Belanja Modal Perangkat Lunak/Software

5. 3. **BELANJA TIDAK TERDUGA**

- 5. 3. 1. **Belanja Tidak Terduga**
- 5. 3. 1. 01 **Belanja Tidak Terduga**
- 5. 3. 1. 01 001 Belanja Tidak Terduga

6. **TRANSFER**

6. 1. **TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN**

- 6. 1. 1. **Transfer Bagi Hasil Pajak**
- 6. 1. 1. 01. **Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada pemerintah Provinsi/Pusat**
- 6. 1. 1. 01. 001 Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada pemerintah Provinsi/Pusat
- 6. 1. 1. 02. **Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Kabupaten/Kota Lain**
- 6. 1. 1. 02. 001 Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Kabupaten/Kota Lain
- 6. 1. 1. 03. **Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa**
- 6. 1. 1. 03. 001 Bagi Hasil kepada Desa Bangsri
- 6. 1. 1. 03. 002 Bagi Hasil kepada Desa Banjar Agung
- 6. 1. 1. 03. 003 Bagi Hasil kepada Desa Banjaran
- 6. 1. 1. 03. 004 Bagi Hasil kepada Desa Bondo
- 6. 1. 1. 03. 005 Bagi Hasil kepada Desa Guyangan
- 6. 1. 1. 03. 006 Bagi Hasil kepada Desa Jeruk Wangi
- 6. 1. 1. 03. 007 Bagi Hasil kepada Desa KedungLeper
- 6. 1. 1. 03. 008 Bagi Hasil kepada Desa Kepuk
- 6. 1. 1. 03. 009 Bagi Hasil kepada Desa Papasan
- 6. 1. 1. 03. 010 Bagi Hasil kepada Desa Srikandang
- 6. 1. 1. 03. 011 Bagi Hasil kepada Desa Tengguili
- 6. 1. 1. 03. 012 Bagi Hasil kepada Desa Wedelan
- 6. 1. 1. 03. 013 Bagi Hasil kepada Desa Bantrung
- 6. 1. 1. 03. 014 Bagi Hasil kepada Desa Batealit
- 6. 1. 1. 03. 015 Bagi Hasil kepada Desa Bawu
- 6. 1. 1. 03. 016 Bagi Hasil kepada Desa Bringin
- 6. 1. 1. 03. 017 Bagi Hasil kepada Desa Geneng



6. 1. 1. 03. 019 Bagi Hasil kepada Desa Mindahan Kidul
6. 1. 1. 03. 020 Bagi Hasil kepada Desa Ngasem
6. 1. 1. 03. 021 Bagi Hasil kepada Desa Pekalongan
6. 1. 1. 03. 022 Bagi Hasil kepada Desa Raguklampitan
6. 1. 1. 03. 023 Bagi Hasil kepada Desa Somosari
6. 1. 1. 03. 024 Bagi Hasil kepada Desa Bandungharjo
6. 1. 1. 03. 025 Bagi Hasil kepada Desa Banyumanis
6. 1. 1. 03. 026 Bagi Hasil kepada Desa Blingoh
6. 1. 1. 03. 027 Bagi Hasil kepada Desa Clering
6. 1. 1. 03. 028 Bagi Hasil kepada Desa Jugo
6. 1. 1. 03. 029 Bagi Hasil kepada Desa Sumberrejo
6. 1. 1. 03. 030 Bagi Hasil kepada Desa Tulakan
6. 1. 1. 03. 031 Bagi Hasil kepada Desa Ujungwatu
6. 1. 1. 03. 032 Bagi Hasil kepada Desa Bandengan
6. 1. 1. 03. 033 Bagi Hasil kepada Desa KedungCino
6. 1. 1. 03. 034 Bagi Hasil kepada Desa Kuwasen
6. 1. 1. 03. 035 Bagi Hasil kepada Desa Mulyoharjo
6. 1. 1. 03. 036 Bagi Hasil kepada Desa Wonorejo
6. 1. 1. 03. 037 Bagi Hasil kepada Desa Bakalan
6. 1. 1. 03. 038 Bagi Hasil kepada Desa BandungRejo
6. 1. 1. 03. 039 Bagi Hasil kepada Desa Banyuputih
6. 1. 1. 03. 040 Bagi Hasil kepada Desa BatuKali
6. 1. 1. 03. 041 Bagi Hasil kepada Desa Damarjati
6. 1. 1. 03. 042 Bagi Hasil kepada Desa Kriyan
6. 1. 1. 03. 043 Bagi Hasil kepada Desa Manyargading
6. 1. 1. 03. 044 Bagi Hasil kepada Desa Margoyoso
6. 1. 1. 03. 045 Bagi Hasil kepada Desa Pendosawalan
6. 1. 1. 03. 046 Bagi Hasil kepada Desa Purwogondo
6. 1. 1. 03. 047 Bagi Hasil kepada Desa Robayan
6. 1. 1. 03. 048 Bagi Hasil kepada Desa Sendang
6. 1. 1. 03. 049 Bagi Hasil kepada Desa KarimunJawa
6. 1. 1. 03. 050 Bagi Hasil kepada Desa Kemujan
6. 1. 1. 03. 051 Bagi Hasil kepada Desa Nyamuk
6. 1. 1. 03. 052 Bagi Hasil kepada Desa Parang
6. 1. 1. 03. 053 Bagi Hasil kepada Desa Bugel
6. 1. 1. 03. 054 Bagi Hasil kepada Desa Bulak Baru
6. 1. 1. 03. 055 Bagi Hasil kepada Desa Dongos
6. 1. 1. 03. 056 Bagi Hasil kepada Desa Jondang
6. 1. 1. 03. 057 Bagi Hasil kepada Desa Kalianyar
6. 1. 1. 03. 058 Bagi Hasil kepada Desa Karangaji
6. 1. 1. 03. 059 Bagi Hasil kepada Desa Kedung Malang
6. 1. 1. 03. 060 Bagi Hasil kepada Desa Kerso
6. 1. 1. 03. 061 Bagi Hasil kepada Desa Menganti
6. 1. 1. 03. 062 Bagi Hasil kepada Desa Panggung
6. 1. 1. 03. 063 Bagi Hasil kepada Desa Rau
6. 1. 1. 03. 064 Bagi Hasil kepada Desa Sowon Kidul
6. 1. 1. 03. 065 Bagi Hasil kepada Desa Sowon Lor
6. 1. 1. 03. 066 Bagi Hasil kepada Desa Sukosono
6. 1. 1. 03. 067 Bagi Hasil kepada Desa Surodadi
6. 1. 1. 03. 068 Bagi Hasil kepada Desa Tanggultlare
6. 1. 1. 03. 069 Bagi Hasil kepada Desa Tedunan
6. 1. 1. 03. 070 Bagi Hasil kepada Desa Wanusobo
6. 1. 1. 03. 071 Bagi Hasil kepada Desa Bumiharjo
6. 1. 1. 03. 072 Bagi Hasil kepada Desa Damarwulan
6. 1. 1. 03. 073 Bagi Hasil kepada Desa Gelang
6. 1. 1. 03. 074 Bagi Hasil kepada Desa Jlegong
6. 1. 1. 03. 075 Bagi Hasil kepada Desa Kaligarang
6. 1. 1. 03. 076 Bagi Hasil kepada Desa Kelet



6. 1. 1. 03. 078 Bagi Hasil kepada Desa Klepu
6. 1. 1. 03. 079 Bagi Hasil kepada Desa Kunir
6. 1. 1. 03. 080 Bagi Hasil kepada Desa Tempur
6. 1. 1. 03. 081 Bagi Hasil kepada Desa Tunahan
6. 1. 1. 03. 082 Bagi Hasil kepada Desa Watuaji
6. 1. 1. 03. 083 Bagi Hasil kepada Desa Balong
6. 1. 1. 03. 084 Bagi Hasil kepada Desa Bucu
6. 1. 1. 03. 085 Bagi Hasil kepada Desa Cepogo
6. 1. 1. 03. 086 Bagi Hasil kepada Desa Dermolo
6. 1. 1. 03. 087 Bagi Hasil kepada Desa Dudakawu
6. 1. 1. 03. 088 Bagi Hasil kepada Desa Jinggotan
6. 1. 1. 03. 089 Bagi Hasil kepada Desa Kaliaman
6. 1. 1. 03. 090 Bagi Hasil kepada Desa Kancilan
6. 1. 1. 03. 091 Bagi Hasil kepada Desa Pendem
6. 1. 1. 03. 092 Bagi Hasil kepada Desa Sumanding
6. 1. 1. 03. 093 Bagi Hasil kepada Desa Tubanan
6. 1. 1. 03. 094 Bagi Hasil kepada Desa Bandung
6. 1. 1. 03. 095 Bagi Hasil kepada Desa Buaran
6. 1. 1. 03. 096 Bagi Hasil kepada Desa Bungu
6. 1. 1. 03. 097 Bagi Hasil kepada Desa Datar
6. 1. 1. 03. 098 Bagi Hasil kepada Desa Jebol
6. 1. 1. 03. 099 Bagi Hasil kepada Desa Kuanyar
6. 1. 1. 03. 100 Bagi Hasil kepada Desa Mayong Kidul
6. 1. 1. 03. 101 Bagi Hasil kepada Desa Mayong Lor
6. 1. 1. 03. 102 Bagi Hasil kepada Desa Ngroto
6. 1. 1. 03. 103 Bagi Hasil kepada Desa Pancur
6. 1. 1. 03. 104 Bagi Hasil kepada Desa Paren
6. 1. 1. 03. 105 Bagi Hasil kepada Desa Pelang
6. 1. 1. 03. 106 Bagi Hasil kepada Desa Pelemkerep
6. 1. 1. 03. 107 Bagi Hasil kepada Desa Pule
6. 1. 1. 03. 108 Bagi Hasil kepada Desa Rajekwesi
6. 1. 1. 03. 109 Bagi Hasil kepada Desa Sengon Bugel
6. 1. 1. 03. 110 Bagi Hasil kepada Desa Singorojo
6. 1. 1. 03. 111 Bagi Hasil kepada Desa Tigajuru
6. 1. 1. 03. 112 Bagi Hasil kepada Desa Jambu
6. 1. 1. 03. 113 Bagi Hasil kepada Desa Jambu Timur
6. 1. 1. 03. 114 Bagi Hasil kepada Desa Karanggondang
6. 1. 1. 03. 115 Bagi Hasil kepada Desa Mororejo
6. 1. 1. 03. 116 Bagi Hasil kepada Desa Sekuro
6. 1. 1. 03. 117 Bagi Hasil kepada Desa Sinanggul
6. 1. 1. 03. 118 Bagi Hasil kepada Desa Srobyong
6. 1. 1. 03. 119 Bagi Hasil kepada Desa Suwawal
6. 1. 1. 03. 120 Bagi Hasil kepada Desa Bategede
6. 1. 1. 03. 121 Bagi Hasil kepada Desa BendanPete
6. 1. 1. 03. 122 Bagi Hasil kepada Desa Blimbingrejo
6. 1. 1. 03. 123 Bagi Hasil kepada Desa Daren
6. 1. 1. 03. 124 Bagi Hasil kepada Desa Dorang
6. 1. 1. 03. 125 Bagi Hasil kepada Desa Gemiring Kidul
6. 1. 1. 03. 126 Bagi Hasil kepada Desa Gemiring Lor
6. 1. 1. 03. 127 Bagi Hasil kepada Desa Jatisari
6. 1. 1. 03. 128 Bagi Hasil kepada Desa Karangnongko
6. 1. 1. 03. 129 Bagi Hasil kepada Desa Muryolobo
6. 1. 1. 03. 130 Bagi Hasil kepada Desa Nalumsari
6. 1. 1. 03. 131 Bagi Hasil kepada Desa Ngetuk
6. 1. 1. 03. 132 Bagi Hasil kepada Desa Pringtulis
6. 1. 1. 03. 133 Bagi Hasil kepada Desa Tritis
6. 1. 1. 03. 134 Bagi Hasil kepada Desa Tunggul Pandean
6. 1. 1. 03. 135 Bagi Hasil kepada Desa Bulungan



- 6. 1. 1. 03. 137 Bagi Hasil kepada Desa Lebak
- 6. 1. 1. 03. 138 Bagi Hasil kepada Desa Mambak
- 6. 1. 1. 03. 139 Bagi Hasil kepada Desa Plajan
- 6. 1. 1. 03. 140 Bagi Hasil kepada Desa Slagi
- 6. 1. 1. 03. 141 Bagi Hasil kepada Desa Suwawal Timur
- 6. 1. 1. 03. 142 Bagi Hasil kepada Desa Tanjung
- 6. 1. 1. 03. 143 Bagi Hasil kepada Desa Gemulung
- 6. 1. 1. 03. 144 Bagi Hasil kepada Desa Gerdu
- 6. 1. 1. 03. 145 Bagi Hasil kepada Desa Kaliombo
- 6. 1. 1. 03. 146 Bagi Hasil kepada Desa KarangRandu
- 6. 1. 1. 03. 147 Bagi Hasil kepada Desa Krasak
- 6. 1. 1. 03. 148 Bagi Hasil kepada Desa Lebuawu
- 6. 1. 1. 03. 149 Bagi Hasil kepada Desa Ngeling
- 6. 1. 1. 03. 150 Bagi Hasil kepada Desa Pecangaan Kulon
- 6. 1. 1. 03. 151 Bagi Hasil kepada Desa Pecangaan Wetan
- 6. 1. 1. 03. 152 Bagi Hasil kepada Desa Pulodarat
- 6. 1. 1. 03. 153 Bagi Hasil kepada Desa Rengging
- 6. 1. 1. 03. 154 Bagi Hasil kepada Desa Troso
- 6. 1. 1. 03. 155 Bagi Hasil kepada Desa Demangan
- 6. 1. 1. 03. 156 Bagi Hasil kepada Desa Kecapi
- 6. 1. 1. 03. 157 Bagi Hasil kepada Desa Krapyak
- 6. 1. 1. 03. 158 Bagi Hasil kepada Desa Langon
- 6. 1. 1. 03. 159 Bagi Hasil kepada Desa Mangunan
- 6. 1. 1. 03. 160 Bagi Hasil kepada Desa Mantingan
- 6. 1. 1. 03. 161 Bagi Hasil kepada Desa Ngabul
- 6. 1. 1. 03. 162 Bagi Hasil kepada Desa Peteyekan
- 6. 1. 1. 03. 163 Bagi Hasil kepada Desa Platar
- 6. 1. 1. 03. 164 Bagi Hasil kepada Desa Semat
- 6. 1. 1. 03. 165 Bagi Hasil kepada Desa Senenan
- 6. 1. 1. 03. 166 Bagi Hasil kepada Desa Sukodono
- 6. 1. 1. 03. 167 Bagi Hasil kepada Desa Tahunan
- 6. 1. 1. 03. 168 Bagi Hasil kepada Desa TegalSambi
- 6. 1. 1. 03. 169 Bagi Hasil kepada Desa TelukAwur
- 6. 1. 1. 03. 170 Bagi Hasil kepada Desa Brantak Sekarjati
- 6. 1. 1. 03. 171 Bagi Hasil kepada Desa Bugo
- 6. 1. 1. 03. 172 Bagi Hasil kepada Desa Gedangan
- 6. 1. 1. 03. 173 Bagi Hasil kepada Desa Gidangelo
- 6. 1. 1. 03. 174 Bagi Hasil kepada Desa Guwo Sobokerto
- 6. 1. 1. 03. 175 Bagi Hasil kepada Desa Kalipucang Kulon
- 6. 1. 1. 03. 176 Bagi Hasil kepada Desa Kalipucang Wetan
- 6. 1. 1. 03. 177 Bagi Hasil kepada Desa Karanganyar
- 6. 1. 1. 03. 178 Bagi Hasil kepada Desa Kedung Sarimulyo
- 6. 1. 1. 03. 179 Bagi Hasil kepada Desa Kendeng Sidialit
- 6. 1. 1. 03. 180 Bagi Hasil kepada Desa Ketileng Singolelo
- 6. 1. 1. 03. 181 Bagi Hasil kepada Desa Sidigede
- 6. 1. 1. 03. 182 Bagi Hasil kepada Desa Teluk Wetan
- 6. 1. 1. 03. 183 Bagi Hasil kepada Desa Ujung Pandan
- 6. 1. 1. 03. 184 Bagi Hasil kepada Desa Welahan
- 6. 1. 1. 03. 185 Bagi Hasil kepada TPI

6. 1. 2. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

- 6. 1. 2. 01. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota / Desa**
- 6. 1. 2. 01. 001 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota / Desa

6. 2. TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

6. 2. 1. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

6. 2. 1. 01. Bantuan Keuangan Kepada Provinsi

- 6. 2. 1. 01. 001 Bantuan Keuangan Kepada Provinsi



6. 2. 1. 02. 001 Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Lain

6. 2. 2. Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa

6. 2. 2. 01. Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa

- 6. 2. 2. 01. 001 Bantuan keuangan kepada Desa Bangsri
- 6. 2. 2. 01. 002 Bantuan keuangan kepada Desa Banjar Agung
- 6. 2. 2. 01. 003 Bantuan keuangan kepada Desa Banjaran
- 6. 2. 2. 01. 004 Bantuan keuangan kepada Desa Bondo
- 6. 2. 2. 01. 005 Bantuan keuangan kepada Desa Guyangan
- 6. 2. 2. 01. 006 Bantuan keuangan kepada Desa Jerukwangi
- 6. 2. 2. 01. 007 Bantuan keuangan kepada Desa Kedungleper
- 6. 2. 2. 01. 008 Bantuan keuangan kepada Desa Kepuk
- 6. 2. 2. 01. 009 Bantuan keuangan kepada Desa Papasan
- 6. 2. 2. 01. 010 Bantuan keuangan kepada Desa Srikandang
- 6. 2. 2. 01. 011 Bantuan keuangan kepada Desa Tengguli
- 6. 2. 2. 01. 012 Bantuan keuangan kepada Desa Wedelan
- 6. 2. 2. 01. 013 Bantuan keuangan kepada Desa Bantrung
- 6. 2. 2. 01. 014 Bantuan keuangan kepada Desa Batealit
- 6. 2. 2. 01. 015 Bantuan keuangan kepada Desa Bawu
- 6. 2. 2. 01. 016 Bantuan keuangan kepada Desa Bringin
- 6. 2. 2. 01. 017 Bantuan keuangan kepada Desa Geneng
- 6. 2. 2. 01. 018 Bantuan keuangan kepada Desa Mindahan
- 6. 2. 2. 01. 019 Bantuan keuangan kepada Desa Mindahan Kidul
- 6. 2. 2. 01. 020 Bantuan keuangan kepada Desa Ngasem
- 6. 2. 2. 01. 021 Bantuan keuangan kepada Desa Pekalongan
- 6. 2. 2. 01. 022 Bantuan keuangan kepada Desa Raguklampitan
- 6. 2. 2. 01. 023 Bantuan keuangan kepada Desa Somosari
- 6. 2. 2. 01. 024 Bantuan keuangan kepada Desa Bandungharjo
- 6. 2. 2. 01. 025 Bantuan keuangan kepada Desa Banyumanis
- 6. 2. 2. 01. 026 Bantuan keuangan kepada Desa Blingoh
- 6. 2. 2. 01. 027 Bantuan keuangan kepada Desa Clering
- 6. 2. 2. 01. 028 Bantuan keuangan kepada Desa Jugo
- 6. 2. 2. 01. 029 Bantuan keuangan kepada Desa Sumberrejo
- 6. 2. 2. 01. 030 Bantuan keuangan kepada Desa Tulakan
- 6. 2. 2. 01. 031 Bantuan keuangan kepada Desa Ujungwatu
- 6. 2. 2. 01. 032 Bantuan keuangan kepada Desa Bandengan
- 6. 2. 2. 01. 033 Bantuan keuangan kepada Desa KedungCino
- 6. 2. 2. 01. 034 Bantuan keuangan kepada Desa Kuwasen
- 6. 2. 2. 01. 035 Bantuan keuangan kepada Desa Mulyoharjo
- 6. 2. 2. 01. 036 Bantuan keuangan kepada Desa Wonorejo
- 6. 2. 2. 01. 037 Bantuan keuangan kepada Desa Bakalan
- 6. 2. 2. 01. 038 Bantuan keuangan kepada Desa Bandungrejo
- 6. 2. 2. 01. 039 Bantuan keuangan kepada Desa Banyuputih
- 6. 2. 2. 01. 040 Bantuan keuangan kepada Desa Batukali
- 6. 2. 2. 01. 041 Bantuan keuangan kepada Desa Damarjati
- 6. 2. 2. 01. 042 Bantuan keuangan kepada Desa Kriyan
- 6. 2. 2. 01. 043 Bantuan keuangan kepada Desa Manyargading
- 6. 2. 2. 01. 044 Bantuan keuangan kepada Desa Margoyoso
- 6. 2. 2. 01. 045 Bantuan keuangan kepada Desa Pendosawalan
- 6. 2. 2. 01. 046 Bantuan keuangan kepada Desa Purwogondo
- 6. 2. 2. 01. 047 Bantuan keuangan kepada Desa Robayan
- 6. 2. 2. 01. 048 Bantuan keuangan kepada Desa Sendang
- 6. 2. 2. 01. 049 Bantuan keuangan kepada Desa KarimunJawa
- 6. 2. 2. 01. 050 Bantuan keuangan kepada Desa Kemujan
- 6. 2. 2. 01. 051 Bantuan keuangan kepada Desa Nyamuk
- 6. 2. 2. 01. 052 Bantuan keuangan kepada Desa Parang
- 6. 2. 2. 01. 053 Bantuan keuangan kepada Desa Bugel
- 6. 2. 2. 01. 054 Bantuan keuangan kepada Desa Bulak Baru



- 6. 2. 2. 01. 056 Bantuan keuangan kepada Desa Jondang
- 6. 2. 2. 01. 057 Bantuan keuangan kepada Desa Kalianyar
- 6. 2. 2. 01. 058 Bantuan keuangan kepada Desa Karangaji
- 6. 2. 2. 01. 059 Bantuan keuangan kepada Desa Kedungmalang
- 6. 2. 2. 01. 060 Bantuan keuangan kepada Desa Kerso
- 6. 2. 2. 01. 061 Bantuan keuangan kepada Desa Menganti
- 6. 2. 2. 01. 062 Bantuan keuangan kepada Desa Panggung
- 6. 2. 2. 01. 063 Bantuan keuangan kepada Desa Rau
- 6. 2. 2. 01. 064 Bantuan keuangan kepada Desa Sowan Kidul
- 6. 2. 2. 01. 065 Bantuan keuangan kepada Desa Sowan Lor
- 6. 2. 2. 01. 066 Bantuan keuangan kepada Desa Sukosono
- 6. 2. 2. 01. 067 Bantuan keuangan kepada Desa Surodadi
- 6. 2. 2. 01. 068 Bantuan keuangan kepada Desa Tanggultlare
- 6. 2. 2. 01. 069 Bantuan keuangan kepada Desa Tedunan
- 6. 2. 2. 01. 070 Bantuan keuangan kepada Desa Wanusobo
- 6. 2. 2. 01. 071 Bantuan keuangan kepada Desa Bumiharjo
- 6. 2. 2. 01. 072 Bantuan keuangan kepada Desa Damarwulan
- 6. 2. 2. 01. 073 Bantuan keuangan kepada Desa Gelang
- 6. 2. 2. 01. 074 Bantuan keuangan kepada Desa Jlegong
- 6. 2. 2. 01. 075 Bantuan keuangan kepada Desa Kaligarang
- 6. 2. 2. 01. 076 Bantuan keuangan kepada Desa Kelet
- 6. 2. 2. 01. 077 Bantuan keuangan kepada Desa Keling
- 6. 2. 2. 01. 078 Bantuan keuangan kepada Desa Klepu
- 6. 2. 2. 01. 079 Bantuan keuangan kepada Desa Kunir
- 6. 2. 2. 01. 080 Bantuan keuangan kepada Desa Tempur
- 6. 2. 2. 01. 081 Bantuan keuangan kepada Desa Tunahan
- 6. 2. 2. 01. 082 Bantuan keuangan kepada Desa Watuaji
- 6. 2. 2. 01. 083 Bantuan keuangan kepada Desa Balong
- 6. 2. 2. 01. 084 Bantuan keuangan kepada Desa Bucu
- 6. 2. 2. 01. 085 Bantuan keuangan kepada Desa Cepogo
- 6. 2. 2. 01. 086 Bantuan keuangan kepada Desa Dermolo
- 6. 2. 2. 01. 087 Bantuan keuangan kepada Desa Dudakawu
- 6. 2. 2. 01. 088 Bantuan keuangan kepada Desa Jinggotan
- 6. 2. 2. 01. 089 Bantuan keuangan kepada Desa Kaliaman
- 6. 2. 2. 01. 090 Bantuan keuangan kepada Desa Kancilan
- 6. 2. 2. 01. 091 Bantuan keuangan kepada Desa Pendem
- 6. 2. 2. 01. 092 Bantuan keuangan kepada Desa Sumanding
- 6. 2. 2. 01. 093 Bantuan keuangan kepada Desa Tubanan
- 6. 2. 2. 01. 094 Bantuan keuangan kepada Desa Bandung
- 6. 2. 2. 01. 095 Bantuan keuangan kepada Desa Buaran
- 6. 2. 2. 01. 096 Bantuan keuangan kepada Desa Bungu
- 6. 2. 2. 01. 097 Bantuan keuangan kepada Desa Datar
- 6. 2. 2. 01. 098 Bantuan keuangan kepada Desa Jebol
- 6. 2. 2. 01. 099 Bantuan keuangan kepada Desa Kuanyar
- 6. 2. 2. 01. 100 Bantuan keuangan kepada Desa Mayong Kidul
- 6. 2. 2. 01. 101 Bantuan keuangan kepada Desa Mayong Lor
- 6. 2. 2. 01. 102 Bantuan keuangan kepada Desa Ngroto
- 6. 2. 2. 01. 103 Bantuan keuangan kepada Desa Pancur
- 6. 2. 2. 01. 104 Bantuan keuangan kepada Desa Paren
- 6. 2. 2. 01. 105 Bantuan keuangan kepada Desa Pelang
- 6. 2. 2. 01. 106 Bantuan keuangan kepada Desa Pelemkerep
- 6. 2. 2. 01. 107 Bantuan keuangan kepada Desa Pule
- 6. 2. 2. 01. 108 Bantuan keuangan kepada Desa Rajekwesi
- 6. 2. 2. 01. 109 Bantuan keuangan kepada Desa Sengonbugel
- 6. 2. 2. 01. 110 Bantuan keuangan kepada Desa Singorojo
- 6. 2. 2. 01. 111 Bantuan keuangan kepada Desa Tigajuru
- 6. 2. 2. 01. 112 Bantuan keuangan kepada Desa Jambu
- 6. 2. 2. 01. 113 Bantuan keuangan kepada Desa Jambu Timur



6. 2. 2. 01. 115 Bantuan keuangan kepada Desa Mororejo
6. 2. 2. 01. 116 Bantuan keuangan kepada Desa Sekuro
6. 2. 2. 01. 117 Bantuan keuangan kepada Desa Sinanggul
6. 2. 2. 01. 118 Bantuan keuangan kepada Desa Srobyong
6. 2. 2. 01. 119 Bantuan keuangan kepada Desa Suwawal
6. 2. 2. 01. 120 Bantuan keuangan kepada Desa Bategede
6. 2. 2. 01. 121 Bantuan keuangan kepada Desa BendanPete
6. 2. 2. 01. 122 Bantuan keuangan kepada Desa Blimbingrejo
6. 2. 2. 01. 123 Bantuan keuangan kepada Desa Daren
6. 2. 2. 01. 124 Bantuan keuangan kepada Desa Dorang
6. 2. 2. 01. 125 Bantuan keuangan kepada Desa Gemiring Kidul
6. 2. 2. 01. 126 Bantuan keuangan kepada Desa Gemiring Lor
6. 2. 2. 01. 127 Bantuan keuangan kepada Desa Jatisari
6. 2. 2. 01. 128 Bantuan keuangan kepada Desa Karangnongko
6. 2. 2. 01. 129 Bantuan keuangan kepada Desa Muryolobo
6. 2. 2. 01. 130 Bantuan keuangan kepada Desa Nalumsari
6. 2. 2. 01. 131 Bantuan keuangan kepada Desa Ngetuk
6. 2. 2. 01. 132 Bantuan keuangan kepada Desa Pringtulis
6. 2. 2. 01. 133 Bantuan keuangan kepada Desa Tritis
6. 2. 2. 01. 134 Bantuan keuangan kepada Desa Tunggulpandean
6. 2. 2. 01. 135 Bantuan keuangan kepada Desa Bulungan
6. 2. 2. 01. 136 Bantuan keuangan kepada Desa Kawak
6. 2. 2. 01. 137 Bantuan keuangan kepada Desa Lebak
6. 2. 2. 01. 138 Bantuan keuangan kepada Desa Mambak
6. 2. 2. 01. 139 Bantuan keuangan kepada Desa Plajan
6. 2. 2. 01. 140 Bantuan keuangan kepada Desa Slagi
6. 2. 2. 01. 141 Bantuan keuangan kepada Desa Suwawal Timur
6. 2. 2. 01. 142 Bantuan keuangan kepada Desa Tanjung
6. 2. 2. 01. 143 Bantuan keuangan kepada Desa Gemulung
6. 2. 2. 01. 144 Bantuan keuangan kepada Desa Gerdu
6. 2. 2. 01. 145 Bantuan keuangan kepada Desa Kaliombo
6. 2. 2. 01. 146 Bantuan keuangan kepada Desa Karangrandu
6. 2. 2. 01. 147 Bantuan keuangan kepada Desa Krasak
6. 2. 2. 01. 148 Bantuan keuangan kepada Desa Lebuawu
6. 2. 2. 01. 149 Bantuan keuangan kepada Desa Ngeling
6. 2. 2. 01. 150 Bantuan keuangan kepada Desa Pecangaan Kulon
6. 2. 2. 01. 151 Bantuan keuangan kepada Desa Pecangaan Wetan
6. 2. 2. 01. 152 Bantuan keuangan kepada Desa Pulodarat
6. 2. 2. 01. 153 Bantuan keuangan kepada Desa Rengging
6. 2. 2. 01. 154 Bantuan keuangan kepada Desa Troso
6. 2. 2. 01. 155 Bantuan keuangan kepada Desa Demangan
6. 2. 2. 01. 156 Bantuan keuangan kepada Desa Kecapi
6. 2. 2. 01. 157 Bantuan keuangan kepada Desa Krapyak
6. 2. 2. 01. 158 Bantuan keuangan kepada Desa Langon
6. 2. 2. 01. 159 Bantuan keuangan kepada Desa Mangunan
6. 2. 2. 01. 160 Bantuan keuangan kepada Desa Mantingan
6. 2. 2. 01. 161 Bantuan keuangan kepada Desa Ngabul
6. 2. 2. 01. 162 Bantuan keuangan kepada Desa Petekeyan
6. 2. 2. 01. 163 Bantuan keuangan kepada Desa Platar
6. 2. 2. 01. 164 Bantuan keuangan kepada Desa Semat
6. 2. 2. 01. 165 Bantuan keuangan kepada Desa Senenan
6. 2. 2. 01. 166 Bantuan keuangan kepada Desa Sukodono
6. 2. 2. 01. 167 Bantuan keuangan kepada Desa Tahunan
6. 2. 2. 01. 168 Bantuan keuangan kepada Desa Tegalsambi
6. 2. 2. 01. 169 Bantuan keuangan kepada Desa TelukAwur
6. 2. 2. 01. 170 Bantuan keuangan kepada Desa Brantaksekarjati
6. 2. 2. 01. 171 Bantuan keuangan kepada Desa Bugo
6. 2. 2. 01. 172 Bantuan keuangan kepada Desa Gedangan



- 6. 2. 2. 01. 174 Bantuan keuangan kepada Desa Guwosobokerto
- 6. 2. 2. 01. 175 Bantuan keuangan kepada Desa Kalipucangkulon
- 6. 2. 2. 01. 176 Bantuan keuangan kepada Desa Kalipucangwetan
- 6. 2. 2. 01. 177 Bantuan keuangan kepada Desa Karanganyar
- 6. 2. 2. 01. 178 Bantuan keuangan kepada Desa Kedungsarimulyo
- 6. 2. 2. 01. 179 Bantuan keuangan kepada Desa Kendengsidialit
- 6. 2. 2. 01. 180 Bantuan keuangan kepada Desa Ketilengsingolelo
- 6. 2. 2. 01. 181 Bantuan keuangan kepada Desa Sidigede
- 6. 2. 2. 01. 182 Bantuan keuangan kepada Desa Teluk Wetan
- 6. 2. 2. 01. 183 Bantuan keuangan kepada Desa Ujungpandan
- 6. 2. 2. 01. 184 Bantuan keuangan kepada Desa Welahan

6. 2. 3. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

6. 2. 3. 01. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

- 6. 2. 3. 01. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Rincian sesuai jumlah Partai dan Kursi di DPRD)

7. PEMBIAYAAN

7. 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

7. 1. 1. Penggunaan SiLPA

7. 1. 1. 01. Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya

- 7. 1. 1. 01. 001 Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya

7. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan

7. 1. 2. 01. Pencairan Dana Cadangan

- 7. 1. 2. 01. 001 Pencairan Dana Cadangan

7. 1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

7. 1. 3. 01. Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD

- 7. 1. 3. 01. 001 Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD

7. 1. 3. 02. Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak Ketiga

- 7. 1. 3. 02. 001 Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga

7. 1. 4. Pinjaman Dalam Negeri

7. 1. 4. 01. Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah

- 7. 1. 4. 01. 001 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah

7. 1. 4. 02. Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain

- 7. 1. 4. 02. 001 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah daerah lain

7. 1. 4. 03. Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank

- 7. 1. 4. 03. 001 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank

7. 1. 4. 04. Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank

- 7. 1. 4. 04. 001 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga keuangan bukan bank

7. 1. 4. 05. Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah

- 7. 1. 4. 05. 001 Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah

7. 1. 5. Penerimaan Kembali Piutang

7. 1. 5. 01. Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara

- 7. 1. 5. 01. 001 Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara

7. 1. 5. 02. Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah

- 7. 1. 5. 02. 001 Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah

7. 1. 5. 03. Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya

- 7. 1. 5. 03. 001 Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya

7. 1. 6. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

7. 1. 6. 01. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

- 7. 1. 6. 01. 001 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir



- 7. 2. **PENGELUARAN PEMBIAYAAN**
- 7. 2. 1. **Pembentukan Dana Cadangan**
- 7. 2. 1. 01. **Pembentukan Dana Cadangan**
- 7. 2. 1. 01. 001 Pembentukan Dana Cadangan

- 7. 2. 2. **Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah**
- 7. 2. 2. 01. **Penyertaan Modal pada BUMN**
- 7. 2. 2. 01. 001 Penyertaan Modal pada BUMN
- 7. 2. 2. 02. **Penyertaan Modal pada BUMD**
- 7. 2. 2. 02. 001 Penyertaan Modal pada BUMD
- 7. 2. 2. 03. **Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta**
- 7. 2. 2. 03. 001 Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta

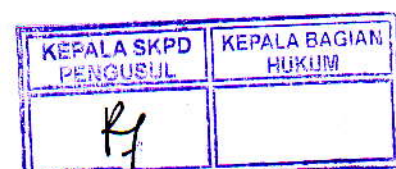
- 7. 2. 3. **Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri**
- 7. 2. 3. 01. **Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat**
- 7. 2. 3. 01. 001 Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
- 7. 2. 3. 02. **Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain**
- 7. 2. 3. 02. 001 Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari Pemerintah daerah lain
- 7. 2. 3. 03. **Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank**
- 7. 2. 3. 03. 001 Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank
- 7. 2. 3. 04. **Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank**
- 7. 2. 3. 04. 001 Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari Lembaga keuangan bukan bank
- 7. 2. 3. 05. **Pelunasan/pembelian kembali Obligasi Daerah**
- 7. 2. 3. 05. 001 Pelunasan/pembelian kembali Obligasi Daerah

- 7. 2. 4. **Pemberian Pinjaman Daerah**
- 7. 2. 4. 01. **Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara**
- 7. 2. 4. 01. 001 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara
- 7. 2. 4. 02. **Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah**
- 7. 2. 4. 02. 001 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah
- 7. 2. 4. 03. **Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya**
- 7. 2. 4. 03. 001 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

- 8. **PENDAPATAN - LO**
- 8. 1. **PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO**
- 8. 1. 1. **Pendapatan Pajak Daerah - LO**
- 8. 1. 1. 01. **Pendapatan Pajak Hotel - LO**
- 8. 1. 1. 01. 001 Pendapatan Pajak Hotel Bintang Lima Berlian - LO
- 8. 1. 1. 01. 002 Pendapatan Pajak Hotel Bintang Lima - LO
- 8. 1. 1. 01. 003 Pendapatan Pajak Hotel Bintang Empat - LO
- 8. 1. 1. 01. 004 Pendapatan Pajak Hotel Bintang Tiga - LO
- 8. 1. 1. 01. 005 Pendapatan Pajak Hotel Bintang Dua - LO
- 8. 1. 1. 01. 006 Pendapatan Pajak Hotel Bintang Satu - LO
- 8. 1. 1. 01. 007 Pendapatan Pajak Hotel Melati Tiga - LO
- 8. 1. 1. 01. 008 Pendapatan Pajak Hotel Melati Dua - LO
- 8. 1. 1. 01. 009 Pendapatan Pajak Hotel Melati Satu - LO
- 8. 1. 1. 01. 010 Pendapatan Pajak Motel - LO
- 8. 1. 1. 01. 011 Pendapatan Pajak Cottage - LO
- 8. 1. 1. 01. 012 Pendapatan Pajak Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/ Hostel/ Rumah Kos - LO
- 8. 1. 1. 01. 013 Pendapatan Pajak Wisma Pariwisata - LO
- 8. 1. 1. 01. 014 Pendapatan Pajak Pondok Pariwisata - LO
- 8. 1. 1. 01. 015 Pendapatan Pajak Gubug Pariwisata - LO
- 8. 1. 1. 02. **Pendapatan Pajak Restoran - LO**
- 8. 1. 1. 02. 001 Pendapatan Pajak Restoran - LO
- 8. 1. 1. 02. 002 Pendapatan Pajak Rumah Makan - LO
- 8. 1. 1. 02. 003 Pendapatan Pajak Cafe - LO
- 8. 1. 1. 02. 004 Pendapatan Pajak Kantin - LO

- 8. 1. 1. 02. 006 Pendapatan Pajak Warung - LO
- 8. 1. 1. 02. 007 Pendapatan Pajak Bar - LO
- 8. 1. 1. 02. 008 Pendapatan Pajak Jasa Boga - LO
- 8. 1. 1. 03. **Pendapatan Pajak Hiburan - LO****
- 8. 1. 1. 03. 001 Pendapatan Pajak Tontonan Film - LO
- 8. 1. 1. 03. 002 Pendapatan Pajak Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana - LO
- 8. 1. 1. 03. 003 Pendapatan Pajak Kontes Kecantikan, Bina Raga dan sejenisnya - LO
- 8. 1. 1. 03. 004 Pendapatan Pajak Pameran - LO
- 8. 1. 1. 03. 005 Pendapatan Pajak Diskotik, Karaoke, Klap Malam dan sejenisnya - LO
- 8. 1. 1. 03. 006 Pendapatan Pajak Sirkus, Akrobat dan Sulap - LO
- 8. 1. 1. 03. 007 Pendapatan Pajak Permainan Bilyar, Golf dan Bowling - LO
- 8. 1. 1. 03. 008 Pendapatan Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan - LO
- 8. 1. 1. 03. 009 Pendapatan Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran
(Fitness center) - LO
- 8. 1. 1. 03. 010 Pendapatan Pajak Pertandingan Olahraga - LO
- 8. 1. 1. 04. **Pendapatan Pajak Reklame - LO****
- 8. 1. 1. 04. 001 Pendapatan Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron dan sejenisnya - LO
- 8. 1. 1. 04. 002 Pendapatan Pajak Reklame Kain - LO
- 8. 1. 1. 04. 003 Pendapatan Pajak Reklame Melekat/ Stiker - LO
- 8. 1. 1. 04. 004 Pendapatan Pajak Reklame Selebaran - LO
- 8. 1. 1. 04. 005 Pendapatan Pajak Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan - LO
- 8. 1. 1. 04. 006 Pendapatan Pajak Reklame Udara - LO
- 8. 1. 1. 04. 007 Pendapatan Pajak Reklame Apung - LO
- 8. 1. 1. 04. 008 Pendapatan Pajak Reklame Suara - LO
- 8. 1. 1. 04. 009 Pendapatan Pajak Reklame Film/ Slide - LO
- 8. 1. 1. 04. 010 Pendapatan Pajak Reklame Peragaan - LO
- 8. 1. 1. 05. **Pendapatan Pajak Penerangan Jalan - LO****
- 8. 1. 1. 05. 001 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Jepara - LO
- 8. 1. 1. 05. 002 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Bangsri - LO
- 8. 1. 1. 05. 003 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Kudus - LO
- 8. 1. 1. 05. 004 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Juwana - LO
- 8. 1. 1. 06. **Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO****
- 8. 1. 1. 06. 001 Pendapatan Pajak Asbes - LO
- 8. 1. 1. 06. 002 Pendapatan Pajak Batu Tulis - LO
- 8. 1. 1. 06. 003 Pendapatan Pajak Batu Setengah Permata - LO
- 8. 1. 1. 06. 004 Pendapatan Pajak Batu Kapur - LO
- 8. 1. 1. 06. 005 Pendapatan Pajak Batu Apung - LO
- 8. 1. 1. 06. 006 Pendapatan Pajak Batu Permata - LO
- 8. 1. 1. 06. 007 Pendapatan Pajak Bentonit - LO
- 8. 1. 1. 06. 008 Pendapatan Pajak Dolomit - LO
- 8. 1. 1. 06. 009 Pendapatan Pajak Feldspar - LO
- 8. 1. 1. 06. 010 Pendapatan Pajak Garam Batu (halite) - LO
- 8. 1. 1. 06. 011 Pendapatan Pajak Grafit - LO
- 8. 1. 1. 06. 012 Pendapatan Pajak Granit/Andesit - LO
- 8. 1. 1. 06. 013 Pendapatan Pajak Gips - LO
- 8. 1. 1. 06. 014 Pendapatan Pajak Kalsit - LO
- 8. 1. 1. 06. 015 Pendapatan Pajak Kaolin - LO
- 8. 1. 1. 06. 016 Pendapatan Pajak Leusit - LO
- 8. 1. 1. 06. 017 Pendapatan Pajak Magnesit - LO
- 8. 1. 1. 06. 018 Pendapatan Pajak Mika - LO
- 8. 1. 1. 06. 019 Pendapatan Pajak Marmer - LO
- 8. 1. 1. 06. 020 Pendapatan Pajak Nitrat - LO
- 8. 1. 1. 06. 021 Pendapatan Pajak Opsidien - LO
- 8. 1. 1. 06. 022 Pendapatan Pajak Oker - LO
- 8. 1. 1. 06. 023 Pendapatan Pajak Pasir dan Kerikil - LO
- 8. 1. 1. 06. 024 Pendapatan Pajak Pasir Kuarsa - LO
- 8. 1. 1. 06. 025 Pendapatan Pajak Perlit - LO
- 8. 1. 1. 06. 026 Pendapatan Pajak Fosfat - LO

8. 1. 1. 06. 028 Pendapatan Pajak Tanah Serap (fullers earth) - LO
8. 1. 1. 06. 029 Pendapatan Pajak Tanah Diatome - LO
8. 1. 1. 06. 030 Pendapatan Pajak Tanah Liat - LO
8. 1. 1. 06. 031 Pendapatan Pajak Tawas (alum) - LO
8. 1. 1. 06. 032 Pendapatan Pajak Tras - LO
8. 1. 1. 06. 033 Pendapatan Pajak Yarosif - LO
8. 1. 1. 06. 034 Pendapatan Pajak Zeolit - LO
8. 1. 1. 06. 035 Pendapatan Pajak Basal - LO
8. 1. 1. 06. 036 Pendapatan Pajak Trakkit - LO
- 8. 1. 1. 07. Pendapatan Pajak Parkir - LO**
8. 1. 1. 07. 001 Pendapatan Pajak Penyelenggaraan Tempat Parkir Di Luar Badan Jalan dan Penitipan Kendaraan Bermotor - LO
- 8. 1. 1. 08. Pendapatan Pajak Air - LO**
8. 1. 1. 08. 001 Pendapatan Pajak Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah - LO
- 8. 1. 1. 09. Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet - LO**
8. 1. 1. 09. 001 Pendapatan Pajak Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet - LO
- 8. 1. 1. 10. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO**
8. 1. 1. 10. 001 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO
- 8. 1. 1. 11. Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO**
8. 1. 1. 11. 001 Pendapatan Pajak Bea Perolehan Pemindahan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
8. 1. 1. 11. 002 Pendapatan Pajak Bea Perolehan Pemindahan Hak Baru Atas Tanah dan Bangunan - LO
- 8. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO**
- 8. 1. 2. 01. Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO**
8. 1. 2. 01. 001 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
8. 1. 2. 01. 002 Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO
8. 1. 2. 01. 003 Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil - LO
8. 1. 2. 01. 004 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
8. 1. 2. 01. 005 Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8. 1. 2. 01. 006 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - LO
8. 1. 2. 01. 007 Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
8. 1. 2. 01. 008 Pendapatan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
8. 1. 2. 01. 009 Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
8. 1. 2. 01. 010 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
8. 1. 2. 01. 011 Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8. 1. 2. 01. 012 Pendapatan Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO
8. 1. 2. 01. 013 Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
8. 1. 2. 01. 014 Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
- 8. 1. 2. 02. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO**
8. 1. 2. 02. 001 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
8. 1. 2. 02. 002 Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LO
8. 1. 2. 02. 003 Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan - LO
8. 1. 2. 02. 004 Pendapatan Retribusi Terminal - LO
8. 1. 2. 02. 005 Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO
8. 1. 2. 02. 006 Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
8. 1. 2. 02. 007 Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8. 1. 2. 02. 008 Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
8. 1. 2. 02. 009 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO
8. 1. 2. 02. 010 Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO
8. 1. 2. 02. 011 Pendapatan Retribusi Penyeberangan di Air - LO
8. 1. 2. 02. 012 Pendapatan Retribusi Pengelolaan Limbah Cair - LO
8. 1. 2. 02. 013 Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
- 8. 1. 2. 03. Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu - LO**
8. 1. 2. 03. 001 Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan - LO
8. 1. 2. 03. 002 Pendapatan Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8. 1. 2. 03. 003 Pendapatan Retribusi Ijin Gangguan - LO
8. 1. 2. 03. 004 Pendapatan Retribusi Ijin Trayek - LO
8. 1. 2. 03. 005 Pendapatan Retribusi Ijin Usaha Perikanan - LO



- 8. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO**
- 8. 1. 3. 01. Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD - LO**
- 8. 1. 3. 01. 001 Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT Bank Jateng - LO
- 8. 1. 3. 01. 002 Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha - LO
- 8. 1. 3. 01. 003 Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD BPR BKK Jepara - LO
- 8. 1. 3. 01. 004 Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD BPR Jepara Artha - LO
- 8. 1. 3. 01. 005 Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Jepara - LO
- 8. 1. 3. 02. Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/ BUMN - LO**
- 8. 1. 3. 02. 001 Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/ BUMN - LO
- 8. 1. 3. 03. Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta - LO**
- 8. 1. 3. 03. 001 Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/ Milik Swasta - LO
- 8. 1. 3. 04. Pendapatan Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman - LO**
- 8. 1. 3. 04. 001 Pendapatan Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman - LO

- 8. 1. 9. Lain-lain PAD yang Sah - LO**
- 8. 1. 9. 01. Pendapatan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan - LO**
- 8. 1. 9. 01. 001 Pendapatan Pelepasan Hak Atas Tanah - LO
- 8. 1. 9. 01. 002 Pendapatan Penjualan Perlatan/ Perlengkapan Kantor tidak Terpakai - LO
- 8. 1. 9. 01. 003 Pendapatan Penjualan Mesin/ Alat-alat Berat tidak Terpakai - LO
- 8. 1. 9. 01. 004 Pendapatan Penjualan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas - LO
- 8. 1. 9. 01. 005 Pendapatan Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua - LO
- 8. 1. 9. 01. 006 Pendapatan Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat - LO
- 8. 1. 9. 01. 007 Pendapatan Penjualan Drum Bekas - LO
- 8. 1. 9. 01. 008 Pendapatan Penjualan Hasil Penebangan Pohon - LO
- 8. 1. 9. 01. 009 Pendapatan Penjualan Lampu Hias Bekas - LO
- 8. 1. 9. 01. 010 Pendapatan Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan - LO
- 8. 1. 9. 01. 011 Pendapatan Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas - LO
- 8. 1. 9. 01. 012 Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi - LO
- 8. 1. 9. 01. 013 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian - LO
- 8. 1. 9. 01. 014 Pendapatan Penjualan Hasil Kehutanan - LO
- 8. 1. 9. 01. 015 Pendapatan Penjualan Hasil Perkebunan - LO
- 8. 1. 9. 01. 016 Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan - LO
- 8. 1. 9. 01. 017 Pendapatan Penjualan Hasil Perikanan - LO
- 8. 1. 9. 01. 018 Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan - LO
- 8. 1. 9. 02. Pendapatan Jasa Giro - LO**
- 8. 1. 9. 02. 001 Pendapatan Jasa Giro Kas Daerah - LO
- 8. 1. 9. 02. 002 Pendapatan Jasa Giro Bendahara - LO
- 8. 1. 9. 02. 003 Pendapatan Jasa Giro Dana Cadangan - LO
- 8. 1. 9. 03. Pendapatan Bunga Deposito - LO**
- 8. 1. 9. 03. 001 Pendapatan Bunga Deposito - LO
- 8. 1. 9. 04. Pendapatan Dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO**
- 8. 1. 9. 04. 001 Pendapatan dari Kerugian Uang Daerah - LO
- 8. 1. 9. 04. 002 Pendapatan dari Kerugian Barang Daerah - LO
- 8. 1. 9. 05. Pendapatan Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO**
- 8. 1. 9. 05. 001 Pendapatan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LO
- 8. 1. 9. 05. 002 Pendapatan Potongan - LO
- 8. 1. 9. 05. 003 Pendapatan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rumah - LO
- 8. 1. 9. 06. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO**
- 8. 1. 9. 06. 001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LO
- 8. 1. 9. 06. 002 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LO

Pekerjaan Umum - LO

- 8. 1. 9. 06. 004 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LO
- 8. 1. 9. 06. 005 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang - LO
- 8. 1. 9. 06. 006 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan - LO
- 8. 1. 9. 06. 007 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertudungan - LO*
- 8. 1. 9. 06. 008 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup - LO
- 8. 1. 9. 06. 009 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan - LO
- 8. 1. 9. 06. 010 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pariwisata - LO
- 8. 1. 9. 07. Pendapatan Denda Pajak - LO**
- 8. 1. 9. 07. 001 Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO
- 8. 1. 9. 07. 002 Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO
- 8. 1. 9. 07. 003 Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO
- 8. 1. 9. 07. 004 Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO
- 8. 1. 9. 07. 005 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO
- 8. 1. 9. 07. 006 Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C - LO
- 8. 1. 9. 07. 007 Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO
- 8. 1. 9. 07. 008 Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah - LO
- 8. 1. 9. 07. 009 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO
- 8. 1. 9. 07. 010 Pendapatan Denda Pajak Lingkungan - LO
- 8. 1. 9. 07. 011 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
- 8. 1. 9. 07. 012 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO
- 8. 1. 9. 07. 013 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
- 8. 1. 9. 08. Pendapatan Denda Retribusi - LO**
- 8. 1. 9. 08. 001 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum - LO
- 8. 1. 9. 08. 002 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha - LO
- 8. 1. 9. 08. 003 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu - LO
- 8. 1. 9. 09. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO**
- 8. 1. 9. 09. 001 Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan - LO
- 8. 1. 9. 09. 002 Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LO
- 8. 1. 9. 09. 003 Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman - LO
- 8. 1. 9. 10. Pendapatan dari Pengembalian - LO**
- 8. 1. 9. 10. 001 Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO
- 8. 1. 9. 10. 002 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LO
- 8. 1. 9. 10. 003 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO
- 8. 1. 9. 10. 004 Pendapatan dari Pengembalian kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO
- 8. 1. 9. 10. 005 Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka - LO
- 8. 1. 9. 10. 006 Pendapatan dari Pengembalian Lainnya - LO
- 8. 1. 9. 11. Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO**
- 8. 1. 9. 11. 001 Pendapatan dari Fasilitas Sosial - LO
- 8. 1. 9. 11. 002 Pendapatan dari Fasilitas Umum - LO
- 8. 1. 9. 12. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO**
- 8. 1. 9. 12. 001 Pendapatan dari Uang Pendaftaran/ Ujian Masuk - LO
- 8. 1. 9. 12. 002 Pendapatan dari Uang Sekolah/ Pendidikan dan Pelatihan - LO
- 8. 1. 9. 12. 003 Pendapatan dari Uang Ujian Kenaikan Tingkat/ Kelas - LO
- 8. 1. 9. 13. Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan - LO**
- 8. 1. 9. 13. 001 Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan Rumah - LO
- 8. 1. 9. 13. 002 Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan Kendaraan - LO
- 8. 1. 9. 13. 003 Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Kompensasi Kios, Kios Dalam Los dan Los / Meja - LO
- 8. 1. 9. 14. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat - LO**
- 8. 1. 9. 14. 001 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat - LO
- 8. 1. 9. 15. Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan - LO**
- 8. 1. 9. 15. 001 Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan - LO

- 8. 1. 9. 16. **PENDAPATAN BLUD - LO**
- 8. 1. 9. 16. 001 Pendapatan BLUD RSUD RA Kartini - LO
- 8. 1. 9. 17. **Pendapatan dari Kompensasi - LO**
- 8. 1. 9. 17. 001 Pendapatan dari Kompensasi - LO
- 8. 1. 9. 18. **Pendapatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional**
- 8. 1. 9. 18. 001 Pendapatan Jaminan Pelayanan Nasional Kapitasi -LO
- 8. 1. 9. 18. 002 Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional Klaim-LO

8. 2. PENDAPATAN TRANSFER - LO

8. 2. 1. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat - LO

8. 2. 1. 01. Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO

- 8. 2. 1. 01. 001 Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LO
- 8. 2. 1. 01. 002 Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
- 8. 2. 1. 01. 003 Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak - LO
- 8. 2. 1. 01. 004 Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO
- 8. 2. 1. 01. 005 Pendapatan Bagi Hasil dari Cukai - LO

8. 2. 1. 02. Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO

- 8. 2. 1. 02. 001 Pendapatan Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO
- 8. 2. 1. 02. 002 Pendapatan Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO
- 8. 2. 1. 02. 003 Pendapatan Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO
- 8. 2. 1. 02. 004 Pendapatan Bagi Hasil dari Iuran tetap (Land-rent) - LO
- 8. 2. 1. 02. 005 Pendapatan Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO
- 8. 2. 1. 02. 006 Pendapatan Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO
- 8. 2. 1. 02. 007 Pendapatan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO
- 8. 2. 1. 02. 008 Pendapatan Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO
- 8. 2. 1. 02. 009 Pendapatan Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO
- 8. 2. 1. 02. 010 Pendapatan Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO
- 8. 2. 1. 02. 011 Pendapatan Bagi Hasil dari Hasil Hutan - LO
- 8. 2. 1. 02. 012 Pendapatan Bagi Hasil dari Pertambangan Umum - LO

8. 2. 1. 03. Pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai - LO

- 8. 2. 1. 03. 001 Pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO

8. 2. 1. 04. PENDAPATAN DANA ALOKASI UMUM - LO

- 8. 2. 1. 04. 001 Pendapatan Dana Alokasi Umum - LO

8. 2. 1. 05. PENDAPATAN DANA ALOKASI KHUSUS - LO

- 8. 2. 1. 05. 001 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan - LO
- 8. 2. 1. 05. 002 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan - LO
- 8. 2. 1. 05. 003 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan - LO
- 8. 2. 1. 05. 004 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi - LO
- 8. 2. 1. 05. 005 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum - LO
- 8. 2. 1. 05. 006 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi - LO
- 8. 2. 1. 05. 007 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Prasarana Pemerintah Daerah - LO
- 8. 2. 1. 05. 008 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan - LO
- 8. 2. 1. 05. 009 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian - LO
- 8. 2. 1. 05. 010 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup - LO
- 8. 2. 1. 05. 011 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana - LO
- 8. 2. 1. 05. 012 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan - LO
- 8. 2. 1. 05. 013 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Prasarana Perdesaan - LO
- 8. 2. 1. 05. 014 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan - LO
- 8. 2. 1. 05. 015 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO
- 8. 2. 1. 05. 016 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan - LO
- 8. 2. 1. 05. 017 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman - LO
- 8. 2. 1. 05. 018 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Prasarana Perbatasan - LO
- 8. 2. 1. 05. 019 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan - LO

8. 2. 2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

8. 2. 2. 01. Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO

- 8. 2. 2. 01. 001 Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO

8. 2. 2. 02. Pendapatan Dana Penyesuaian - LO



- 8. 2. 2. 02. 002 Pendapatan Dana Penyesuaian Infrastruktur - LO
- 8. 2. 2. 02. 003 Pendapatan Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan - LO
- 8. 2. 2. 02. 004 Pendapatan Dana Penyesuaian Tambahan DAU untuk Guru PNSD - LO
- 8. 2. 2. 03. Pendapatan Dana Darurat - LO**
- 8. 2. 2. 03. 001 Pendapatan Penanggulangan Korban/ Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO

- 8. 2. 3. Pendapatan Transfer dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - LO**
- 8. 2. 3. 01. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO**
- 8. 2. 3. 01. 001 Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO
- 8. 2. 3. 01. 002 Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air - LO
- 8. 2. 3. 01. 003 Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO
- 8. 2. 3. 01. 004 Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air - LO
- 8. 2. 3. 01. 005 Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
- 8. 2. 3. 01. 006 Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah - LO
- 8. 2. 3. 01. 007 Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LO
- 8. 2. 3. 01. 008 Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LO
- 8. 2. 3. 01. 009 Pendapatan Bagi Hasil dari Pemberian Ijin Dispensasi Kelebihan Muatan - LO
- 8. 2. 3. 01. 010 Pendapatan Bagi Hasil dari Tera dan Tera Ulang - LO
- 8. 2. 3. 01. 011 Pendapatan Bagi Hasil dari Sumbangan Pihak III (Kayu) - LO
- 8. 2. 3. 01. 012 Pendapatan Bagi Hasil dari Ijin Usaha Perikanan - LO
- 8. 2. 3. 02. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten - LO**
- 8. 2. 3. 02. 001 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten - LO
- 8. 2. 3. 03. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota - LO**
- 8. 2. 3. 03. 001 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota - LO
- 8. 2. 3. 04. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO**
- 8. 2. 3. 04. 001 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO

- 8. 2. 4. Bantuan Keuangan - LO**
- 8. 2. 4. 01. Pendapatan Bantuan Keuangan - LO**
- 8. 2. 4. 01. 001 Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi - LO
- 8. 2. 4. 01. 002 Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kabupaten - LO
- 8. 2. 4. 01. 003 Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kota

- 8. 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO**
- 8. 3. 1. Pendapatan Hibah - LO**
- 8. 3. 1. 01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO**
- 8. 3. 1. 01. 001 Pendapatan Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah - LO
- 8. 3. 1. 01. 002 Pendapatan Bantuan Pemberdayaan Masyarakat - LO
- 8. 3. 1. 02. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO**
- 8. 3. 1. 02. 001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO
- 8. 3. 1. 03. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO**
- 8. 3. 1. 03. 001 Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LO
- 8. 3. 1. 04. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LO**
- 8. 3. 1. 04. 001 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LO
- 8. 3. 1. 05. Pendapatan Hibah dari Luar Negeri - LO**
- 8. 3. 1. 05. 001 Pendapatan Hibah dari Bilateral - LO
- 8. 3. 1. 05. 002 Pendapatan Hibah dari Multilateral - LO
- 8. 3. 1. 05. 003 Pendapatan Hibah dari Donor Lainnya - LO

- 8. 3. 2. Pendapatan Lainnya - LO**
- 8. 3. 2. 01. Pendapatan Lainnya - LO**
- 8. 3. 2. 01. 001 Pendapatan Lainnya - LO

- 8. 4. PENDAPATAN NON OPERASIONAL - LO**
- 8. 4. 1. Surplus Penjualan Aset Nonlancar - LO**
- 8. 4. 1. 01. Surplus Penjualan Aset Nonlancar - LO**
- 8. 4. 1. 01. 001 Surplus Penjualan Aset Tanah - LO
- 8. 4. 1. 01. 002 Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO



8. 4. 1. 01. 004 Surplus Penjualan Aset Non Lancar / Aset Tetap Lainnya - LO

8. 4. 1. 01. 005 Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO

8. 4. 2. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

8. 4. 2. 01. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

8. 4. 2. 01. 001 Surplus Penyelesaian Utang dari Sektor Perbankan - LO

8. 4. 2. 01. 002 Surplus Penyelesaian Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO

8. 4. 2. 01. 003 Surplus Penyelesaian Utang Obligasi - LO

8. 4. 2. 01. 004 Surplus Penyelesaian Utang dari Pemerintah Pusat - LO

8. 4. 2. 01. 005 Surplus Penyelesaian Utang dari Pemerintah Daerah lainnya - LO

8. 4. 2. 01. 006 Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO

8. 4. 3. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

8. 4. 3. 01. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

8. 4. 3. 01. 001 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

8. 5. POS LUAR BIASA - LO

8. 5. 1. Pos Luar Biasa - LO

8. 5. 1. 01. Pos Luar Biasa - LO

8. 5. 1. 01. 001 Pos Luar Biasa - LO

9. BEBAN

9. 1. BEBAN OPERASI

9. 1. 1. Beban Pegawai - LO

9. 1. 1. 01. Beban Gaji dan Tunjangan - LO

9. 1. 1. 01. 001 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - LO

9. 1. 1. 01. 002 Tunjangan Keluarga - LO

9. 1. 1. 01. 003 Tunjangan Jabatan - LO

9. 1. 1. 01. 004 Tunjangan Fungsional - LO

9. 1. 1. 01. 005 Tunjangan Fungsional Umum - LO

9. 1. 1. 01. 006 Tunjangan Beras - LO

9. 1. 1. 01. 007 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO

9. 1. 1. 01. 008 Pembulatan Gaji - LO

9. 1. 1. 01. 009 Iuran Asuransi Kesehatan - LO

9. 1. 1. 01. 010 Uang Paket - LO

9. 1. 1. 01. 011 Tunjangan Badan Musyawarah - LO

9. 1. 1. 01. 012 Tunjangan Komisi - LO

9. 1. 1. 01. 013 Tunjangan Badan Anggaran - LO

9. 1. 1. 01. 014 Tunjangan Badan Kehormatan - LO

9. 1. 1. 01. 015 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO

9. 1. 1. 01. 016 Tunjangan Perumahan - LO

9. 1. 1. 01. 017 Uang Duka Wafat/Tewas - LO

9. 1. 1. 01. 018 Uang Jasa Pengabdian - LO

9. 1. 1. 01. 019 Tunjangan Kesehatan DPRD - LO

9. 1. 1. 02. Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO

9. 1. 1. 02. 001 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO

9. 1. 1. 02. 002 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas - LO

9. 1. 1. 02. 003 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja - LO

9. 1. 1. 02. 004 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi - LO

9. 1. 1. 02. 005 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja - LO

9. 1. 1. 02. 006 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya - LO

9. 1. 1. 03. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO

9. 1. 1. 03. 001 Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO

9. 1. 1. 03. 002 Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO

9. 1. 1. 03. 003 Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO

9. 1. 1. 04. Beban Pemungutan Pajak Daerah - LO



- 9. 1. 1. 05. Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO**
- 9. 1. 1. 05. 001 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO
- 9. 1. 1. 06. Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO**
- 9. 1. 1. 06. 001 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO
- 9. 1. 1. 07. Beban Honorarium PNS - LO**
- 9. 1. 1. 07. 001 Beban Honorarium Pengelola Keuangan - LO
- 9. 1. 1. 07. 002 Beban Honorarium Pelaksana Kegiatan - LO
- 9. 1. 1. 07. 003 Beban Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa - LO
- 9. 1. 1. 07. 004 Beban Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur - LO
- 9. 1. 1. 07. 005 Beban Honorarium Tenaga Medis/ Paramedis - LO
- 9. 1. 1. 08. Beban Honorarium Non PNS - LO**
- 9. 1. 1. 08. 001 Beban Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS - LO
- 9. 1. 1. 08. 002 Beban Honorarium Pegawai Tetap Non PNS - LO
- 9. 1. 1. 08. 003 Beban Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS - LO
- 9. 1. 1. 09. Beban Lembur - LO**
- 9. 1. 1. 09. 001 Beban Uang Lembur PNS - LO
- 9. 1. 1. 09. 002 Beban Uang Lembur Non PNS - LO
- 9. 1. 1. 10. Beban Pegawai Dana BOS - LO**
- 9. 1. 1. 10. 001 Beban Pegawai Dana BOS SD - LO
- 9. 1. 1. 10. 002 Beban Pegawai Dana BOS SMP - LO
- 9. 1. 1. 11. Beban Pegawai BLUD (dari APBD) - LO**
- 9. 1. 1. 11. 001 Beban Pegawai BLUD RSUD RA. Kartini - LO

- 9. 1. 2. Beban Barang dan Jasa**
- 9. 1. 2. 01. Beban Bahan Pakai Habis**
- 9. 1. 2. 01. 001 Beban Persediaan alat tulis kantor
- 9. 1. 2. 01. 002 Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
- 9. 1. 2. 01. 003 Beban Persediaan perangkko, materai dan benda pos lainnya
- 9. 1. 2. 01. 004 Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
- 9. 1. 2. 01. 005 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas
- 9. 1. 2. 01. 006 Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran
- 9. 1. 2. 01. 007 Beban Persediaan Habis pakai Komputer
- 9. 1. 2. 02. Beban Persediaan Bahan / Material**
- 9. 1. 2. 02. 001 Beban Persediaan tanaman / Ternak / Ikan
- 9. 1. 2. 02. 002 Beban Persediaan bahan kimia, obat-obatan dan perlengkapan medis
- 9. 1. 2. 02. 003 Beban Persediaan bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek
- 9. 1. 2. 02. 004 Beban Persediaan Bahan Pokok/Makanan dan Keperluan Dapur
- 9. 1. 2. 02. 005 Beban Persediaan Peralatan/Perlengkapan/Inventaris Kantor
- 9. 1. 2. 02. 006 Beban Persediaan Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software
- 9. 1. 2. 03. Beban Jasa Kantor**
- 9. 1. 2. 03. 001 Beban telepon
- 9. 1. 2. 03. 002 Beban air
- 9. 1. 2. 03. 003 Beban listrik
- 9. 1. 2. 03. 004 Beban Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
- 9. 1. 2. 03. 005 Beban surat kabar/majalah
- 9. 1. 2. 03. 006 Beban jasa internet (sewa hosting dan broadband)
- 9. 1. 2. 03. 007 Beban paket/pengiriman
- 9. 1. 2. 03. 008 Beban Jasa Transaksi Keuangan
- 9. 1. 2. 03. 009 Beban Jasa Penerangan Jalan Umum
- 9. 1. 2. 03. 010 Beban Dokumentasi dan Publikasi
- 9. 1. 2. 03. 011 Beban Jasa Pemeriksaan Kesehatan
- 9. 1. 2. 03. 012 Beban Jasa KIR, STNK dan SIM
- 9. 1. 2. 04. Beban Premi Asuransi**
- 9. 1. 2. 04. 001 Beban Premi Asuransi Kesehatan
- 9. 1. 2. 04. 002 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah
- 9. 1. 2. 05. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor**
- 9. 1. 2. 05. 001 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

- 9. 1. 2. 06. 001 **Beban cetak**
- 9. 1. 2. 06. 002 **Beban Penggandaan/fotokopi**
- 9. 1. 2. 07. **Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**
- 9. 1. 2. 07. 001 **Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**
- 9. 1. 2. 08. **Beban Sewa Sarana Mobilitas**
- 9. 1. 2. 08. 001 **Beban Sewa Sarana Mobilitas**
- 9. 1. 2. 09. **Beban Sewa Alat Berat**
- 9. 1. 2. 09. 001 **Beban Sewa Alat Berat**
- 9. 1. 2. 10. **Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**
- 9. 1. 2. 10. 001 **Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**
- 9. 1. 2. 11. **Beban Makanan dan Minuman**
- 9. 1. 2. 11. 001 **Beban makanan dan minuman harian pegawai**
- 9. 1. 2. 11. 002 **Beban makanan dan minuman rapat**
- 9. 1. 2. 11. 003 **Beban Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi**
- 9. 1. 2. 11. 004 **Beban Makanan dan minuman pasien**
- 9. 1. 2. 12. **Beban Pakaian Dinas dan Atributnya**
- 9. 1. 2. 12. 001 **Beban Pakaian Dinas dan Atributnya**
- 9. 1. 2. 13. **Beban Pakaian Kerja**
- 9. 1. 2. 13. 001 **Beban Pakaian Kerja**
- 9. 1. 2. 14. **Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu**
- 9. 1. 2. 14. 001 **Beban Pakaian Olah Raga**
- 9. 1. 2. 14. 002 **Beban Pakaian Upacara**
- 9. 1. 2. 14. 003 **Beban Pakaian Tradisional/Adat**
- 9. 1. 2. 15. **Beban Perjalanan Dinas**
- 9. 1. 2. 15. 001 **Beban perjalanan dinas dalam daerah**
- 9. 1. 2. 15. 002 **Beban perjalanan dinas luar daerah**
- 9. 1. 2. 15. 003 **Beban perjalanan dinas luar negeri**
- 9. 1. 2. 16. **Beban Perjalanan Pindah Tugas**
- 9. 1. 2. 16. 001 **Beban Perjalanan Pindah Tugas**
- 9. 1. 2. 16. 002 **Beban Pemulangan Pegawai**
- 9. 1. 2. 17. **Beban Pemeliharaan**
- 9. 1. 2. 17. 001 **Beban Pemeliharaan Tanah**
- 9. 1. 2. 17. 002 **Beban Pemeliharaan Alat-alat Besar (al: Buldoser, Traktor, Excavator)**
- 9. 1. 2. 17. 003 **Beban Pemeliharaan Alat-alat Angkutan**
- 9. 1. 2. 17. 004 **Beban Pemeliharaan Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur**
- 9. 1. 2. 17. 005 **Beban Pemeliharaan Alat-alat pertanian**
- 9. 1. 2. 17. 006 **Beban Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga**
- 9. 1. 2. 17. 007 **Beban Pemeliharaan Alat-alat studio dan komunikasi**
- 9. 1. 2. 17. 008 **Beban Pemeliharaan Alat-alat kedokteran**
- 9. 1. 2. 17. 009 **Beban Pemeliharaan Alat-alat laboratorium**
- 9. 1. 2. 17. 010 **Beban Pemeliharaan Alat-alat Persenjataan/keamanan**
- 9. 1. 2. 17. 011 **Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung**
- 9. 1. 2. 17. 012 **Beban Pemeliharaan Bangunan Monumen**
- 9. 1. 2. 17. 013 **Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**
- 9. 1. 2. 17. 014 **Beban Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi**
- 9. 1. 2. 17. 015 **Beban Pemeliharaan instalasi pengolahan (a.l. instalasi PLTD)**
- 9. 1. 2. 17. 016 **Beban Pemeliharaan Jaringan (a.l. jaringan air minum, listrik/telpon/gas, limbah/air kotor dan multimedia)**
- 9. 1. 2. 17. 017 **Beban Pemeliharaan buku, perpustakaan dan arsip**
- 9. 1. 2. 17. 018 **Beban Pemeliharaan barang bercorak kebudayaan (a.l. Alat kesenian, maket dan foto**
- 9. 1. 2. 17. 019 **dokumen, benda-benda bersejarah)**
- 9. 1. 2. 17. 020 **Beban Pemeliharaan Hewan dan ternak serta tanaman**
- 9. 1. 2. 17. 021 **Beban Pemeliharaan Perangkat Lunak / Software**
- 9. 1. 2. 18. **Beban Jasa Konsultasi**
- 9. 1. 2. 18. 001 **Beban Jasa Konsultasi**
- 9. 1. 2. 19. **Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga**
- 9. 1. 2. 19. 001 **Beban Barang Modal Tanah Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat**

- Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
9. 1. 2. 19. 003 Beban Barang Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
9. 1. 2. 19. 004 Beban Barang Modal Gedung dan Bangunan Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
9. 1. 2. 19. 005 Beban Barang Modal Aset Tetap Lainnya Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
9. 1. 2. 19. 006 Beban Barang Modal Aset Lainnya Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
9. 1. 2. 19. 007 Beban Barang Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat

9. 1. 2. 20. Beban Barang dan Jasa BLUD

9. 1. 2. 20. 001 Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD RA. Kartini

9. 1. 2. 21. Beban Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

9. 1. 2. 21. 001 Beban Jamkesda RSUD Kartini
9. 1. 2. 21. 002 Beban Jamkesda RSI
9. 1. 2. 21. 003 Beban Jamkesda Puskesmas Keling I
9. 1. 2. 21. 004 Beban Jamkesda Puskesmas Keling II
9. 1. 2. 21. 005 Beban Jamkesda Puskesmas Bangsri I
9. 1. 2. 21. 006 Beban Jamkesda Puskesmas Bangsri II
9. 1. 2. 21. 007 Beban Jamkesda Puskesmas Kembang
9. 1. 2. 21. 008 Beban Jamkesda Puskesmas Mlonggo
9. 1. 2. 21. 009 Beban Jamkesda Puskesmas Pakis Aji
9. 1. 2. 21. 010 Beban Jamkesda Puskesmas Jepara
9. 1. 2. 21. 011 Beban Jamkesda Puskesmas Tahunan
9. 1. 2. 21. 012 Beban Jamkesda Puskesmas Batealit
9. 1. 2. 21. 013 Beban Jamkesda Puskesmas Kedung I
9. 1. 2. 21. 014 Beban Jamkesda Puskesmas Kedung II
9. 1. 2. 21. 015 Beban Jamkesda Puskesmas Pecangaan
9. 1. 2. 21. 016 Beban Jamkesda Puskesmas Kalinyamatan
9. 1. 2. 21. 017 Beban Jamkesda Puskesmas Welahan I
9. 1. 2. 21. 018 Beban Jamkesda Puskesmas Welahan II
9. 1. 2. 21. 019 Beban Jamkesda Puskesmas Mayong I
9. 1. 2. 21. 020 Beban Jamkesda Puskesmas Mayong II
9. 1. 2. 21. 021 Beban Jamkesda Puskesmas Nalumsari
9. 1. 2. 21. 022 Beban Jamkesda Puskesmas Karimunjawa
9. 1. 2. 21. 023 Beban Jamkesda Puskesmas Donorojo
9. 1. 2. 21. 024 Beban Jamkesda RS Kariadi
9. 1. 2. 21. 025 Beban Jamkesda RS Graha Husada
9. 1. 2. 21. 026 Beban Jamkesda RS Kumala Siwi
9. 1. 2. 21. 027 Beban Jamkesda PKU Muhammadiyah Mayong
9. 1. 2. 21. 028 Beban Jamkesda RSJD dr. Amino Gondo Hutomo
9. 1. 2. 21. 029 Beban Jamkesda RSOP Prof. Dr. Soeharso Surakarta
9. 1. 2. 21. dst

9. 1. 2. 22. Beban Beasiswa Pendidikan PNS

9. 1. 2. 22. 001 Beban Tugas Belajar D3
9. 1. 2. 22. 002 Beban Tugas Belajar S1
9. 1. 2. 22. 003 Beban Tugas Belajar S2
9. 1. 2. 22. 004 Beban Tugas Belajar S3

9. 1. 2. 23. Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

9. 1. 2. 23. 001 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

9. 1. 2. 24. Beban honorarium kepada non pegawai dan pemberian hadiah uang atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi

9. 1. 2. 24. 001 Beban Pembayaran Honorarium kepada Non Pegawai
9. 1. 2. 24. 002 Beban Pemberian Hadiah

9. 1. 2. 25. Beban Tamu Pemerintah Daerah

9. 1. 2. 25. 001 Beban Penginapan Tamu Pemerintah Daerah
9. 1. 2. 25. 002 Beban Makan dan Minum Tamu Pemerintah Daerah



9. 1. 2. 26. 001 Beban Jasa Layanan Kesehatan Kapitasi
9. 1. 2. 26. 002 Beban Jasa Layanan Kesehatan Klaim

9. 1. 3. Beban Bunga

9. 1. 3. 01. Beban Bunga Utang Pinjaman

9. 1. 3. 01. 001 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
9. 1. 3. 01. 002 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
9. 1. 3. 01. 003 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
9. 1. 3. 01. 004 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

9. 1. 3. 02. Beban Bunga Utang Obligasi

9. 1. 3. 02. 005 Beban Bunga Utang Obligasi

9. 1. 4. Beban Subsidi

9. 1. 4. 01. Beban Subsidi Energi

9. 1. 4. 01. 001 Beban Subsidi Energi

9. 1. 4. 02. Beban Subsidi Non BBM

9. 1. 4. 02. 001 Beban Subsidi Listrik
9. 1. 4. 02. 002 Beban Subsidi Pangan
9. 1. 4. 02. 003 Beban Subsidi Pupuk
9. 1. 4. 02. 004 Beban Subsidi Benih
9. 1. 4. 02. 005 Beban Subsidi Kredit Program
9. 1. 4. 02. 006 Beban Subsidi / Bantuan Dalam Rangka Penugasan (Public Services Obligation)

9. 1. 4. 03. Beban Subsidi Tarif

9. 1. 4. 03. 001 Beban Subsidi Tarif

9. 1. 5. Beban Hibah

9. 1. 5. 01. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

9. 1. 5. 01. 001 Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat
9. 1. 5. 01. 002 Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat di Daerah (Instansi Vertikal)

9. 1. 5. 02. Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya

9. 1. 5. 02. 001 Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah

9. 1. 5. 03. Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN

9. 1. 5. 03. 001 Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/ BUMD/ BUMN

9. 1. 5. 04. Beban Hibah kepada Pemerintahan Desa

9. 1. 5. 04. 001 Beban Hibah kepada Pemerintahan Desa

9. 1. 5. 05. Beban Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat

9. 1. 5. 05. 001 Beban Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat

9. 1. 5. 06. Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi

9. 1. 5. 06. 001 Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi

9. 1. 5. 07. Beban Hibah Untuk Satuan Pendidikan Dasar

9. 1. 5. 07. 001 Beban Hibah Untuk Satuan Pendidikan Dasar

9. 1. 6. Beban Bantuan Sosial

9. 1. 6. 01. Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

9. 1. 6. 01. 001 Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

9. 1. 6. 02. Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat

9. 1. 6. 02. 001 Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat

9. 1. 7. Beban Penyusutan

9. 1. 7. 01. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

9. 1. 7. 01. 001 Beban Penyusutan Alat-alat Berat
9. 1. 7. 01. 002 Beban Penyusutan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
9. 1. 7. 01. 003 Beban Penyusutan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
9. 1. 7. 01. 004 Beban Penyusutan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor
9. 1. 7. 01. 005 Beban Penyusutan Alat-alat Angkutan Air tidak Bermotor
9. 1. 7. 01. 006 Beban Penyusutan Alat-alat Angkutan Udara
9. 1. 7. 01. 007 Beban Penyusutan Alat-alat Bengkel
9. 1. 7. 01. 008 Beban Penyusutan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan

- 9. 1. 7. 01. 010 Beban Penyusutan Perlengkapan Kantor
- 9. 1. 7. 01. 011 Beban Penyusutan Komputer
- 9. 1. 7. 01. 012 Beban Penyusutan Mebelair
- 9. 1. 7. 01. 013 Beban Penyusutan Peralatan Dapur
- 9. 1. 7. 01. 014 Beban Penyusutan Penghias Ruangan Rumah Tangga
- 9. 1. 7. 01. 015 Beban Penyusutan Alat-alat Studio
- 9. 1. 7. 01. 016 Beban Penyusutan Alat-alat Komunikasi
- 9. 1. 7. 01. 017 Beban Penyusutan Alat-alat Ukur
- 9. 1. 7. 01. 018 Beban Penyusutan Alat-alat Kedokteran
- 9. 1. 7. 01. 019 Beban Penyusutan Alat-alat Laboratorium
- 9. 1. 7. 01. 020 Beban Penyusutan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
- 9. 1. 7. 02. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan**
- 9. 1. 7. 02. 001 Beban Penyusutan Gedung Kantor
- 9. 1. 7. 02. 002 Beban Penyusutan Gedung Rumah Jabatan
- 9. 1. 7. 02. 003 Beban Penyusutan Gedung Rumah Dinas
- 9. 1. 7. 02. 004 Beban Penyusutan Gedung Gudang
- 9. 1. 7. 02. 005 Beban Penyusutan Bangunan Monumen
- 9. 1. 7. 02. 006 Beban Penyusutan Tugu Peringatan
- 9. 1. 7. 03. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan**
- 9. 1. 7. 03. 001 Beban Penyusutan Jalan
- 9. 1. 7. 03. 002 Beban Penyusutan Jembatan
- 9. 1. 7. 03. 003 Beban Penyusutan Jaringan Air
- 9. 1. 7. 03. 004 Beban Penyusutan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
- 9. 1. 7. 03. 005 Beban Penyusutan Instalasi Listrik
- 9. 1. 7. 03. 006 Beban Penyusutan Instalasi Telepon
- 9. 1. 7. 04. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya**
- 9. 1. 7. 04. 001 Beban Penyusutan Buku dan Kepustakaan
- 9. 1. 7. 04. 002 Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan
- 9. 1. 7. 04. 003 Beban Penyusutan Hewan/Ternak dan Tanaman
- 9. 1. 7. 05. Beban Amortisasi Aset Lainnya**
- 9. 1. 7. 05. 001 Beban Amortisasi Tagihan Penjualan Angsuran
- 9. 1. 7. 05. 002 Beban Amortisasi Tuntutan Ganti Rugi
- 9. 1. 7. 05. 003 Beban Amortisasi Kemitraan Pihak Ketiga
- 9. 1. 7. 05. 004 Beban Amortisasi Bangun Kelola dan Serah
- 9. 1. 7. 05. 005 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya
- 9. 1. 7. 05. 006 Beban Amortisasi Aset Lain-lain

- 9. 1. 8. Beban Penyisihan Piutang**
- 9. 1. 8. 01. Beban Penyisihan Piutang Pendapatan**
- 9. 1. 8. 01. 001 Beban Penyisihan Piutang Pajak
- 9. 1. 8. 01. 002 Beban Penyisihan Piutang Retribusi
- 9. 1. 8. 01. 003 Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 9. 1. 8. 01. 004 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
- 9. 1. 8. 01. 005 Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
- 9. 1. 8. 01. 006 Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
- 9. 1. 8. 01. 007 Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
- 9. 1. 8. 01. 008 Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan
- 9. 1. 8. 01. 009 Beban Penyisihan Piutang Hibah
- 9. 1. 8. 01. 010 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
- 9. 1. 8. 02. Beban Penyisihan Piutang Lainnya**
- 9. 1. 8. 02. 001 Beban Penyisihan Piutang Lainnya
- 9. 1. 8. 03. Beban Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya**
- 9. 1. 8. 03. 001 Beban Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya

- 9. 1. 9. Beban Lain-lain**
- 9. 1. 9. 01. Beban Lain-lain**
- 9. 1. 9. 01. 001 Beban Lain-lain

9. 2. 0. 01. **Beban Barang Jasa Dana BOS**
9. 2. 0. 01. 001 Beban Barang Jasa Dana BOS

9. 2. BEBAN TRANSFER

9. 2. 1. Bagi Hasil Pajak

9. 2. 1. 01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada pemerintah Provinsi/Pusat

9. 2. 1. 01. 001 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada pemerintah Provinsi/Pusat

9. 2. 1. 02. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Kabupaten/Kota Lain

9. 2. 1. 02. 002 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Kabupaten/Kota Lain

9. 2. 1. 03. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa

9. 2. 1. 03. 001 Bagi Hasil kepada Desa Bangsri
9. 2. 1. 03. 002 Bagi Hasil kepada Desa Banjar Agung
9. 2. 1. 03. 003 Bagi Hasil kepada Desa Banjaran
9. 2. 1. 03. 004 Bagi Hasil kepada Desa Bondo
9. 2. 1. 03. 005 Bagi Hasil kepada Desa Guyangan
9. 2. 1. 03. 006 Bagi Hasil kepada Desa Jeruk Wangi
9. 2. 1. 03. 007 Bagi Hasil kepada Desa KedungLeper
9. 2. 1. 03. 008 Bagi Hasil kepada Desa Kepuk
9. 2. 1. 03. 009 Bagi Hasil kepada Desa Papasan
9. 2. 1. 03. 010 Bagi Hasil kepada Desa Srikandang
9. 2. 1. 03. 011 Bagi Hasil kepada Desa Tengguli
9. 2. 1. 03. 012 Bagi Hasil kepada Desa Wedelan
9. 2. 1. 03. 013 Bagi Hasil kepada Desa Bantrung
9. 2. 1. 03. 014 Bagi Hasil kepada Desa Batealit
9. 2. 1. 03. 015 Bagi Hasil kepada Desa Bawu
9. 2. 1. 03. 016 Bagi Hasil kepada Desa Bringin
9. 2. 1. 03. 017 Bagi Hasil kepada Desa Geneng
9. 2. 1. 03. 018 Bagi Hasil kepada Desa Mindahan
9. 2. 1. 03. 019 Bagi Hasil kepada Desa Mindahan Kidul
9. 2. 1. 03. 020 Bagi Hasil kepada Desa Ngasem
9. 2. 1. 03. 021 Bagi Hasil kepada Desa Pekalongan
9. 2. 1. 03. 022 Bagi Hasil kepada Desa Raguklampitan
9. 2. 1. 03. 023 Bagi Hasil kepada Desa Somosari
9. 2. 1. 03. 024 Bagi Hasil kepada Desa Bandungharjo
9. 2. 1. 03. 025 Bagi Hasil kepada Desa Banyumanis
9. 2. 1. 03. 026 Bagi Hasil kepada Desa Blingoh
9. 2. 1. 03. 027 Bagi Hasil kepada Desa Clering
9. 2. 1. 03. 028 Bagi Hasil kepada Desa Jugo
9. 2. 1. 03. 029 Bagi Hasil kepada Desa Sumberrejo
9. 2. 1. 03. 030 Bagi Hasil kepada Desa Tulakan
9. 2. 1. 03. 031 Bagi Hasil kepada Desa Ujungwatu
9. 2. 1. 03. 032 Bagi Hasil kepada Desa Bandengan
9. 2. 1. 03. 033 Bagi Hasil kepada Desa KedungCino
9. 2. 1. 03. 034 Bagi Hasil kepada Desa Kuwasen
9. 2. 1. 03. 035 Bagi Hasil kepada Desa Mulyoharjo
9. 2. 1. 03. 036 Bagi Hasil kepada Desa Wonorejo
9. 2. 1. 03. 037 Bagi Hasil kepada Desa Bakalan
9. 2. 1. 03. 038 Bagi Hasil kepada Desa BandungRejo
9. 2. 1. 03. 039 Bagi Hasil kepada Desa Banyuputih
9. 2. 1. 03. 040 Bagi Hasil kepada Desa BatuKali
9. 2. 1. 03. 041 Bagi Hasil kepada Desa Damarjati
9. 2. 1. 03. 042 Bagi Hasil kepada Desa Kriyan
9. 2. 1. 03. 043 Bagi Hasil kepada Desa Manyargading
9. 2. 1. 03. 044 Bagi Hasil kepada Desa Margoyoso
9. 2. 1. 03. 045 Bagi Hasil kepada Desa Pendosawalan
9. 2. 1. 03. 046 Bagi Hasil kepada Desa Purwogondo
9. 2. 1. 03. 047 Bagi Hasil kepada Desa Robayan
9. 2. 1. 03. 048 Bagi Hasil kepada Desa Sendang

9. 2. 1. 03. 050 Bagi Hasil kepada Desa Kemujan
9. 2. 1. 03. 051 Bagi Hasil kepada Desa Nyamuk
9. 2. 1. 03. 052 Bagi Hasil kepada Desa Parang
9. 2. 1. 03. 053 Bagi Hasil kepada Desa Bugel
9. 2. 1. 03. 054 Bagi Hasil kepada Desa Bulak Baru
9. 2. 1. 03. 055 Bagi Hasil kepada Desa Dongos
9. 2. 1. 03. 056 Bagi Hasil kepada Desa Jondang
9. 2. 1. 03. 057 Bagi Hasil kepada Desa Kalianyar
9. 2. 1. 03. 058 Bagi Hasil kepada Desa Karangaji
9. 2. 1. 03. 059 Bagi Hasil kepada Desa Kedung Malang
9. 2. 1. 03. 060 Bagi Hasil kepada Desa Kerso
9. 2. 1. 03. 061 Bagi Hasil kepada Desa Menganti
9. 2. 1. 03. 062 Bagi Hasil kepada Desa Panggung
9. 2. 1. 03. 063 Bagi Hasil kepada Desa Rau
9. 2. 1. 03. 064 Bagi Hasil kepada Desa Sowan Kidul
9. 2. 1. 03. 065 Bagi Hasil kepada Desa Sowan Lor
9. 2. 1. 03. 066 Bagi Hasil kepada Desa Sukosono
9. 2. 1. 03. 067 Bagi Hasil kepada Desa Surodadi
9. 2. 1. 03. 068 Bagi Hasil kepada Desa Tanggultlare
9. 2. 1. 03. 069 Bagi Hasil kepada Desa Tedunan
9. 2. 1. 03. 070 Bagi Hasil kepada Desa Wanusobo
9. 2. 1. 03. 071 Bagi Hasil kepada Desa Bumiharjo
9. 2. 1. 03. 072 Bagi Hasil kepada Desa Damarwulan
9. 2. 1. 03. 073 Bagi Hasil kepada Desa Gelang
9. 2. 1. 03. 074 Bagi Hasil kepada Desa Jlegong
9. 2. 1. 03. 075 Bagi Hasil kepada Desa Kaligarang
9. 2. 1. 03. 076 Bagi Hasil kepada Desa Kelet
9. 2. 1. 03. 077 Bagi Hasil kepada Desa Keling
9. 2. 1. 03. 078 Bagi Hasil kepada Desa Klepu
9. 2. 1. 03. 079 Bagi Hasil kepada Desa Kunir
9. 2. 1. 03. 080 Bagi Hasil kepada Desa Tempur
9. 2. 1. 03. 081 Bagi Hasil kepada Desa Tunahan
9. 2. 1. 03. 082 Bagi Hasil kepada Desa Watuaji
9. 2. 1. 03. 083 Bagi Hasil kepada Desa Balong
9. 2. 1. 03. 084 Bagi Hasil kepada Desa Bucu
9. 2. 1. 03. 085 Bagi Hasil kepada Desa Cepogo
9. 2. 1. 03. 086 Bagi Hasil kepada Desa Dermolo
9. 2. 1. 03. 087 Bagi Hasil kepada Desa Dudakawu
9. 2. 1. 03. 088 Bagi Hasil kepada Desa Jinggotan
9. 2. 1. 03. 089 Bagi Hasil kepada Desa Kaliaman
9. 2. 1. 03. 090 Bagi Hasil kepada Desa Kancilan
9. 2. 1. 03. 091 Bagi Hasil kepada Desa Pendem
9. 2. 1. 03. 092 Bagi Hasil kepada Desa Sumanding
9. 2. 1. 03. 093 Bagi Hasil kepada Desa Tubanan
9. 2. 1. 03. 094 Bagi Hasil kepada Desa Bandung
9. 2. 1. 03. 095 Bagi Hasil kepada Desa Buaran
9. 2. 1. 03. 096 Bagi Hasil kepada Desa Bungu
9. 2. 1. 03. 097 Bagi Hasil kepada Desa Datar
9. 2. 1. 03. 098 Bagi Hasil kepada Desa Jebol
9. 2. 1. 03. 099 Bagi Hasil kepada Desa Kuanyar
9. 2. 1. 03. 100 Bagi Hasil kepada Desa Mayong Kidul
9. 2. 1. 03. 101 Bagi Hasil kepada Desa Mayong Lor
9. 2. 1. 03. 102 Bagi Hasil kepada Desa Ngroto
9. 2. 1. 03. 103 Bagi Hasil kepada Desa Pancur
9. 2. 1. 03. 104 Bagi Hasil kepada Desa Paren
9. 2. 1. 03. 105 Bagi Hasil kepada Desa Pelang
9. 2. 1. 03. 106 Bagi Hasil kepada Desa Pelemkerep
9. 2. 1. 03. 107 Bagi Hasil kepada Desa Pule



9. 2. 1. 03. 109 Bagi Hasil kepada Desa Sengon Bugel
9. 2. 1. 03. 110 Bagi Hasil kepada Desa Singorojo
9. 2. 1. 03. 111 Bagi Hasil kepada Desa Tigajuru
9. 2. 1. 03. 112 Bagi Hasil kepada Desa Jambu
9. 2. 1. 03. 113 Bagi Hasil kepada Desa Jambu Timur
9. 2. 1. 03. 114 Bagi Hasil kepada Desa Karanggondang
9. 2. 1. 03. 115 Bagi Hasil kepada Desa Mororejo
9. 2. 1. 03. 116 Bagi Hasil kepada Desa Sekuro
9. 2. 1. 03. 117 Bagi Hasil kepada Desa Sinanggul
9. 2. 1. 03. 118 Bagi Hasil kepada Desa Srobyong
9. 2. 1. 03. 119 Bagi Hasil kepada Desa Suwawal
9. 2. 1. 03. 120 Bagi Hasil kepada Desa Bategede
9. 2. 1. 03. 121 Bagi Hasil kepada Desa BendanPete
9. 2. 1. 03. 122 Bagi Hasil kepada Desa Blimbingrejo
9. 2. 1. 03. 123 Bagi Hasil kepada Desa Daren
9. 2. 1. 03. 124 Bagi Hasil kepada Desa Dorang
9. 2. 1. 03. 125 Bagi Hasil kepada Desa Gemiring Kidul
9. 2. 1. 03. 126 Bagi Hasil kepada Desa Gemiring Lor
9. 2. 1. 03. 127 Bagi Hasil kepada Desa Jatisari
9. 2. 1. 03. 128 Bagi Hasil kepada Desa Karangnongko
9. 2. 1. 03. 129 Bagi Hasil kepada Desa Muryolobo
9. 2. 1. 03. 130 Bagi Hasil kepada Desa Nalumsari
9. 2. 1. 03. 131 Bagi Hasil kepada Desa Ngetuk
9. 2. 1. 03. 132 Bagi Hasil kepada Desa Pringtulis
9. 2. 1. 03. 133 Bagi Hasil kepada Desa Tritis
9. 2. 1. 03. 134 Bagi Hasil kepada Desa Tunggul Pandean
9. 2. 1. 03. 135 Bagi Hasil kepada Desa Bulungan
9. 2. 1. 03. 136 Bagi Hasil kepada Desa Kawak
9. 2. 1. 03. 137 Bagi Hasil kepada Desa Lebak
9. 2. 1. 03. 138 Bagi Hasil kepada Desa Mambak
9. 2. 1. 03. 139 Bagi Hasil kepada Desa Plajan
9. 2. 1. 03. 140 Bagi Hasil kepada Desa Slagi
9. 2. 1. 03. 141 Bagi Hasil kepada Desa Suwawal Timur
9. 2. 1. 03. 142 Bagi Hasil kepada Desa Tanjung
9. 2. 1. 03. 143 Bagi Hasil kepada Desa Gemulung
9. 2. 1. 03. 144 Bagi Hasil kepada Desa Gerdu
9. 2. 1. 03. 145 Bagi Hasil kepada Desa Kaliombo
9. 2. 1. 03. 146 Bagi Hasil kepada Desa KarangRandu
9. 2. 1. 03. 147 Bagi Hasil kepada Desa Krasak
9. 2. 1. 03. 148 Bagi Hasil kepada Desa Lebuawu
9. 2. 1. 03. 149 Bagi Hasil kepada Desa Ngeling
9. 2. 1. 03. 150 Bagi Hasil kepada Desa Pecangaan Kulon
9. 2. 1. 03. 151 Bagi Hasil kepada Desa Pecangaan Wetan
9. 2. 1. 03. 152 Bagi Hasil kepada Desa Pulodarat
9. 2. 1. 03. 153 Bagi Hasil kepada Desa Rengging
9. 2. 1. 03. 154 Bagi Hasil kepada Desa Troso
9. 2. 1. 03. 155 Bagi Hasil kepada Desa Demangan
9. 2. 1. 03. 156 Bagi Hasil kepada Desa Kecapi
9. 2. 1. 03. 157 Bagi Hasil kepada Desa Krapyak
9. 2. 1. 03. 158 Bagi Hasil kepada Desa Langon
9. 2. 1. 03. 159 Bagi Hasil kepada Desa Mangunan
9. 2. 1. 03. 160 Bagi Hasil kepada Desa Mantingan
9. 2. 1. 03. 161 Bagi Hasil kepada Desa Ngabul
9. 2. 1. 03. 162 Bagi Hasil kepada Desa Peteyekan
9. 2. 1. 03. 163 Bagi Hasil kepada Desa Platar
9. 2. 1. 03. 164 Bagi Hasil kepada Desa Semat
9. 2. 1. 03. 165 Bagi Hasil kepada Desa Senenan
9. 2. 1. 03. 166 Bagi Hasil kepada Desa Sukodono



- 9. 2. 1. 03. 168 Bagi Hasil kepada Desa TegalSambi
- 9. 2. 1. 03. 169 Bagi Hasil kepada Desa TelukAwur
- 9. 2. 1. 03. 170 Bagi Hasil kepada Desa Brantak Sekarjati
- 9. 2. 1. 03. 171 Bagi Hasil kepada Desa Bugo
- 9. 2. 1. 03. 172 Bagi Hasil kepada Desa Gedangan
- 9. 2. 1. 03. 173 Bagi Hasil kepada Desa Gidangelo
- 9. 2. 1. 03. 174 Bagi Hasil kepada Desa Guwo Sobokerto
- 9. 2. 1. 03. 175 Bagi Hasil kepada Desa Kalipucang Kulon
- 9. 2. 1. 03. 176 Bagi Hasil kepada Desa Kalipucang Wetan
- 9. 2. 1. 03. 177 Bagi Hasil kepada Desa Karanganyar
- 9. 2. 1. 03. 178 Bagi Hasil kepada Desa Kedung Sarimulyo
- 9. 2. 1. 03. 179 Bagi Hasil kepada Desa Kendeng Sidualit
- 9. 2. 1. 03. 180 Bagi Hasil kepada Desa Ketileng Singolelo
- 9. 2. 1. 03. 181 Bagi Hasil kepada Desa Sidigede
- 9. 2. 1. 03. 182 Bagi Hasil kepada Desa Teluk Wetan
- 9. 2. 1. 03. 183 Bagi Hasil kepada Desa Ujung Pandan
- 9. 2. 1. 03. 184 Bagi Hasil kepada Desa Welahan
- 9. 2. 1. 03. 185 Bagi Hasil kepada TPI

9. 2. 2. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

9. 2. 2. 01. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota / Desa

- 9. 2. 2. 01. 001 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota / Desa

9. 2. 3. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

9. 2. 3. 01. Bantuan Keuangan Kepada Provinsi

- 9. 2. 3. 01. 001 Bantuan Keuangan Kepada Provinsi

9. 2. 3. 02. Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota

- 9. 2. 3. 02. 001 Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Lain

9. 2. 4. Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa

9. 2. 4. 01. Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa

- 9. 2. 4. 01. 001 Bantuan keuangan kepada Desa Bangsri
- 9. 2. 4. 01. 002 Bantuan keuangan kepada Desa Banjar Agung
- 9. 2. 4. 01. 003 Bantuan keuangan kepada Desa Banjarn
- 9. 2. 4. 01. 004 Bantuan keuangan kepada Desa Bondo
- 9. 2. 4. 01. 005 Bantuan keuangan kepada Desa Guyangan
- 9. 2. 4. 01. 006 Bantuan keuangan kepada Desa Jerukwangi
- 9. 2. 4. 01. 007 Bantuan keuangan kepada Desa Kedungleper
- 9. 2. 4. 01. 008 Bantuan keuangan kepada Desa Kepuk
- 9. 2. 4. 01. 009 Bantuan keuangan kepada Desa Papasan
- 9. 2. 4. 01. 010 Bantuan keuangan kepada Desa Srikandang
- 9. 2. 4. 01. 011 Bantuan keuangan kepada Desa Tengguli
- 9. 2. 4. 01. 012 Bantuan keuangan kepada Desa Wedelan
- 9. 2. 4. 01. 013 Bantuan keuangan kepada Desa Bantrung
- 9. 2. 4. 01. 014 Bantuan keuangan kepada Desa Batealit
- 9. 2. 4. 01. 015 Bantuan keuangan kepada Desa Bawu
- 9. 2. 4. 01. 016 Bantuan keuangan kepada Desa Bringin
- 9. 2. 4. 01. 017 Bantuan keuangan kepada Desa Geneng
- 9. 2. 4. 01. 018 Bantuan keuangan kepada Desa Mindahan
- 9. 2. 4. 01. 019 Bantuan keuangan kepada Desa Mindahan Kidul
- 9. 2. 4. 01. 020 Bantuan keuangan kepada Desa Ngasem
- 9. 2. 4. 01. 021 Bantuan keuangan kepada Desa Pekalongan
- 9. 2. 4. 01. 022 Bantuan keuangan kepada Desa Raguklampitan
- 9. 2. 4. 01. 023 Bantuan keuangan kepada Desa Somosari
- 9. 2. 4. 01. 024 Bantuan keuangan kepada Desa Bandungharjo
- 9. 2. 4. 01. 025 Bantuan keuangan kepada Desa Banyumanis
- 9. 2. 4. 01. 026 Bantuan keuangan kepada Desa Blingoh
- 9. 2. 4. 01. 027 Bantuan keuangan kepada Desa Clering



9. 2. 4. 01. 029 Bantuan keuangan kepada Desa Sumberrejo
9. 2. 4. 01. 030 Bantuan keuangan kepada Desa Tulakan
9. 2. 4. 01. 031 Bantuan keuangan kepada Desa Ujungwatu
9. 2. 4. 01. 032 Bantuan keuangan kepada Desa Bandengan
9. 2. 4. 01. 033 Bantuan keuangan kepada Desa KedungCino
9. 2. 4. 01. 034 Bantuan keuangan kepada Desa Kuwasen
9. 2. 4. 01. 035 Bantuan keuangan kepada Desa Mulyoharjo
9. 2. 4. 01. 036 Bantuan keuangan kepada Desa Wonorejo
9. 2. 4. 01. 037 Bantuan keuangan kepada Desa Bakalan
9. 2. 4. 01. 038 Bantuan keuangan kepada Desa Bandungrejo
9. 2. 4. 01. 039 Bantuan keuangan kepada Desa Banyuputih
9. 2. 4. 01. 040 Bantuan keuangan kepada Desa Batukali
9. 2. 4. 01. 041 Bantuan keuangan kepada Desa Damarjati
9. 2. 4. 01. 042 Bantuan keuangan kepada Desa Kriyan
9. 2. 4. 01. 043 Bantuan keuangan kepada Desa Manyargading
9. 2. 4. 01. 044 Bantuan keuangan kepada Desa Margoyoso
9. 2. 4. 01. 045 Bantuan keuangan kepada Desa Pendosawalan
9. 2. 4. 01. 046 Bantuan keuangan kepada Desa Purwogondo
9. 2. 4. 01. 047 Bantuan keuangan kepada Desa Robayan
9. 2. 4. 01. 048 Bantuan keuangan kepada Desa Sendang
9. 2. 4. 01. 049 Bantuan keuangan kepada Desa KarimunJawa
9. 2. 4. 01. 050 Bantuan keuangan kepada Desa Kemujan
9. 2. 4. 01. 051 Bantuan keuangan kepada Desa Nyamuk
9. 2. 4. 01. 052 Bantuan keuangan kepada Desa Parang
9. 2. 4. 01. 053 Bantuan keuangan kepada Desa Bugel
9. 2. 4. 01. 054 Bantuan keuangan kepada Desa Bulak Baru
9. 2. 4. 01. 055 Bantuan keuangan kepada Desa Dongos
9. 2. 4. 01. 056 Bantuan keuangan kepada Desa Jondang
9. 2. 4. 01. 057 Bantuan keuangan kepada Desa Kalianyar
9. 2. 4. 01. 058 Bantuan keuangan kepada Desa Karangaji
9. 2. 4. 01. 059 Bantuan keuangan kepada Desa Kedungmalang
9. 2. 4. 01. 060 Bantuan keuangan kepada Desa Kerso
9. 2. 4. 01. 061 Bantuan keuangan kepada Desa Menganti
9. 2. 4. 01. 062 Bantuan keuangan kepada Desa Panggung
9. 2. 4. 01. 063 Bantuan keuangan kepada Desa Rau
9. 2. 4. 01. 064 Bantuan keuangan kepada Desa Sowan Kidul
9. 2. 4. 01. 065 Bantuan keuangan kepada Desa Sowan Lor
9. 2. 4. 01. 066 Bantuan keuangan kepada Desa Sukosono
9. 2. 4. 01. 067 Bantuan keuangan kepada Desa Surodadi
9. 2. 4. 01. 068 Bantuan keuangan kepada Desa Tanggultlare
9. 2. 4. 01. 069 Bantuan keuangan kepada Desa Tedunan
9. 2. 4. 01. 070 Bantuan keuangan kepada Desa Wanusobo
9. 2. 4. 01. 071 Bantuan keuangan kepada Desa Bumiharjo
9. 2. 4. 01. 072 Bantuan keuangan kepada Desa Damarwulan
9. 2. 4. 01. 073 Bantuan keuangan kepada Desa Gelang
9. 2. 4. 01. 074 Bantuan keuangan kepada Desa Jlegong
9. 2. 4. 01. 075 Bantuan keuangan kepada Desa Kaligarang
9. 2. 4. 01. 076 Bantuan keuangan kepada Desa Kelet
9. 2. 4. 01. 077 Bantuan keuangan kepada Desa Keling
9. 2. 4. 01. 078 Bantuan keuangan kepada Desa Klepu
9. 2. 4. 01. 079 Bantuan keuangan kepada Desa Kunir
9. 2. 4. 01. 080 Bantuan keuangan kepada Desa Tempur
9. 2. 4. 01. 081 Bantuan keuangan kepada Desa Tunahan
9. 2. 4. 01. 082 Bantuan keuangan kepada Desa Watuaji
9. 2. 4. 01. 083 Bantuan keuangan kepada Desa Balong
9. 2. 4. 01. 084 Bantuan keuangan kepada Desa Bucu
9. 2. 4. 01. 085 Bantuan keuangan kepada Desa Cepogo
9. 2. 4. 01. 086 Bantuan keuangan kepada Desa Dermolo

9. 2. 4. 01. 088 Bantuan keuangan kepada Desa Jinggotan
9. 2. 4. 01. 089 Bantuan keuangan kepada Desa Kaliaman
9. 2. 4. 01. 090 Bantuan keuangan kepada Desa Kancilan
9. 2. 4. 01. 091 Bantuan keuangan kepada Desa Pendem
9. 2. 4. 01. 092 Bantuan keuangan kepada Desa Sumanding
9. 2. 4. 01. 093 Bantuan keuangan kepada Desa Tubanan
9. 2. 4. 01. 094 Bantuan keuangan kepada Desa Bandung
9. 2. 4. 01. 095 Bantuan keuangan kepada Desa Buaran
9. 2. 4. 01. 096 Bantuan keuangan kepada Desa Bungu
9. 2. 4. 01. 097 Bantuan keuangan kepada Desa Datar
9. 2. 4. 01. 098 Bantuan keuangan kepada Desa Jebol
9. 2. 4. 01. 099 Bantuan keuangan kepada Desa Kuanyar
9. 2. 4. 01. 100 Bantuan keuangan kepada Desa Mayong Kidul
9. 2. 4. 01. 101 Bantuan keuangan kepada Desa Mayong Lor
9. 2. 4. 01. 102 Bantuan keuangan kepada Desa Ngroto
9. 2. 4. 01. 103 Bantuan keuangan kepada Desa Pancur
9. 2. 4. 01. 104 Bantuan keuangan kepada Desa Paren
9. 2. 4. 01. 105 Bantuan keuangan kepada Desa Pelang
9. 2. 4. 01. 106 Bantuan keuangan kepada Desa Pelemkerep
9. 2. 4. 01. 107 Bantuan keuangan kepada Desa Pule
9. 2. 4. 01. 108 Bantuan keuangan kepada Desa Rajekwesi
9. 2. 4. 01. 109 Bantuan keuangan kepada Desa Sengonbugel
9. 2. 4. 01. 110 Bantuan keuangan kepada Desa Singorojo
9. 2. 4. 01. 111 Bantuan keuangan kepada Desa Tigajuru
9. 2. 4. 01. 112 Bantuan keuangan kepada Desa Jambu
9. 2. 4. 01. 113 Bantuan keuangan kepada Desa Jambu Timur
9. 2. 4. 01. 114 Bantuan keuangan kepada Desa Karanggondang
9. 2. 4. 01. 115 Bantuan keuangan kepada Desa Mororejo
9. 2. 4. 01. 116 Bantuan keuangan kepada Desa Sekuro
9. 2. 4. 01. 117 Bantuan keuangan kepada Desa Sinanggul
9. 2. 4. 01. 118 Bantuan keuangan kepada Desa Srobyong
9. 2. 4. 01. 119 Bantuan keuangan kepada Desa Suwawal
9. 2. 4. 01. 120 Bantuan keuangan kepada Desa Bategede
9. 2. 4. 01. 121 Bantuan keuangan kepada Desa BendanPete
9. 2. 4. 01. 122 Bantuan keuangan kepada Desa Blimbingrejo
9. 2. 4. 01. 123 Bantuan keuangan kepada Desa Daren
9. 2. 4. 01. 124 Bantuan keuangan kepada Desa Dorang
9. 2. 4. 01. 125 Bantuan keuangan kepada Desa Gemiring Kidul
9. 2. 4. 01. 126 Bantuan keuangan kepada Desa Gemiring Lor
9. 2. 4. 01. 127 Bantuan keuangan kepada Desa Jatisari
9. 2. 4. 01. 128 Bantuan keuangan kepada Desa Karangnongko
9. 2. 4. 01. 129 Bantuan keuangan kepada Desa Muryolobo
9. 2. 4. 01. 130 Bantuan keuangan kepada Desa Nalumsari
9. 2. 4. 01. 131 Bantuan keuangan kepada Desa Ngetuk
9. 2. 4. 01. 132 Bantuan keuangan kepada Desa Pringtulis
9. 2. 4. 01. 133 Bantuan keuangan kepada Desa Tritis
9. 2. 4. 01. 134 Bantuan keuangan kepada Desa Tunggulpandean
9. 2. 4. 01. 135 Bantuan keuangan kepada Desa Bulungan
9. 2. 4. 01. 136 Bantuan keuangan kepada Desa Kawak
9. 2. 4. 01. 137 Bantuan keuangan kepada Desa Lebak
9. 2. 4. 01. 138 Bantuan keuangan kepada Desa Mambak
9. 2. 4. 01. 139 Bantuan keuangan kepada Desa Plajan
9. 2. 4. 01. 140 Bantuan keuangan kepada Desa Slagi
9. 2. 4. 01. 141 Bantuan keuangan kepada Desa Suwawal Timur
9. 2. 4. 01. 142 Bantuan keuangan kepada Desa Tanjung
9. 2. 4. 01. 143 Bantuan keuangan kepada Desa Gemulung
9. 2. 4. 01. 144 Bantuan keuangan kepada Desa Gerdu
9. 2. 4. 01. 145 Bantuan keuangan kepada Desa Kaliombo

- 9. 2. 4. 01. 147 Bantuan keuangan kepada Desa Krasak
- 9. 2. 4. 01. 148 Bantuan keuangan kepada Desa Lebuawu
- 9. 2. 4. 01. 149 Bantuan keuangan kepada Desa Ngeling
- 9. 2. 4. 01. 150 Bantuan keuangan kepada Desa Pecangaan Kulon
- 9. 2. 4. 01. 151 Bantuan keuangan kepada Desa Pecangaan Wetan
- 9. 2. 4. 01. 152 Bantuan keuangan kepada Desa Pulodarat
- 9. 2. 4. 01. 153 Bantuan keuangan kepada Desa Rengging
- 9. 2. 4. 01. 154 Bantuan keuangan kepada Desa Troso
- 9. 2. 4. 01. 155 Bantuan keuangan kepada Desa Demangan
- 9. 2. 4. 01. 156 Bantuan keuangan kepada Desa Kecapi
- 9. 2. 4. 01. 157 Bantuan keuangan kepada Desa Krapyak
- 9. 2. 4. 01. 158 Bantuan keuangan kepada Desa Langon
- 9. 2. 4. 01. 159 Bantuan keuangan kepada Desa Mangunan
- 9. 2. 4. 01. 160 Bantuan keuangan kepada Desa Mantingan
- 9. 2. 4. 01. 161 Bantuan keuangan kepada Desa Ngabul
- 9. 2. 4. 01. 162 Bantuan keuangan kepada Desa Petekeyan
- 9. 2. 4. 01. 163 Bantuan keuangan kepada Desa Platar
- 9. 2. 4. 01. 164 Bantuan keuangan kepada Desa Semat
- 9. 2. 4. 01. 165 Bantuan keuangan kepada Desa Senenan
- 9. 2. 4. 01. 166 Bantuan keuangan kepada Desa Sukodono
- 9. 2. 4. 01. 167 Bantuan keuangan kepada Desa Tahunan
- 9. 2. 4. 01. 168 Bantuan keuangan kepada Desa Tegalsambi
- 9. 2. 4. 01. 169 Bantuan keuangan kepada Desa TelukAwur
- 9. 2. 4. 01. 170 Bantuan keuangan kepada Desa Brantaksekarjati
- 9. 2. 4. 01. 171 Bantuan keuangan kepada Desa Bugo
- 9. 2. 4. 01. 172 Bantuan keuangan kepada Desa Gedangan
- 9. 2. 4. 01. 173 Bantuan keuangan kepada Desa Gidangelo
- 9. 2. 4. 01. 174 Bantuan keuangan kepada Desa Guwosobokerto
- 9. 2. 4. 01. 175 Bantuan keuangan kepada Desa Kalipucangkulon
- 9. 2. 4. 01. 176 Bantuan keuangan kepada Desa Kalipucangwetan
- 9. 2. 4. 01. 177 Bantuan keuangan kepada Desa Karanganyar
- 9. 2. 4. 01. 178 Bantuan keuangan kepada Desa Kedungsarimulyo
- 9. 2. 4. 01. 179 Bantuan keuangan kepada Desa Kendengsidialit
- 9. 2. 4. 01. 180 Bantuan keuangan kepada Desa Ketilengsingolelo
- 9. 2. 4. 01. 181 Bantuan keuangan kepada Desa Sidigede
- 9. 2. 4. 01. 182 Bantuan keuangan kepada Desa Teluk Wetan
- 9. 2. 4. 01. 183 Bantuan keuangan kepada Desa Ujungpandan
- 9. 2. 4. 01. 184 Bantuan keuangan kepada Desa Welahan

9. 2. 5. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

9. 2. 5. 01. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

- 9. 2. 5. 01. 001 Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Rincian sesuai jumlah Partai dan Kursi di DPRD)

9. 3. BEBAN NON OPERASIONAL

9. 3. 1. Defisit Penjualan Aset Nonlancar - LO

9. 3. 1. 01. Defisit Penjualan Aset Nonlancar - LO

- 9. 3. 1. 01. 001 Defisit Penjualan Aset Tanah - LO
- 9. 3. 1. 01. 002 Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
- 9. 3. 1. 01. 003 Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
- 9. 3. 1. 01. 004 Defisit Penjualan Aset Non Lancar / Aset Tetap Lainnya - LO
- 9. 3. 1. 01. 005 Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO

9. 3. 2. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

9. 3. 2. 01. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

- 9. 3. 2. 01. 001 Defisit Penyelesaian Utang dari Sektor Perbankan - LO
- 9. 3. 2. 01. 002 Defisit Penyelesaian Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO
- 9. 3. 2. 01. 003 Defisit Penyelesaian Utang Obligasi - LO

- 9. 3. 2. 01. 005 Defisit Penyelesaian Utang dari Pemerintah Daerah lainnya - LO
- 9. 3. 2. 01. 006 Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO

- 9. 3. 3. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
- 9. 3. 3. 01. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
- 9. 3. 3. 01. 001 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

- 9. 4. BEBAN LUAR BIASA - LO
- 9. 4. 1. Beban Luar Biasa - LO
- 9. 4. 1. 01. Beban Luar Biasa - LO
- 9. 4. 1. 01. 001 Beban Luar Biasa - LO

BUPATI JEPARA,

 AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JAWABAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten	
Kepa	
Kasa	
Kepala Biro Pengusul	
BAGIAN HUKUM	